



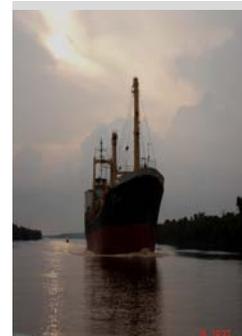
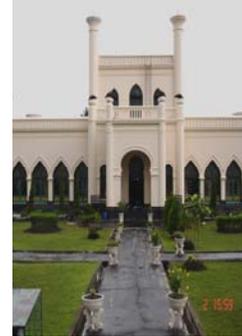
Laporan

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SIAK 2006

Data :
Desember 2005 – Oktober 2006



**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
KABUPATEN SIAK
SIAK SRI INDRAPURA
2006**





BUPATI SIAK

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ketentuan seperti yang tertuang pada Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, kemudian pada Pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sumberdaya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, untuk itu pendayagunaan sumberdaya tersebut haruslah dilakukan dengan penuh kehati hatian dengan tetap mengedepankan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Keterbatasan sumber daya alam merupakan suatu kendala pembangunan nasional yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu upaya konservasi yang merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan harus tetap dilaksanakan secara konsisten.

Kompleksitas dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu sebab terjadinya degradasi lingkungan secara cepat. Adanya benturan kepentingan ekonomi jangka pendek selalu mengalahkan kepentingan ekonomi jangka panjang (kepentingan ekologi). Masyarakat cenderung mengambil keuntungan secara praktis dari sumberdaya alam tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkannya di kemudian hari. Disamping itu kejahatan lingkunganpun telah terbukti mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Konsep dasar pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia yang sustainabel dan sumber daya alam dan lingkungan yang dieksploitasi dijaga kelestariannya secara konsisten terhadap potensi dan daya dukungannya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup manusia harus mampu dan berani menunjukkan keterbatasan dirinya. Bukan hanya semata berupaya mempraktekkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya untuk merenggut segala yang ada di bumi ini, tapi justru pengendalian dirinya dalam batas toleransi lingkungan hidup dimana ia berada.

Dengan penyusunan dokumen Basis Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak secara teratur diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan bahan pertimbangan serta data pendukung dokumen laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak bagi pengambil keputusan dalam upaya mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan

Masukan dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan buku ini dimasa selanjutnya dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 ini, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Siak Sri Inderapura, Desember 2006
BUPATI SIAK

H. ARWIN AS, SH

ABSTRAK

POTRET WILAYAH :

Siak merupakan salah satu pemerintahan kabupaten dalam wilayah administrasi Propinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada posisi 1° 16' 30" LU - 0° 20' 49" LU dan 100° 54' 21" BT - 102° 10' 59" BT. Secara administratif wilayah Kabupaten Siak pada akhir tahun 2002 telah dimekarkan menjadi 8 Kecamatan, kemudian dikembangkan menjadi 11 kecamatan, dan terakhir menjadi 13 kecamatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 53 Tahun 1999, yang merupakan landasan hukum pembentukan Kabupaten Siak, maka luas wilayah Kabupaten Siak adalah sebesar 8.556,09 km², dengan batas – batas antara lain :

- ✚ Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- ✚ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis

Sebagian wilayah Kabuapten Siak terdiri dari dataran rendah di Bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat, beriklim tropis dengan suhu berkisar 25° C – 32° C. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol gley humus dalam bentuk rawa – rawa atau tanah basah. Salah satu sumberdaya alam yang memiliki potensi besar adalah dibidang kehutanan dengan keluasan 483.404.248 Ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 7.753,475 ha, hutan suaka alam seluas 69.844,247 Ha. Hutan produksi seluas 183.551,898. Hutan produksi terbatas seluas 215.393,25 ha, dan hutan lainnya seluas 6.820,25 ha.

Berbagai potensi kekayaan sumberdaya alam terdapat di wilayah Kabupaten Siak seperti sumber daya lahan dan hutan, sumber daya dibidang perkebunan, sumber daya mineral dan bahan galian seperti minyak bumi, emas plaser, timah putih, kaolin, granit, bentonit, kuarsit, andesit, pasir kuarsa, tanah urug, tanah liat, batu gamping, pasir bangunan, dll). Namun baru sebagian dari potensi kekayaan alam yang ada yang sudah dikembangkan, terutama di sektor perkebunan. Potensi di sektor lain seperti pertambangan dan bahan mineral masih belum dikelola dengan sungguh – sungguh. Dengan keberadaan sumberdaya alam tersebut dan didukung oleh letak geografis yang strategis dan jika dipandang dari sudut ekonomi dan stabilitas keamanan yang relatif aman dan terkendali, maka seharusnya hal ini merupakan daya tarik tersendiri yang dapat menarik investor lebih banyak lagi untuk

berinvestasi di Kabupaten Siak, dengan tetap mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi pencapaian visi Kabupaten Siak.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN :

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Siak di arahkan pada pencapaian Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

" Terwujudnya Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau yang Didukung Oleh Agribisnis, Agro Industri dan Pariwisata Yang Maju dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Sejahtera Tahun 2020"

Makna yang terkandung di dalam visi pembangunan daerah tersebut antara lain :

- Potensi sumberdaya alam yang sangat menonjol dapat dimanfaatkan sebagai tumpuan dasar gerak pembangunan dengan *mempertimbangkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.*
- Potensi pertanian dan perkebunan dalam arti luas dibinakembangkan sebagai acuan utama pengembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Siak yang berfokus pada kegiatan agribisnis dan agro industri.
- Gerak pembangunan yang berfokus pada kegiatan agribisnis dan agro industri ini, diharapkan mendorong Kabupaten Siak pada tahun 2020 menjadi pusat kegiatan tersebut di wilayah Propinsi Riau.
- Bertumpu pada faktor sejarah Kabupaten Siak, pembangunan Kabupaten Siak mendorong kegiatan tujuan pariwisata budaya dan menjadikan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu.

Misi :

Dalam rangka mendukung visi yang akan dicapai, maka telah pula ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun 2002 – 2006 yakni :

- ✚ Mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan nilai – nilai budaya melayu.
- ✚ Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintahan daerah demi terwujudnya system pemerintahan yang baik (Good Governace)
- ✚ Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agro industri.

- ✚ Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan *pembangunan daerah yang berkelanjutan*.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 bersandarkan pada 5 pilar pemacu pembangunan yaitu :

- ☀ Peningkatan iman dan taqwa
- ☀ Peningkatan kesenian dan budaya
- ☀ Peningkatan sumberdaya manusia
- ☀ Peningkatan kesehatan dan olah raga
- ☀ Pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan

Disamping itu juga telah ditetapkan sektor prioritas, sektor potensial dan sektor strategis yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Siak. Sektor prioritas terdiri dari ; sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa. Sektor potensial adalah sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor pertambangan. Sektor strategis adalah sektor transportasi.

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN :

● **Kebakaran Hutan dan Lahan :**

Kebakaran lahan dan hutan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sepertinya sudah menjadi agenda tahunan isu lingkungan di Kabupaten Siak. Kebijakan penanggulangan yang ada selama ini belum mampu mengantisipasi bencana lingkungan ini. Upaya penanggulangan represif terhadap adanya kebakaran lahan dan hutan tidak memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu tindakan preventif pencegahan jauh lebih baik sebagai upaya penanggulangan permasalahan ini.

Selanjutnya mencermati kebijakan yang ada saat ini, maka perlu adanya peningkatan komitmen dan menjadikan UU Nomor 41 Tahun 1999, sebagai pedoman dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Menjadikan UU Nomor : 23 Tahun 1997 sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan. Penerapan sangsi hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan (*Law Enforcement*), Optimalisasi fungsi *Satgas – Dalkarhutla*, dan partisipasi masyarakat. Pemberian insentif bagi penegak hukum lingkungan.

● **Illegal Logging**

Dengan harapan keuntungan yang besar tanpa memperdulikan hukum yang berlaku mengakibatkan kejahatan illegal logging di Indonesia termasuk di Kabupaten Siak menjadi sulit diberantas sampai ke akar akarnya. Kompleksitas permasalahan ini karena banyak melibatkan segenap pihak dari atas sampai ke bawah, di pusat dan di daerah termasuk aparat penegak hukum. Beberapa kasus illegal logging yang terjadi sangat sedikit yang dapat di selesaikan di pengadilan. Dengan menggunakan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai tameng di lapangan, kejahatan ini terus saja berlangsung dan bahkan kegiatan eksploitasi kayu sudah merambah ke kawasan konservasi dan kawasan lindung.

Untuk menanggulangi masalah ini maka perlu adanya pemantapan kinerja aparat penegakan hukum dan pengawasan internal. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan melalui manajemen eksploitasi sumberdaya hutan yang lestari. Pembinaan masyarakat hutan melalui pengenalan mata pencaharian alternatif. Mempertimbangkan penghentian eksploitasi sumberdaya kayu alami dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Pemberian sanksi dua kali lebih berat dari yang tertera di undang – undang bagi aparat dan penegak hukum yang terlibat kejahatan illegal logging.

● **Pencemaran Sungai Siak**

Kebijakan pengelolaan Sungai Siak sampai saat ini belum lagi menampakkan hasil yang menggembirakan. Degradasi terhadap kualitas air Sungai Siak, kian hari semakin parah. Berbagai upaya sudah dilakukan, baik ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Riau, termasuk Kabupaten Siak. Upaya yang dilakukan kebanyakan baru sebatas mencari formulasi terbaik untuk melakukan pengelolaan Sungai Siak yang komprehensif pada berbagai seminar dan lokakarya. Berbagai kegiatan penelitian telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun hasil penelitian tersebut belum dapat ditindaklanjuti sebagai upaya penanggulangan masalah pencemaran di Sungai Siak. Pembentukan Forum DAS Siak, maupun Forum DAS Riau sebagai salah satu langkah awal belum menampakkan hasil nyata di lapangan. Berbagai konsep dan program pembangunan yang bertujuan sebagai upaya konservasi Sungai Siak, seperti konsep one river one plan dan konsep perencanaan pembangunan water front city, masih sebatas wacana di atas kertas.

Kesadaran masyarakat dan dunia usaha sebagai salah satu komponen penghasil limbah yang dapat mencemari Sungai Siak, masih jauh dari yang diharapkan.

Beberapa aktivitas usaha di sepanjang DAS Siak yang berpotensi mencemari Sungai Siak masih belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya secara optimal. Disamping terdapatnya aktivitas rumah tangga dan pemukiman penghasil limbah di sepanjang Sungai Siak, maka juga tidak kurang dari 43 jenis industri yang menghasilkan limbah mengalirkan limbahnya ke Sungai Siak. Dari buangan limbah pencemar tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya beban pencemaran Sungai Siak dan ini berarti proses degradasi Sungai Siak terus berlanjut. Beberapa perusahaan industri di sepanjang Sungai Siak telah memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL), namun keberadaannya masih sebatas formalitas saja. Industri yang telah memiliki IPAL yang representatifpun masih belum secara optimal memfungsikan IPALnya dengan alasan mahalnya biaya operasional IPAL.

● **Abrasi Sungai Siak**

Kesalahan penggunaan dan pengelolaan lahan di kawasan DAS Siak telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan abrasi di Sungai Siak. Penyebab utama terjadinya abrasi di sepanjang Sungai Siak dari luar badan sungai adalah penggunaan lahan budidaya yang tidak memperhatikan ketentuan pencadangan lahan sebagai barrier atau green belt. Salah satu kegiatan pada kawasan DAS Siak yang telah terbukti memberikan kontribusi negatif terhadap Sungai Siak adalah kegiatan kehutanan dan pembukaan lahan perkebunan. Eksploitasi sumberdaya hutan dan pengembangan usaha perkebunan yang tidak terkendali dan dengan tidak memperhitungkan dampak lingkungan mengakibatkan hutan akan kehilangan fungsi ekologisnya, dimana salah satunya berfungsi sebagai penyimpan air penyangga terjadinya bencana erosi yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya sedimentasi Sungai Siak. Kerusakan kawasan konservasi akibat eksploitasi sumberdaya hutan dan pembukaan lahan pertanian untuk berladang telah meningkatkan erosi serta laju sedimentasi perairan Sungai Siak.

Sebagai media transportasi, Sungai Siak memiliki peranan yang sangat penting di Propinsi Riau. Semakin hari kegiatan mobilisasi orang dan barang dengan menggunakan media transportasi semakin meningkat. Sampai tahun 2005 tercatat sekitar 25 kali lalu lintas kapal barang dan 24 kapal penumpang umum yang melintasi Sungai Siak. Aktivitas lalu lintas pelayaran kapal yang menghasilkan gelombang telah terbukti berdampak pada peningkatan terjadinya abrasi tebing sungai. Gelombang yang menyisir dan arus akibat baling baling kapal merambat sepanjang tebing. Run-up dan run down gelombang di tebing sungai akan menggerus tanah dasar tebing. Lokasi penggerusan terjadi pada muka air. Intensitas penggerusan yang dominan

terutama terjadi pada posisi permukaan air surut. Proses abrasi yang disebabkan oleh gelombang terjadi sedikit demi sedikit, namun berlangsung secara terus menerus. Abrasi tebing yang terjadi semakin di picu oleh hilangnya vegetasi pinggir sungai akibat kesalahan penggunaan lahan. Dengan semakin meningkatnya frekwensi lalu lintas di lintasan Sungai Siak di masa selanjutnya akibat penambahan penduduk maka diperkirakan proses abrasi Sungai Siak akan semakin meningkat.

REKOMENDASI :

Sehubungan dengan belum terealisasinya kebijakan terdahulu dan untuk kesinambungan arah pembangunan lebih lanjut, maka perlu direkomendasikan beberapa program seperti tahun sebelumnya seperti berikut ini.

- Program penataan fungsi kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia.
- Program konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam lingkungan.
- Program penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
- Program pengadaan sarana dan prasarana upaya pengelolaan lingkungan.
- Program pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan hidup.

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Tujuan Penyusunan Status Lingk. Hidup Daerah (SLHD)	I - 3
1.3 Metode, Konsep dan Kriteria Penyusunan SLHD	I - 3
1.4 Isu Utama Lingkungan Kabupaten Siak Tahun 2006	I - 6
1.5 Tingkat Kesadaran Masyarakat Kabupaten Siak Dalam Menjaga Kelestarian Lingk. Hidup Tahun 2006	I - 8
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	
2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah Siak	II - 3
2.1.1 Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak	II - 6
2.2 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	II - 8
2.2.1 Visi dan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Siak	II - 11
2.2.2 Strategi Pengelolaan Lingkungan.	II - 13
2.2.3 Kebijakan Operasional Pengelolaan Lingk. Hidup	II - 13
2.3 Kebijakan Tata Ruang	II - 16
2.3.1 Konsepsi Pemanfaatan Ruang	II - 16
2.3.2 Arah Struktur Pemanfaatan Ruang Kabupaten Siak (2002 -2011)	II - 17
2.4 Kebijakan Sosial Ekonomi dan Budaya	II - 24
2.4.1 Sosial	II - 24
2.4.2 Ekonomi	II - 32
2.4.3 Budaya	II - 37

BAB III ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

3.1 Analisis Isu Lingkungan Hidup	III – 2
3.1.1 Kebakaran Hutan dan Lahan	III – 2
3.1.2 Illegal Logging	III – 19
3.1.3 Pencemaran Sungai Siak	III – 27
3.1.4 Abrasi Sungai Siak	III – 37
3.2 Evaluasi Kebijakan	III – 48
3.2.1 Kebakaran Hutan dan Lahan	III – 48
3.2.2 Illegal Logging	III – 50
3.2.3 Abrasi Sungai Siak	III – 51
3.2.4 Pencemaran Sungai Siak	III – 53

BAB IV REKOMENDASI

4.1 Rekomendasi Program	IV – 2
4.2 Rekomendasi Proyek / Kegiatan	IV – 5

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel	1.1	Data Kualifikasi Personal SDM BAPEDALDA Siak	I – 11
Tabel	1.2	Data Perda dan SK Bupati di Bidang Lingkungan Kab. Siak	I – 12
Tabel	1.3	Data Kegiatan Pada BAPEDALDA Siak Tahun Anggaran 2006	I – 13
Tabel	1.4	Proyek Pemerintah yang di Lengkapi AMDAL/UKL-UPL	I - 13
Tabel	1.5	Data Kegiatan Swasta Yang Memiliki AMDAL atau UKL-UPL di Siak	I – 15
Tabel	1.6	Data LSM Bidang Lingkungan Hidup	I - 19
Tabel	2.1	Deskripsi Kegiatan Kabupaten Siak	II - 19
Tabel	2.2	Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak	II - 20
Tabel	2.3	Luas Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam	II – 22
Tabel	2.4	Data Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial	II – 27
Tabel	3.1	Data Hot Spot Kabupaten Siak Juli – Oktober 2006	III – 10
Tabel	3.2	Data Illegal Logging Kabupaten Siak	III - 21
Tabel	3.3	Jumlah Produksi Kayu Olahan	III – 22
Tabel	3.4	Luas Wilayah Administrasi DAS Siak	III – 28
Tabel	3.5	Kegiatan Usaha Penghasil Limbah Ke Sungai Siak	III – 31
Tabel	3.6	Dampak Limbah Pencemar Industri Terhadap Biota Perairan	III – 32
Tabel	3.7	Data Frekwensi Lalu Lintas kapal	III – 39
Tabel	3.8	Lokasi Abrasi Sungai Siak	III – 43

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Hirarki dan Refleksi Status Lingkungan Hidup	I – 2
Gambar 1.2	Peta Orientasi Kabupaten Siak	I – 4
Gambar 1.3	Hubungan SoER dan GEG	I – 5
Gambar 1.4	Model Pressure, State, Respons (PSR)	I – 6
Gambar 1.5	Kegiatan Peningkatan SDM Lingkungan Hidup Siak	I – 10
Gambar 1.6	Penerimaan PAD Bapedalda Siak	I – 14
Gambar 1.7	Limbah Cair PKS dan Land Application	I - 14
Gambar 1.8	Limbah Cair PKS dan IPAL	I - 15
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Siak	II – 2
Gambar 2.2	Peta Tata Ruang Kabupaten Siak	II – 25
Gambar 2.3	PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional per Kapita atas Harga Berlaku Kabupaten Siak	II – 34
Gambar 3.1	Kebakaran Hutan Merusak Lingkungan	III – 2
Gambar 3.2	Dampak Asap Akibat Kebakaran hutan	III – 3
Gambar 3.3	Pembukaan Lahan Untuk Perkebunan	III – 4
Gambar 3.4	Luas Lahan dan Hutan yang Terbakar	III – 8
Gambar 3.5	Grafik Jumlah Hot Spot Juli 2006 – Oktober 2006	III – 10
Gambar 3.6	Peta sebaran Hot Spot Bulan Juli	III – 15
Gambar 3.7	Peta sebaran Hot Spot Bulan Agustus	III – 16
Gambar 3.8	Peta sebaran Hot Spot Bulan September	III – 17
Gambar 3.9	Peta sebaran Hot Spot Bulan Oktober	III – 18
Gambar 3.10	Peta Penyebaran HTI dan HPH di Kabupaten Siak	III – 20
Gambar 3.11	Grafik Produksi Kayu Olahan	III – 21
Gambar 3.12	PDRB Atas Harga Berlaku Sektor Kehutanan	III – 23
Gambar 3.13	Penerimaan Sektor Kehutanan Kabupaten Siak	III – 23
Gambar 3.14	Aktivitas Illegal Logging di Kabupaten Siak	III – 24
Gambar 3.15	Potensi Pencemaran Sungai Siak	III – 29
Gambar 3.16	Peta Sebaran Potensi Pencemaran	III – 30
Gambar 3.17	Beban Pencemaran Sungai Siak Penerimaan Non Domestik	III - 31

Gambar	3.18	Perkebunan Sepadan Dinding Sungai Siak	III – 32
Gambar	3.19	Aktivitas Transportasi Lintasan Sungai Siak	III – 38
Gambar	3.20	Gelombang Kapal Penyebab Abrasi Sungai Siak	III – 39
Gambar	3.21	Pemukiman dan Tumpukan Material Mengancam Stabilitas Dinding Sungai Siak	III – 41
Gambar	3.22	Dampak Abrasi Terhadap Bangunan Tepi Sungai	III – 41
Gambar	3.23	Peta Sebaran Abrasi Sungai Siak	III – 42
Gambar	3.24	Pembangunan Turap Penanggulangan Abrasi Sungai Siak	III – 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

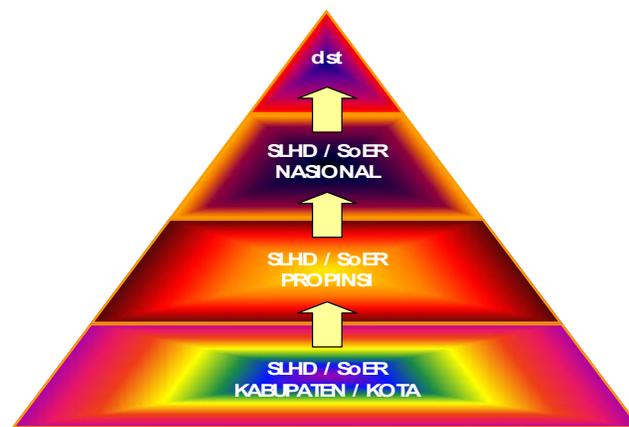
Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang lingkungan dan pembangunan (*The United Nations Conference on Environment and Development – UNCED*) di Rio de Janeiro tahun 1992 menghasilkan beberapa strategi yang dituangkan dalam Agenda 21, yakni beberapa isu utama lintas sektor yang saling berkaitan. Salah satu isu penting tersebut dituangkan dalam Chapter 40 tentang **Informasi Bagi Pengambil Keputusan** yang menggaris bawahi pentingnya kemampuan pemerintah baik pada tingkat lokal / daerah, nasional, regional, maupun internasional untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi multi sektoral dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan analisis data serta penyajian informasi segala aspek lingkungan hidup bagi pengambil keputusan dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan. Agenda 21 telah mengekspresikan bahwa secara global sangat penting meningkatkan pemahaman terhadap keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta resultan sebab akibatnya. Kenyataan ini menggaris bawahi pentingnya laporan pengelolaan lingkungan hidup disusun baik pada tingkat lokal / daerah, nasional, regional, maupun global.

Lingkungan hidup merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia, oleh karena itu keberadaan lingkungan yang baik patut disyukuri dan dipertahankan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban bagi kita semua yang patut diwujudkan melalui upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (**UU No. 23 / 1997**). Keberadaan Undang – Undang Nomor : 04 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat untuk melaksanakan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berpedoman pada undang undang

tersebut, beserta peraturan pendukung lainnya yang ada di bawahnya, upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan. Dimana dalam undang – undang tersebut dinyatakan bahwa upaya pengelolaan lingkungan dilakukan secara sadar dan terencana, oleh karena itu perlu adanya kesamaan persepsi tentang pengelolaan lingkungan.

Integrasi pembangunan nasional merupakan refleksi dari pembangunan regional dan lokal, ataupun pembangunan daerah daerah di bawahnya (**Gambar 1.1**). Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan dan implementasi pembangunan di daerah – daerah. Karena itu keberhasilan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan berkelanjutan, sangat ditentukan oleh para pengambil kebijakan di setiap daerah.



Gambar 1.1 Hirarki dan Refleksi Status Lingkungan Hidup

Mengacu terhadap kebijakan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004, serta dengan tetap berpedoman terhadap Undang–Undang Nomor : 23 Tahun 1997, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu materi kewenangan yang didesentralisasikan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dengan demikian, hal ini berarti pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya masing – masing.

Munculnya suatu kebijakan yang diambil, tidak terlepas dari pertimbangan permasalahan yang muncul serta didasarkan pada kondisi aktual lapangan. Suatu kebijakan yang diambil akan tepat sasaran dalam implementasinya, apabila tersedianya data dan informasi yang faktual, akurat dan terbaru. Untuk itulah, sebagai salah satu daerah kabupaten di Indonesia, Kabupaten Siak (**Gambar 1.2**) turut berpartisipasi serta mendukung kegiatan penyusunan status lingkungan hidup daerah ini sebagai bentuk penyajian data dan informasi serta permasalahan aktual lingkungan yang berkembang di wilayah ini.

1.2 Tujuan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Tujuan dari penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini adalah :

- Menyediakan pondasi yang handal berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
- Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta untuk kepentingan penanaman modal (Investor).
- Meyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) / **GEG** di daerah (**Gambar 1.3**), sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sebagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

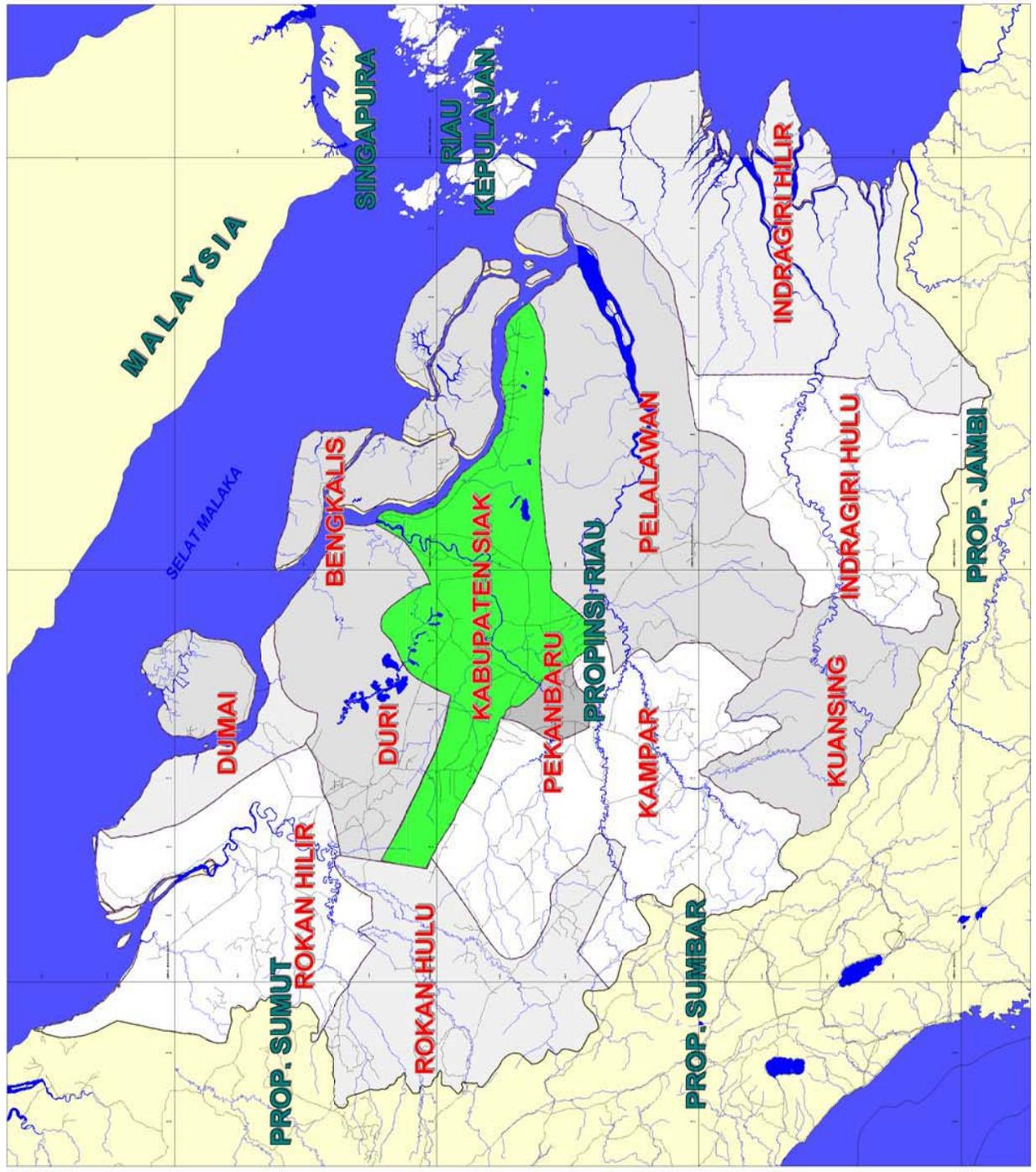
1.3 Metode, Konsep dan Kriteria Penyusunan SLHD

Penyusunan dokumen status lingkungan hidup di daerah perlu dilakukan sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan publik, serta sarana keterlibatan publik dalam ikut berperan menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaporan kondisi lingkungan hidup daerah dibagi atas dua hal, yakni kondisi lingkungan hidup beserta analisis dan kecenderungan serta data tahunan berkala tentang lingkungan hidup, baik primer maupun sekunder. Penyusunan basis data lingkungan hidup didasarkan pada data lingkungan hidup yang benar, faktual, akurat dan ilmiah, sedangkan mutu analisis dalam pelaporan Status Lingkungan Hidup

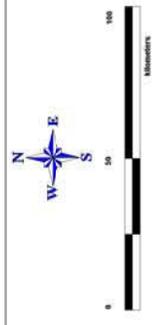


**BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**

100° 30' 0" BT 102° 0' 0" BT 103° 30' 0" BT



**Gambar 1.2
PETA ORIENTASI KABUPATEN SIAK**



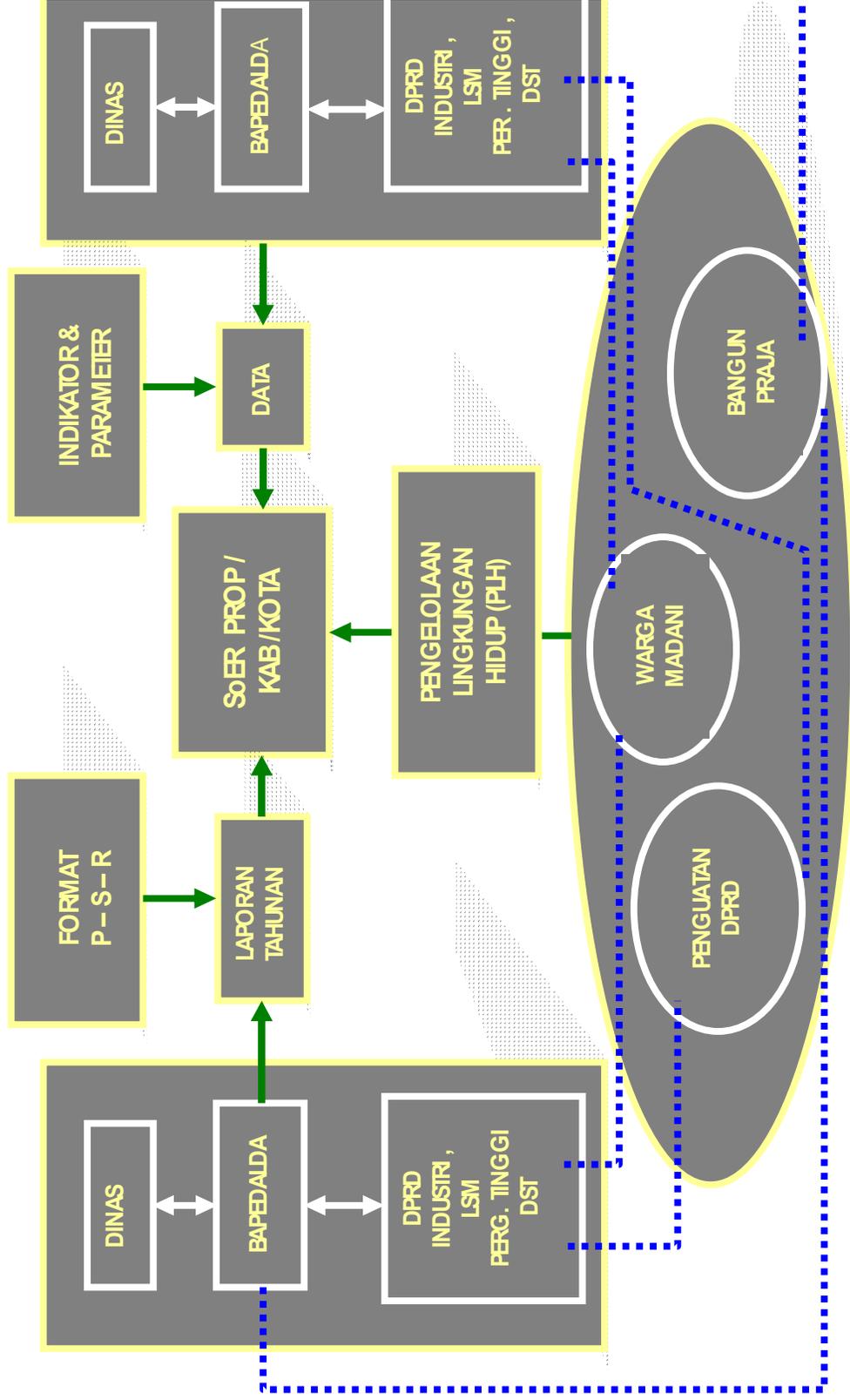
KETERANGAN

- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Perairan
- Kabupaten Siak



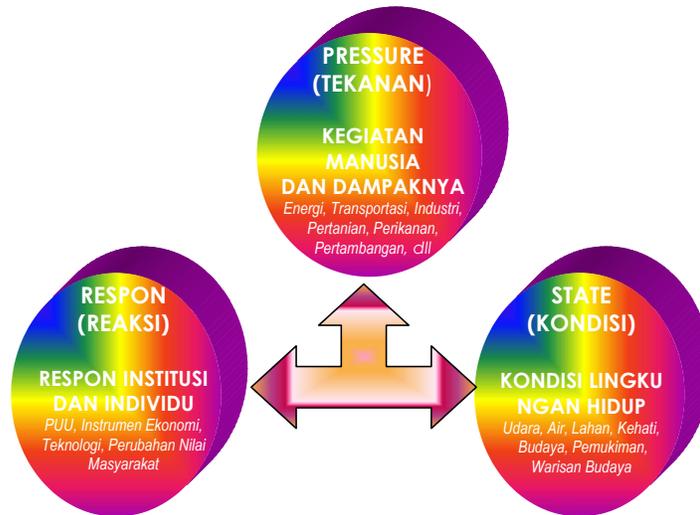
Sumber : Peta Digitasi BAKOSURTANAL
Software : MapInfo Professional 7.8

Sundica Crew



Gambar 1.3 Hubungan SoER dengan GEG

didasarkan pada transformasi data dasar menjadi suatu informasi yang berguna bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta para pengambil keputusan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1.4 Model Pressure, State, Respon (PSR)

Merujuk kepada panduan umum penyusunan laporan SLHD provinsi dan kabupaten/kota (**Men LH, 2005**), maka evaluasi dan analisis kebijakan dilakukan dengan metode pendekatan **Model Pressure-State-Respon (PSR)**. Model ini membagi informasi secara sistematis untuk sosial ekonomi, lingkungan dan sumber alam dibawah empat sudut pandang yakni penekanan pada pelaku perubahan lingkungan, aset sumber, kualitas lingkungan dan reaksi sosial. *Kegiatan manusia memberikan tekanan terhadap lingkungan, hal ini menyebabkan kondisi lingkungan berubah. Masyarakat pada tingkatan yang berbeda akan bereaksi terhadap perubahan tersebut dengan membuat kebijakan yang mengikat bagi kegiatan manusia yang berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kondisi lingkungan.* Secara garis besar Model Pressure-State-Respon (PSR) dalam penganalisaan kebijakan pembangunan daerah tersaji pada **Gambar 1.4**.

1.4 Isu Utama Lingkungan Kabupaten Siak Tahun 2006

Munculnya berbagai isu lingkungan sebagai akibat adanya benturan dan konflik kepentingan antara ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas dengan jumlah

populasi yang menggunakan dan mengeksploitasinya merupakan salah satu kendala dalam implementasi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Benturan dan konflik kepentingan ini akan menimbulkan berbagai beban dan permasalahan pada lingkungan, hal ini juga terjadi di Kabupaten Siak. Ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki daerah, meskipun merupakan hak namun dalam penggunaannya haruslah diikuti oleh adanya rasa tanggung jawab, terutama terhadap keberlanjutan sumberdaya tersebut. Dengan demikian suatu perencanaan pembangunan haruslah mempertimbangkan daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu kawasan.

Mengacu kepada pengamatan dan analisis kondisi aktual Kabupaten Siak oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dituangkan dalam Term of Reference (TOR) penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2006, maka diperoleh beberapa isu utama yang mempengaruhi lingkungan hidup di Kabupaten Siak pada tahun 2006 yang secara ringkas dapat dijelaskan seperti berikut ini.

Kebakaran Lahan dan Hutan

Ketidak tegasan aparat penegak hukum mengakibatkan kesalahan dalam pembukaan hutan dan lahan yaitu dengan cara pembakaran terus kembali terulang, baik yang dilakukan oleh pengusaha atau oleh sebagian masyarakat, telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup Kabupaten Siak. Sebaran asap yang sangat luas merupakan pencemaran / polusi udara yang telah menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Disamping itu kerugian akan hilangnya fungsi ekologis hutan serta keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang dapat memberikan kerugian lebih jauh lagi.

Ilegal Logging

Salah satu penyebab terjadinya degradasi lingkungan dan sekaligus merupakan penyebab bencana adalah kegiatan penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Siak. Akibat aktivitas tersebut telah menimbulkan perubahan kawasan dari kawasan hutan menjadi kawasan semak belukar dan tidak produktif. Kegiatan illegal logging ini merupakan masalah yang serius dengan kompleksitas tinggi. Hampir sebahagian besar dari pelaku usaha dan stake holder di bidang kehutanan terlibat dalam kegiatan ini. Disamping itu para pengusaha kehutanan menggunakan masyarakat tempatan sebagai tameng untuk melakukan kegiatan illegal logging.

Pencemaran Sungai Siak.

Kualitas suatu badan perairan sungai tergantung pada segenap aktivitas yang terjadi pada Daerah Alirannya. Berbagai aktivitas baik domestik dan industri di wilayah DAS yang menghasilkan limbah akan membuang limbahnya ke perairan sungai. Hal ini akan menambahkan tekanan dan beban pencemaran pada badan sungai. Disamping itu kegiatan kehutanan dan pertanian di bahagian hulu juga turut meningkatkan intensitas pencemaran sungai. Beberapa kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi Sungai Siak adalah masuknya limbah domestik, dan limbah industri yang tidak dikelola secara sungguh sungguh.

Abrasi Sungai Siak

Proses terjadinya abrasi Sungai Siak telah berlangsung sejak lama. Kegiatan lalu lintas pelayaran di sepanjang Sungai Siak telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya abrasi di pinggir sungai. Masalah lalu lintas pelayaran di Sungai Siak ini merupakan suatu hal yang dilematis. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan yang cukup vital di bidang perhubungan, namun demikian jika hal ini tidak diantisipasi maka proses abrasi sungai akan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar sungai.

1.5 Tingkat Kesadaran Masyarakat Kabupaten Siak Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2006

Kebersamaan dan komitmen yang kuat serta konsisten merupakan modal dasar untuk tercapainya keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilannya upaya ini bukan hanya ditentukan oleh satu pihak saja, dan bukan pula semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran serta dan partisipasi segenap lapisan masyarakat akan lebih memberikan warna terhadap upaya pengelolaan lingkungan di daerah tersebut. Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh disetiap lapisan masyarakat untuk mengatasi segenap permasalahan lingkungan yang ada. Berlanjutnya proses kerusakan (degradasi) lingkungan adalah akibat lingkungan tidak sanggup lagi mentolerir perubahan fenomena alam yang melebihi daya dukung (*carrying capacity*) yang ada. Pada batas tertentu alam masih dapat mentolerir perubahan lingkungan yang terjadi secara alami, namun ada campur tangan manusia melalui eksploitasi sumberdaya yang berlebihan (*over exploited*) maka lingkungan tidak dapat lagi memulihkan dirinya sendiri (*self purification*), selanjutnya terjadilah degradasi lingkungan.

Degradasi lingkungan terus diperparah akibat didorong oleh masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat "dipaksa" untuk tidak mempunyai pilihan dalam melakukan usaha yang sudah ditekuni bertahun-tahun serta sulitnya menghindari pola hidup yang konsumtif dan destruktif terhadap lingkungan. Sehingga pengrusakan lingkungan dengan pola hidup yang ada sudah merupakan suatu budaya tanpa disadari. Pada kondisi tertentu eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat di level ini masih dalam taraf kewajaran, artinya kecepatan eksploitasi sumberdaya yang ada masih dapat diimbangi dengan kecepatan regenerasi dari sumberdaya alam tersebut, karena masyarakat di level ini melakukan eksploitasi semata mata untuk sekedar kebutuhan hidup. Namun dengan adanya campur tangan teknologi serta pihak ketiga, maka potensi timbulnya over eksploitasi akan lebih besar.

Open Access dan *Common Property* merupakan setali dua kata yang mencirikan sifat sumberdaya alam, dan karena sifat inilah maka telah menjadikan sumberdaya tersebut menjadi sulit untuk dikelola, terlebih lagi ketika *Low Enforcement* tidak ditegakkan sepenuhnya. Ketika sumberdaya tersebut dianggap memberikan manfaat, maka semua pihak mengklaim bahwa sumberdaya tersebut adalah menjadi kepemilikannya, di pihak lain ketika sumberdaya tersebut telah dieksploitasi secara berlebihan dan mengakibatkan kemudaratatan, maka tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap timbulnya kemudaratatan tersebut. Dengan kata lain telah terjadi konflik kepentingan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam, baik yang terjadi secara horizontal, maupun yang terjadi secara vertikal. Kepentingan ekonomi sesaat dan kepentingan ekologi sering dengan sengaja di kontradiktifkan. Padahal kepentingan ekologi itu pada hakikatnya adalah kepentingan ekonomi yang sustainability. Masyarakat terus berupaya mengeksploitasi sumberdaya alam secara tidak terkendali demi mengejar keuntungan ekonomi bagi segelintir orang. Upaya pengelolaan lingkungan masih dianggap sebagai sebuah biaya (*cost*) bagi kebanyakan dunia usaha, dan bukan merupakan sebuah investasi yang nantinya akan mereka terima sebagai sebuah keuntungan (*benefit*).

Proses destruktif yang mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan seperti yang disampaikan di atas dengan mudah ditemui di wilayah Kabupaten Siak dan hal ini sudah pula menjadi rahasia umum bagi publik di didaerah ini. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik pada level bawah maupun pada level yang lebih tinggi. Pada level bawah kerusakan lingkungan terjadi akibat permasalahan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan seperti terjadinya pencemaran perairan, penangkapan ikan dengan bahan

peledak, dan pebuangan limbah domestik ke perairan; sedangkan pada level atas terjadi akibat kerakusan dan ketamakan dari kalangan sebagian dunia usaha seperti illegal logging, pembukaan kawasan perkebunan dengan pembakaran lahan, serta kurangnya kesadaran dalam penanganan masalah limbah industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Beberapa kasus lingkungan yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Siak menunjukkan belum optimalnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang sustainabel.

Dilingkup birokrasi pemerintahan Kabupaten Siak, termasuk legislatif dan yudikatif, kesadaran tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun upaya ke arah kondisi yang diharapkan, seperti yang diamanatkan oleh ketentuan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, melalui kegiatan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (**Gambar 1.5**). Secara umum kualitas sumberdaya manusia pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor Badan Pengendalian



Gambar 1.5 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Lingkungan Hidup Siak

Dampak Lingkungan sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, walaupun belum seperti yang diharapkan (**Tabel 1-4**). Kegiatan pengembangan dan pelatihan sumberdaya manusia setiap tahunnya terus diupayakan melalui dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten. Namun demikian di lapangan belum ada terlihat terobosan baru yang signifikan sebagai upaya yang dapat diartikan sebagai implementasi dari sebuah komitmen yang kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai contoh action plan terhadap upaya penanganan masalah pencemaran dan abrasi Sungai Siak masih belum terealisasi dan hingga saat masih merupakan sebuah wacana dalam seminar dan rapat saja. Penanganan yang ada baru bersifat parsial belum ada yang komprehensif.

Tabel 1.1 Data Kualifikasi Personal SDM BAPEDALDA Kabupaten Siak

No.	Nama	Pendidikan Formal	Kursus / Pelatihan Lingkungan Hidup	Keterangan
1.	Drs. H Hasnul Irba'i	IIP		KA BAPEDALDA
2.	Amaruddin, SKM	Kesehatan Masyarakat	- AMDAL A	KABID TAULUH
3.	Ir. H. Eddy Irwan, SH, MT	Sipil, Hukum	- AMDAL A	KABID WASDAL
4.	Ir. Hj Wan Rahimah	Sipil	- AMDAL A, B - Kualitas Air	KABID AMDAL
5.	Ir. Zulmaryeti	Pertanian	- AMDAL A	SEKRETARIS
6.	Amri Razali	Sosial		KA SUBAG UMUM
7.	H. Wan Ibrahim, ST	Sipil	- GIS	KA SUBID PEMANTAUAN
8.	Aryanto Nafarin, SH	Hukum		KA SUBAG HUKUM
9.	Alhaq Zulkarnaen, ST	Teknik Lingkungan	- AMDAL A - AMDAL B - Pengelolaan B3 - PPLH - PPNS	STAFF BAPEDALDA
10.	Ardayani, S.Si	Kimia	- Teknik Sampling	STAFF BAPEDALDA
11.	Jefriyanto, ST	Teknik Industri		STAFF BAPEDALDA
12.	Anhar	SMA	-	STAFF BAPEDALDA
13.	Ria Asfiza	SMA	-	STAFF BAPEDALDA
14.	Verry Suryani	SMA	-	STAFF BAPEDALDA
15.	Anton Afriansyah	SMA	-	STAFF BAPEDALDA
16.	Kodriyah	SMK		HONORER
17.	Endang Haryati	Lingkungan Industri D-3		HONORER
18.	Noni Deswati	SMA	-	HONORER
19.	Mahadar	SMK		HONORER
20.	Eliyani	SMA		HONORER
21.	Istiana	SMA		HONORER
22.	Nadhrach	Perikanan		HONORER
23.	Nunung Sartika Sari	Kiima		HONORER

Sumber : Bapedalda Siak. 2006

Belum terintegrasinya berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam berbagai perencanaan pada sektor pembangunan seperti tahun – tahun sebelumnya, merupakan salah satu indikator lemahnya komitmen pengelolaan lingkungan. Berbagai bentuk kegiatan pembangunan dalam implementasinya belum sepenuhnya di ikuti dengan berbagai instrument pengelolaan lingkungan yang ada. Disamping itu

pelaksanaan penegakan hukum (low enforcement) oleh pihak yudikatif terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang lingkungan hidup masih sangat jauh dari yang diharapkan. Meskipun diketahui terjadi kasus pelanggaran lingkungan seperti pencemaran perairan di Sungai Siak ataupun maraknya kasus kebakaran hutan di Kabupaten Siak, namun belum ada terdengar pelaku kejahatan lingkungan tersebut yang dibawa ke pengadilan.

Pada tatanan eksekutif dan legislatif, komitmen pengelolaan lingkungan hidup sudah mulai menunjukkan kinerja yang positif. Berbagai regulasi yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan telahpun dibuat untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Siak (**Tabel 1.2**). Peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak juga terhadap pengelolaan lingkungan hidup salah satunya tercermin dengan adanya dukungan anggaran melalui APBD Kabupaten Siak dalam pelaksanaan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ataupun Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) terhadap proyek pemerintah (**Tabel 1.3**) sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan. Meskipun belum semua proyek yang melaksanakan kewajiban AMDAL sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 tahun 2001, namun hal ini sudah lebih baik dibanding daerah lain yang masih ada sama sekali tidak mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan studi AMDAL terhadap proyek pemerintah.

Tabel 1.2 Data Perda dan SK Bupati Bidang Lingkungan di Kabupaten Siak

No.	Nomor Perda / SK Bupati	Tentang
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 1 Tahun 2002	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 7 Tahun 2002	Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Siak
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Siak : Nomor : 5 Tahun 2005	Restribusi Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Sumber : Bapedalda Siak, 2006

Disisi lain komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dipandang masih banyak yang perlu ditingkatkan. Dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan dan pemantapan kinerja satuan kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Siak dirasa masih sangat terbatas. Pada tahun anggaran 2005, alokasi anggaran APBD Kabupaten Siak untuk satuan kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah sebesar Rp. 2.723.104.000 (**Tabel 1.4**), dan jumlah ini tidak lebih 0,2 % dari total APBD Siak

sebesar sekitar Rp. 1.700.000.000.000. Keterbatasan anggaran ini tentunya akan mempengaruhi kinerja satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan lingkungan di Kabupaten Siak. Hal ini jugalah yang menjadikan salah satu indikator bahwa masih diperlukan banyak pembenahan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak terhadap pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup dalam arti luas.

Tabel 1.3 Kegiatan Pada BAPEDALDA Siak Tahun Anggaran 2006

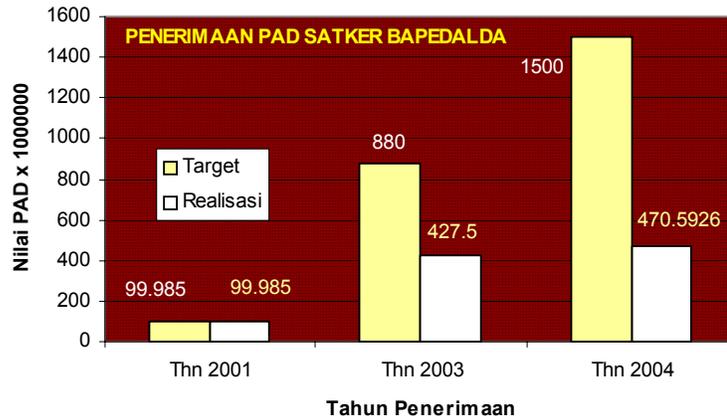
No.	Jenis Proyek / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Perda Limbah Cair	335.535.000
2.	Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	671.142.500
3.	Lomba Karya Tulis, Foto Lingkungan Hidup Se Kabupaten Siak	174.175.000
4.	Pameran Lingkungan Hidup	493.847.500
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	334.924.000
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Bapedalda	713.480.000
	Jumlah	2.723.104.000

Tabel 1.4 Proyek Pemerintah Yang Melaksanakan Studi AMDAL/UKL UPL

No.	Jenis Proyek / Kegiatan
1.	Pembangunan Terminal Siak
2.	Pembangunan Terminal Perawang
3.	Pembangunan Perkantoran Siak
4.	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
5.	Pembangunan Perkebunan Nenas Rakyat

Sumber : Bapedalda Siak, 2006

Dari segi penerimaan, kinerja BAPEDALDA Siak masih perlu pembenahan yang sungguh – sungguh. Target penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada BAPEDALDA Siak, tidak bisa terpenuhi secara optimal, bahkan PAD yang ditargetkan, sangat jauh dari realisasi penerimaan. Target penerimaan yang terpenuhi tercatat hanya pada tahun 2001, sedangkan pada tahun 2003 dan 2004 realisasi penerimaan jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2003 dari target penerimaan sebesar Rp. 880.000.000, realisasinya hanya Rp. 427.500.000 atau hanya sebesar 48,58 % dan pada tahun 2004 target penerimaan sebesar Rp. 1.500.000.000 realisasinya hanya sebesar Rp. 470.592.600 atau sebesar 31,37 % (**Gambar 1.6**).



Gambar 1.6 Penerimaan PAD oleh BAPEDALDA Siak

Dibandingkan dengan kalangan birokrasi pemerintahan, maka sebahagian kalangan pelaku dunia usaha skala besar di Siak sudah lebih dulu maju selangkah dari segi penganggaran pengelolaan lingkungan, meskipun masih ada sebagian lagi yang belum peduli. Pada umumnya perusahaan berskala besar di Kabupaten Siak sudah sejak lama melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ataupun Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) (**Tabel 1.5**). Meskipun aplikasi dan implementasi dari pelaksanaan pasca studi tersebut masih banyak menjadi pertanyaan. Disamping itu beberapa perusahaan perkebunan sudah ada yang menerapkan metode Land Application (LA) sebagai upaya mengantisipasi terjadinya degradasi lingkungan dalam melakukan pengelolaan limbah yang dilengkapi dengan sumur – sumur pantau (**Gambar 1.7**). Disamping ada juga yang melakukan pengolahan limbah pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (**Gambar 1.8**)



Gambar 1.7 Limbah Cair PKS dan Land Aplication



Gambar 1.8 Limbah Cair PKS dan IPAL

Namun demikian masih cukup disayangkan bahwa sebagian perusahaan – perusahaan masih menggunakan konsep ekonomi semata dengan mengeruk keuntungan sebesar besarnya tanpa memperhatikan azas keberlanjutan. Kebijakan pelaksanaan studi lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi implementasi dari Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungannya. Kesadaran terhadap perlunya menjaga kelestarian fungsi lingkungan masih harus terus perlu pembinaan. Sebahagian besar dunia usaha masih menganggap konsep penerapan program pengelolaan lingkungan hidup sebagai biaya (*cost*) dan belum dimasukkan dalam anggaran investasi nantinya akan mendatangkan keuntungan, sehingga penerapan program tersebut masih dilakukan setengah hati. Demikian juga dengan pengoperasian instalasi pengolahan limbah. Meskipun beberapa perusahaan besar sudah memiliki unit instalasi pengolahan limbah, namun pengopersiannya belum dilakukan semaksimal mungkin. Adakalanya perusahaan tersebut mengoperasikan instalasi pengolahan limbah pada saat tertentu saja, terutama jika ada inspeksi yang dilakukan oleh kalangan pemerintahan.

Tabel 1.5 Data Kegiatan Swasta Yang Memiliki AMDAL/UKL UPL di Siak

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kecamatan
1.	PT. Arara Abadi - ANDAL HPHTI - UKL-UPL HPHTI Unit I,II,III - UKL-UPL Aplikasi Fly Ash dan Kompos Sludge pada lahan HTI - UKL/PKL Penambangan Gambut KW 97PP0376 - UKL-PKL Pembuatan Kanal HTI distrik Minas - UKL-PKL Pembuatan Kanal HTI distrik Siak	- Siak Siak Minas - Siak Minas
2.	PT. BSP	

	- ANDAL Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi - RKL-RPL Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	Dayun
3.	PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA - ANDAL kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi - RKL-RPL Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	Minas, Libo
4.	PT. Ekawan Lestari - UKL/UPL HPHTI	Benteng Hilir Kec. Siak
5.	PT. Indah Kiat PULP & PAPER - ANDAL Kegiatan Pabrik Pulp, Kertas, PLTU dan Dermaga - RKL-RPL Kegiatan Pabrik Pulp, Kertas, PLTU dan Dermaga - UKL-UPL Dermaga khusus IKPP	Perawang
6.	PT. IVOMAS TUNGGAL - Kerangka Acuan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengelolannya - Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) - RKL-RPL Perkebunan Kelapa Sawit - LA. Perkebunan Kelapa Sawit	Kandis, Libo, Sam-Sam
7.	PT. Perawang Perkasa Industri - Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) Industri Formaldehyde & Resin - RKL-RPL Industri formaldehyde & Adhesive	Perawang
8.	PT. Kampari Wood - UKL- UPL	
9.	PT. Siak Raya Timber - UKL-UPL plywood	Sei Mempura
10.	PT. KONDUR PETROLEUM. SA	Desa Kurau
11.	PT. PANCA EKA BINA PLYWOOD - PEL Pabrik Plywood - RKL-RPL Pabrik Plywood	Desa Merempan
12.	PT. Surya Dumai	
13.	PT. PTPN V - AMDAL Perkebunan kelapa sawit PTPN V - RKL-RPL perkebunan Kelapa sawit Sei. Buatan - Studi UKL & UPL Dermaga Khusus PTPN V - RKL-RPL perkebunan Kelapa Sawit LDA	
14.	PT. Riau Komplek (RAPP) - KA Studi Andal kegiatan Pembuatan kanal dan Dermaga (tahun 2003) - KA Studi ANDAL kegiatan pembangunan Dermaga RO-RO Olak (tahun 2003) - KA Studi ANDAL kegiatan pembangunan kanal sektor Mandau - ANDAL Kegiatan pembangunan Dermaga RO-RO Olak (tahun 2003) - RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Dermaga RO-Ro buatan dan Dermaga Ro-Ro Olak - KA ANDAL Pembangunan pelabuhan khusus PT. RAPP dan jalan koridor serta infrastruktur penunjang lainnya di kab. Siak	Desa Rantau Panjang
15.	PT. MUL	
16.	PT. Kimia Tirta Utama - UKL-UPL Perkebunan dan Pabrik pengolahan kelapa sawit (November 1996)	

17.	PT. Aneka Inti Persada - ANDAL perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit - RKL-RPL perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit	
18.	PT. Rabana Aspalindo - UKL-UPL pembangunan terminal aspal curah di pelabuhan perawang	Perawang
19.	PT. Merdan Sejati Surya Plantation - KA AMDAL perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit - RKL-RPL perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit	Kerinci Kanan Lubuk Dalam
20.	PT. The Univenus - UKL- UPL Pabrik Kertas tisu	
21.	PT. Rokan Permai Timber - Studi kelayakan HPHTI - KA ANDAL HPHTI - RKL-RPL HPHTI	Desa Sam-Sam
22.	PT. Pertiwi Prima - Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) Pabrik plywood - UKL-UPL pabrik plywood	Perawang
23.	PT. Perawang Lumber Industri - ANDAL industri pengolahan kayu - RKL-RPL industri pengolahan kayu	Perawang
24.	PT. Bina Daya Bintara - KA ANDAL HPHTI - RKL-RPL HPTI	
25.	PT. Bina Fitri Jaya (Kelapa Sawit)	Kec. Kandis
26.	PT. Asia Wood	Perawang
27.	PT. Perawang Indah Perkasa - Penyajian Informasi Lingkungan Kegiatan Pabrik formaldehyde & Adhesive	Perawang
28.	PT. National Timber & Forest Product - KA. ANDAL Usaha Hutan Tanaman - RKL-RPL Usaha Hutan Tanaman	
29.	PT. Fetty Mina Jaya - UKL-UPL Rencana pembangunan kelapa Sawit	Minas
30.	PT. Balai Kayang Mandiri - ANDAL kawasan HTI - RKL-RPL kawasan HTI	Desa Sei Raya Kec. Sei Apit
31.	PT. Kawasan Industri Buton - ANDAL - RKL-RPL - KA. ANDAL Pembangunan Industri Buton Tj Buton	Sei. Apit
32.	PT. Cahaya Siak Bina Riau	
33.	PT. Siak Prima Sakti	

Sumber : Bapedalda Siak, 2005

Partisipasi nyata kelompok pemuda dan masyarakat dalam memberikan kontribusinya terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih belum seperti yang diharapkan. Kondisi

ini tercermin dari ketidak pedulian kelompok pemuda terhadap terus berlanjutnya degradasi lingkungan, seperti masih berlanjutnya kasus kebakaran hutan dan kegiatan illegal logging serta pencemaran Sungai Siak. Kelompok – kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang lingkungan di Kabupaten Siak secara kuantitatif sudah cukup banyak. Dari data yang ada sampai tahun 2006 terdapat 17 lembaga swadaya masyarakat (**Tabel 1-6**) di Kabupaten Siak, 7 diantaranya bergerak di bidang lingkungan hidup. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Siak dalam pembangunan lingkungan hidup masih belum optimal. Aktivitas yang ada masih bersifat setengah setengah, meskipun ada beberapa LSM yang di libatkan dalam melakukan koreksi kebijakan lingkungan melalui pelaksanaan penilaian Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kemampuan dan kualitas sumberdaya manusianya dalam memahami permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya. Kekurang pahaman ini mengakibatkan tidak terdeteksinya hal – hal yang menjadi permasalahan lingkungan, disamping itu pemerintah kabupatenpun masih belum menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan LSM melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusianya, baik melalui kursus ataupun pelatihan – pelatihan baik ditingkat daerah maupun nasional.

Tabel 1.6 LSM Land Scape

Tabel 1.6 Data LSM Lingkungan Di Kabupaten Siak

No.	NAMA ORGANISASI	PENGURUS	SURAT KEPUTUSAN DAN TGL PENDIRIAN	ALAMAT
1	FORUM PENYULUHAN HUKUM DAN TRASPARANSI MASYARAKAT	Ketua : - Sekretaris : -	Nomor : Akte Notaris - Tanggal : -	-
2	MELAYU SIAK BERSATU	Ketua : Wan Abdurrahman Sekretaris : T. Abd Wahid. SH	Nomor : Akte Notaris 13 Tanggal : 16 Juni 2001	Jl. Sultan Ismail Siak Sri Indrapura SIAK
3	PEDULI LINGKUNGAN	Ketua : T. Syarif Sekretaris : Drs. M. Nizar	Nomor : 02/SKL/LSM/III2001 Tanggal : 29 Maret 2001	Desa Lalang SUNGAI APIT
4	PERMATA NEGERI	Ketua : Mustafa Kamal Sekretaris : Winda Harmiati. Spd	Nomor : 02/LSM- PN/III2001 Tanggal : 06 Maret 2001	Jl. Pangeran No 11 Siak Sri Indrapura SIAK
5	SEMANGAT PEDULI LINGKUNGAN	Ketua : Bastian Sekretaris : Sugiantoro	Nomor : Akte Notaris No.002 Tanggal : 09 juni 2001	Jl. Sultan Ismail No. 05 SIAK
6	SIAK CORUPTION WACH	Ketua : Saparuddin Sekretaris : Mulyadi	Nomor : Akte Notaris no.463 Tanggal : 21 Desember 2000	Jl. Kota Tinggi Siak Sri Indrapura SIAK
7	TERPADU	Ketua : Abdul Haris Sekretaris : Khairul	Nomor : Akte Notaris 09 Tanggal : 30 April 2001	Jln Kenari No. 08 Kec. Sungai Apit SUNGAI APIT
8	MASYARAKAT PEDULI LINGKKUNGAN WISATA	Ketua : OK. Nizam Jamil Sekretaris : H. Zulkifli. ZA	Nomor : Akte Notaris - Tanggal : 21 Februari 2000	Jln Sltm Syarif Hasyim Siak Sir Indrapura SIAK
9	SEMANGAT KEPEDULIAN LINGKUNGAN WILAYAH	Ketua : Bastian Sekretaris : Ir. Maynawati	Nomor : Akte Notaris - Tanggal : -	Jl. Raya Perawang KM. 5 Kec. Tualang PERAWANG
10	SIAK SEPAKAT	Ketua : M. Syfwan Sekretaris : T. Hendrawan	Nomor : Akte Notaris No. 75 Tanggal : 30 Maret 2004	Jl. Bahagia No. 43 Kampung Dalam SIAK
11	PEDULI MASYARAKAT BURUH TANI DAN NELAYAN	Ketua : Ginogom Simanjuntak Sekretaris : -	Nomor : Akte Notaris Tanggal :	Jl. Sisingamangaraja RT02/11 Minas Jaya

					MINAS
12	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Ketua : Bukhari Sekretaris : Kharul Munawar	Nomor : Akte Notaris No. 25 Tanggal : 13 Oktober 2005	Jl. Raya Perawang KM. 5 Kec. Tualing PERAWANG	
13	WAHANA STRATEGI PEMBERDAYAAN ASET NEGARA (WAHANA)	Ketua : Ir. Firdaus Sekretaris : Syafri. SE	Nomor : 001/KPTS/XII/2005 Tanggal : Desember 2005	Kecamatan Sungai Apit SUNGAI APIT	
14	LEMBAGA SWADAYA PENGAWASAN DAERAH KAB. SIAK	Ketua : Helmi Junaidi Sekretaris : Drs. Abdul Latif	Nomor : Akte Notaris 86 Tanggal : 24 Desember 2005	Jl. Hangtuah KM. 3 Kec. Tualing PERAWANG	
15	LEMBAGA KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPKM) KAB. SIAK	Ketua : Drs. Endang Sukarelawan Sekretaris : Ir. Faisal	Nomor : Akte Notaris Tanggal : 9 Agustus 2006	Jl. Sultan Syarif Hasyim Siak SIAK	
16	NUSA BANGSA	Ketua : Budi Hartono Sekretaris : Ratna Suri Afriani	Nomor : Akte Notaris 27 Tanggal : 9 November 2005	Jl. Yos Sudarso No. 53 Minas Jaya MINAS	
17	LEMBAGA PEMANTAUAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIAK	Ketua : Azman Sekretaris : Zamri El Umari	Nomor : Akte Notaris No. 19 Tanggal : 7 Februari 2006	Kampung Rempak Siak Sri Indra Pura SIAK	

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Siak, 2006

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah tingkat dua dalam wilayah administrasi Propinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada posisi 1° 16' 30" LU - 0° 20' 49" LU dan 100° 54' 21" BT - 102° 10' 59" BT. Secara administratif wilayah Kabupaten Siak pada akhir tahun 2002 telah dimekarkan menjadi 8 Kecamatan, kemudian dikembangkan menjadi 11 kecamatan, dan terakhir menjadi 13 kecamatan (**Gambar 2.1**). Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 53 Tahun 1999, yang merupakan landasan hukum pembentukan Kabupaten Siak, maka luas wilayah Kabupaten Siak adalah sebesar 8.556,09 km², dengan batas – batas antara lain :

- ✚ Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- ✚ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis

Sebagian wilayah Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah di Bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat, beriklim tropis dengan suhu berkisar 25° C – 32° C. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol gley humus dalam bentuk rawa – rawa atau tanah basah. Salah satu sumberdaya alam yang memiliki potensi besar adalah dibidang kehutanan dengan kuasan 483.404.248 Ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 7.753,475 ha, hutan suaka alam seluas 69.844,247 Ha. Hutan produksi seluas 183.551,898. Hutan produksi terbatas seluas 215.393,25 ha, dan hutan lainnya seluas 6.820,25 ha.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup. Keberhasilan pembangunan di masa depan ditentukan oleh berbagai kebijakan yang diambil saat ini. Konsep dan implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan suatu keputusan bijak yang harus diterapkan agar tidak terjadi salah kelola

terhadap pembangunan daerah secara global. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, maka akibat dari salah kelola telah dapat diantisipasi secara dini.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Siak

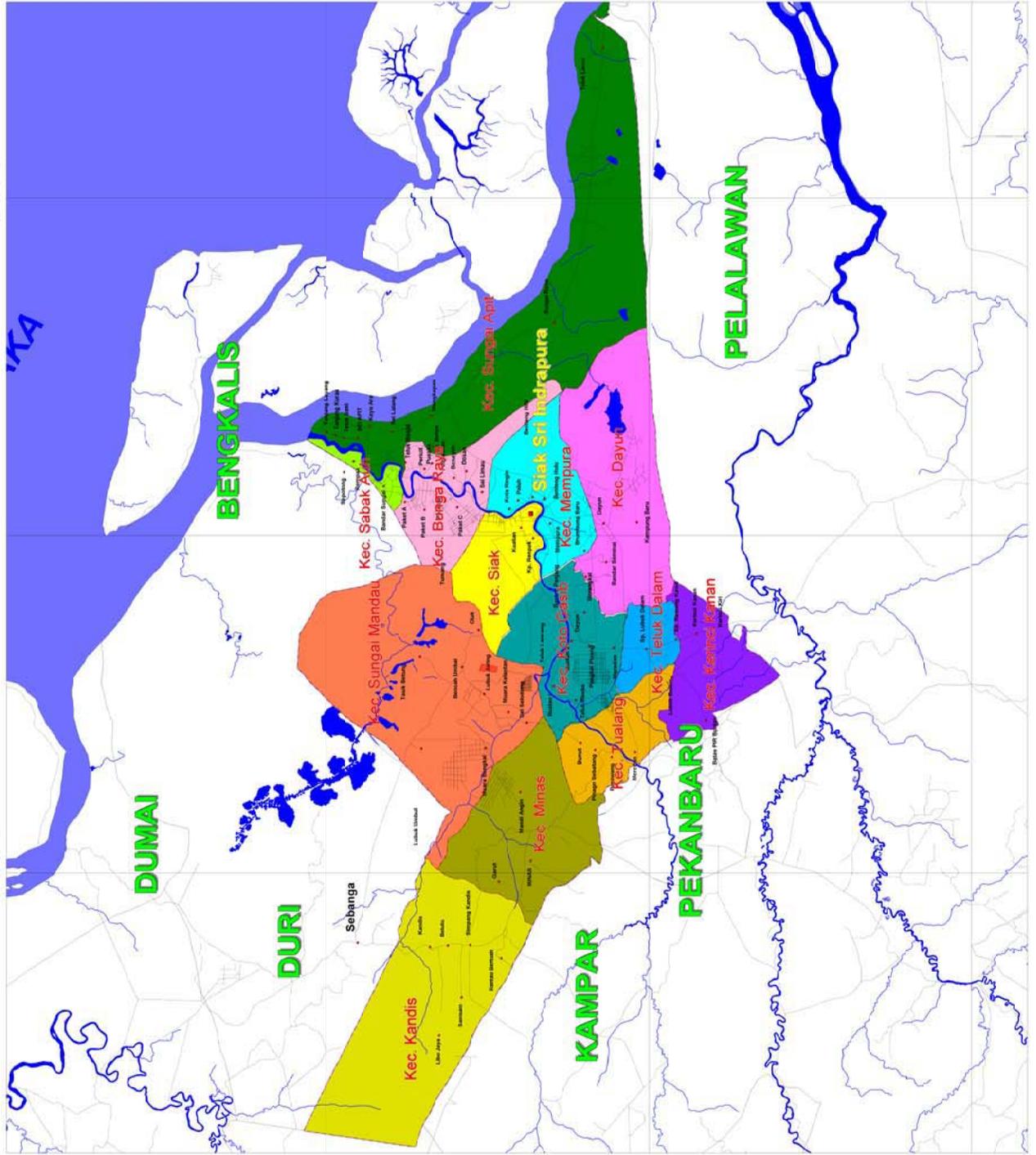


**BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**

101° 23' 60" BT

102° 0' 0" BT

102° 36' 0" BT

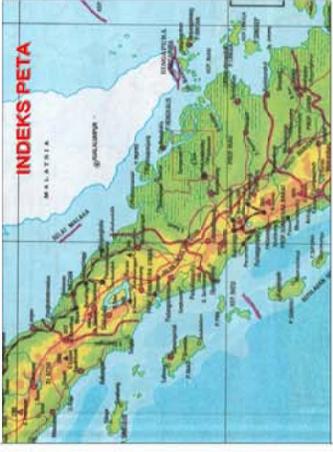


Gambar 2.1
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SIAK



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Kec. Tuailang
	Batas Kecamatan		Kec. Koto Gastib
	Jalan		Kec. Siak
	Sungai		Kec. Bunga Raya
	Ibukota Kabupaten		Kec. Sabak Auh
	Desa/Kelurahan		Kec. Sungai Apit
	Perairan		Kec. Mempura
	Kec. Kandang		Kec. Dayum
	Kec. Minas		Kec. Teluk Dalam
	Kec. S. Mandau		Kec. Kerinci Kaman



Sumber : Peta Digitasi BAKOSURTANAL
Software : MapInfo Professional 7.8



2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah Siak

Berbagai kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Siak merupakan implementasi bentuk-bentuk program dan strategi seperti yang tercantum dalam Pola Dasar (POLDAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Kebijakan Pengelolaan Tata Ruang dimaksudkan guna mendukung misi serta mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Siak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 07 Tahun 2002.

Dalam suatu institusi pemerintahan moderen, perumusan visi pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, peradaban masyarakat dan arus glonalisasi, yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Visi merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka panjang Dalam konteks otonomi daerah, beban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah semakin berat, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengemban amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumberdaya yang ada di daerah secara efisien dan efektif serta semakin dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Sebagai bagian dari wilayah Propinsi Riau, maka berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak juga seyogyanya haruslah tetap bersinkronisasi dengan kebijakan propinsi. Melalui Pola Dasar (POLDAS) Pemerintah Daerah Propinsi Riau Tahun 2001–2005 telah ditetapkan visi yakni : *Terwujudnya Propinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat Agamis, Sejahtera Lahir Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020*. Visi Pemerintah Provinsi Riau ini didukung pula oleh visi Pemerintah Kabupaten Siak yang merupakan pandangan kedepan yang menggambarkan arah dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Siak, guna menyatukan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dan sumberdaya yang ada dalam pembangunan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Siak 2002 – 2006 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2002 yakni : *“Terwujudnya Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau yang Didukung Oleh Agribisnis, Agro Industri dan Pariwisata*

Yang Maju dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Sejahtera Tahun 2020⁴

Makna yang terkandung di dalam visi pembangunan daerah tersebut antara lain :

- Potensi sumberdaya alam yang sangat menonjol dapat dimanfaatkan sebagai tumpuan dasar gerak pembangunan dengan *mempertimbangkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui*.
- Potensi pertanian dan perkebunan dalam arti luas dibinakan sebagai acuan utama pengembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Siak yang berfokus pada kegiatan agribisnis dan agro industri.
- Gerak pembangunan yang berfokus pada kegiatan agribisnis dan agro industri ini, diharapkan mendorong Kabupaten Siak pada tahun 2020 menjadi pusat kegiatan tersebut di wilayah Propinsi Riau.
- Bertumpu pada faktor sejarah Kabupaten Siak, pembangunan Kabupaten Siak mendorong kegiatan tujuan pariwisata budaya dan menjadikan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu.

Dalam rangka mendukung visi yang akan dicapai, maka telah pula ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun 2002 – 2006 yakni :

- ✚ Mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan nilai – nilai budaya melayu.
- ✚ Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintahan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governace)
- ✚ Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agro industri.
- ✚ Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan *pembangunan daerah yang berkelanjutan*.

Makna yang terkandung dalam masing – masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

- ✚ Mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan nilai – nilai budaya melayu. Misi ini mempunyai makna bahwa Kabupaten Siak bermaksud akan mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas yakni :

- ✳ Memiliki tingkat pendidikan yang memadai, dapat menguasai serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan perluasan pendidikan dan budaya yang relevan dengan pembangunan daerah.
 - ✳ Taat melaksanakan dan mengamalkan agama serta menjadikannya sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berperilaku sesuai kaidah dan nilai nilai budaya melayu.
 - ✳ Memiliki derajat kesehatan, memiliki ketrempilan kerja dan tingkat kesejahteraan sosial yang memadai, sehingga dapat berperan dalam membangun daerah terutama mendukung pembangunan sektor industri berbasis komoditi kehutanan dan komoditi perkebunan.
 - ✳ Sumberdaya manusia aparatur negara berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna dan produktif
 - ✳ Sumberdaya manusia masyarakat produktif, kreatif, inovatif, berketrempilan.
- ✚ Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintahan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governace). Misi tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten Siak berkeinginan untuk mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, sebagai upaya perbaikan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta menyikapi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan tuntutan persaingan dalam era globalisasi. Hal ini akan terealisasi dengan mengaktualisasikan kondisi seperti berikut ini.
- ✳ Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat adil dan transparan, yang didasarkan pada prinsip kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
 - ✳ Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
 - ✳ Membangun sikap dan perilaku penyelenggara pemerintah yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- ✚ Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agro industri, dengan maksud :
- ✳ Adanya landasan ekonomi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi kerakyatan, meningkat dan meratanya pendapatan

masyarakat dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri berbasis komoditi pertanian dan kehutanan.

- ✘ Meningkatkan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan terencana serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, guna mendukung percepatan pengembangan perekonomian berbasis pada pengembangan agribisnis dan agroindustri.
 - ✘ Tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, menengah dan koperasi yang didukung pengusaha besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
 - ✘ Meningkatkan pendayagunaan potensi sumberdaya daerah secara bijaksana dan terencana guna mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agro industri, terutama komoditi pertanian dan kehutanan.
- ✚ Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan *pembangunan daerah yang berkelanjutan*, misi ini bermaksud :
- ✘ Meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah guna mendukung percepatan upaya pengembangan sektor industri maupun sektor ekonomi lainnya.
 - ✘ Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan perumahan/pemukiman, pengembangan wilayah tertinggal, serta penataan ruang dan pengelolaan pertanahan *berdasarkan konsep keseimbangan spasial dan berwawasan lingkungan* untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah.

2.1.1 Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah. Oleh karena itu sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Siak dan visi serta misi pembangunan daerah, maka tujuan pembangunan daerah dalam jangka panjang adalah untuk memacu laju pertumbuhan dan mencapai kesejahteraan sosial sebagai tuntutan aspirasi masyarakat yang didukung oleh sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 bersandarkan pada 5 pilar pemacu pembangunan yaitu :

- ✚ Peningkatan iman dan taqwa

- ☀ Peningkatan kesenian dan budaya
- ☀ Peningkatan sumberdaya manusia
- ☀ Peningkatan kesehatan dan olah raga
- ☀ Pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan

Disamping itu juga telah ditetapkan sektor prioritas, sektor potensial dan sektor strategis yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Siak. Sektor prioritas terdiri dari ; sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa. Sektor potensial adalah sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor pertambangan. Sektor strategis adalah sektor transportasi.

Pembangunan dari berbagai sektor tersebut haruslah didukung atmosfer yang kondusif di berbagai bidang dengan arah kebijakan antara lain :

● **Bidang Pemerintahan**

- ✘ Peningkatan kapasitas kemampuan daya guna dan makna otonomi daerah
- ✘ Peningkatan Kinerja aspek hukum dan perundang – undangan
- ✘ Peningkatan kinerja aparatur pemerintah
- ✘ Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dan sektor swasta
- ✘ Pengembangan komunikasi, informasi media massa
- ✘ Pembangunan perlindungan dan pengamanan masyarakat

● **Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Budaya**

- ✘ Pembangunan sektor kependudukan dan sumberdaya manusia
- ✘ Pembangunan dan pengembangan pendidikan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan kebudayaan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan agama
- ✘ Pembangunan dan pengembangan kesehatan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan keluarga berencana
- ✘ Pembangunan dan pengembangan ketenagakerjaan
- ✘ Pengawasan mobilitas penduduk
- ✘ Pembangunan dan pengembangan kepemudaan dan olah raga
- ✘ Pembangunan dan pengembanagn ilmu pengetahuan dan teknologi
- ✘ Pembangunan dan pengembangan kesejahteraan sosial
- ✘ Pembangunan dan pengembangan ketahanan budaya

● **Bidang Ketahanan Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Kehidupan**

- ✘ Percepatan pemulihan ekonomi
- ✘ Penguatan landasan ekonomi berkelanjutan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- ✘ Pembangunan dan pengembangan sumberdaya air dan irigasi
- ✘ Pembangunan dan pengembangan pertambangan dan energi
- ✘ Pembangunan dan pengembangan prasarana pembangunan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan transportasi
- ✘ Pembangunan dan pengembangan pertanahan dan penataan ruang
- ✘ Pembangunan dan pengembangan pertanian tanaman pangan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan kehutanan dan perkebunan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan perikanan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan peternakan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan industri
- ✘ Pembangunan dan pengembangan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah
- ✘ Pembangunan dan pengembangan pariwisata
- ✘ Pembangunan dan pengembangan transmigrasi
- ✘ Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan ketenaga kerjaan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan dunia swasta

● **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- ✘ Pembangunan dan pengembangan masyarakat sipil
- ✘ Pembangunan dan pengembangan partisipasi keterlibatan daerah
- ✘ Pembangunan dan pengembangan partisipasi keterlibatan kecamatan
- ✘ Pembangunan dan pengembangan partisipasi keterlibatan pedesaan

2.2 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya pasal 12 dan 13 undang – undang tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian

urusannya kepada daerah. Prinsip tersebut memberikan landasan hukum yang mapan terhadap penerapan otonomi daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta selaras dengan jiwa Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004.

Sebagai penjelasan lanjutan dari amanat undang – undang tersebut, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dibidang lingkungan hidup bukan lagi menjadi pelaksana, akan tetapi lebih bersifat pembinaan dan penyusunan kebijaksanaan makro dan penetapan berbagai norma, standar, kriteria dan prosedur yang meliputi 5 (lima) aspek yakni :

- ◆ Penetapan pedoman pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- ◆ Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya laut diluar 12 (dua belas) mil.
- ◆ Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan keamanan, di lokasi kegiatan lebih dari satu propinsi, di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut lebih 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas negara.
- ◆ Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan penetapan pedoman pencemaran lingkungan.
- ◆ Penetapan pedoman tentang konservasi sumberdaya alam.

Aturan tersebut juga menjelaskan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom pada bidang lingkungan hidup yang meliputi :

- ◆ Pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten / kota.
- ◆ Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut dalam kawasan antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.
- ◆ Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas Kabupaten / Kota.
- ◆ Penilaian AMDAL bagi kegiatan – kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berlokasi meliputi lebih dari satu kabupaten / kota.
- ◆ Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten / kota.
- ◆ Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup Daerah.

Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan implementasi konsep otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang proposional, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dalam Pengaturan Pengelolaan Lingkungan. Kewenangan daerah sebagaimana yang

dikemukakan di atas dilaksanakan secara luas dan utuh meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dalam implementasi pelaksanaannya harus dilaksanakan secara sinergi antar lembaga pemerintah (pusat/propinsi/kabupaten /kota), demikian juga dengan dunia usaha (swasta), industri, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial dan segenap lapisan masyarakat luas.

Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai negeri agamis, berbudaya, berdaya dan sejahtera di Kabupaten Siak yang telah dicanangkan, pada hakikatnya mengandung prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Amanat tersebut tercermin dalam salah satu rumusan misi pembangunan daerah yakni : “ **Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan** “. Salah satu makna yang terkandung dalam misi ini adalah : *Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan perumahan/pemukiman, pengembangan wilayah tertinggal, serta penataan ruang dan pengelolaan pertanahan berdasarkan konsep keseimbangan spasial dan berwawasan lingkungan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah.*

Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Siak, maka strategi kebijaksanaan yang ditempuh untuk pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah “ *Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang diarahkan melalui pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta senantiasa memperhitungkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.*”

Strategi kebijakan ini lahir sebagai kiat antisipatif terhadap isu-isu strategis yang menonjol dalam lingkungan hidup yaitu :

- ◆ Rusaknya ekosistem akibat pembangunan yang tidak berorientasi kepada ramah lingkungan.
- ◆ Kurangnya pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
- ◆ Kurangnya kesadaran masyarakat industri besar dan aparat pemerintah terhadap pelestarian lingkungan, penataan ruang dan bangunan.

- Tingginya tingkat pencemaran Sungai Siak.
- Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap penataan bangunan dan penataan ruang.

Untuk mendukung visi dan misi serta kebijakan Pembangunan Kabupaten Siak terutama di bidang lingkungan hidup, maka telah pula ditetapkan visi dan misi pengelolaan lingkungan hidup melalui rencana strategis Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Siak.

2.2.1 Visi dan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Siak

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, serta permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Siak telah menetapkan visi pengelolaan lingkungan hidup yakni " **TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDUKUNG DENGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN** ". Penjelasan makna dari pernyataan

Visi tersebut adalah :

- Pembangunan daerah berwawasan lingkungan adalah suatu upaya terencana yang memadukan kepentingan lingkungan hidup dalam seluruh sektor proses pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi kini dan generasi depan.
- Sumber Daya Alam yang berkelanjutan adalah merupakan potensi yang ada dari Rahmat Ilahi yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melakukan pengkajian dampak lingkungan serta konprehensif dan berkelanjutan untuk generasi masa depan.

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan beberapa Misi yang merupakan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian suatu Visi. Pernyataan misi sekaligus mencerminkan pengoptimalisasian BAPEDALDA untuk mengarahkan organisasi agar eksis dan dapat mengikuti perkembangan lingkungan internal dan eksternal serta senantiasa berusaha mewujudkan keselarasan hubungan antara Pemerintah, Dunia usaha, Masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah normative, transparansi dan akuntabilitas. Misi tersebut antara lain adalah seperti berikut ini.

- *Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan pengawasan pengendalian dan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.*

Misi ini bermakna bahwa setiap kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pembangunan mengandung resiko terhadap lingkungan baik dalam bentuk kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Makin meningkat intensitas kegiatan pembangunan, semakin besar pula resiko dampak lingkungan yang akan terjadi. Kondisi ini memerlukan upaya pengawasan dan pengendalian yang bertujuan meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan. Upaya – upaya tersebut terkait dengan kegiatan – kegiatan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi sehingga sarana dan prasarana merupakan instrumen penting yang mendukung kinerja Bapedalda Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan prima kepada publik.

- *Meningkatkan fungsi kelembagaan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Siak dalam Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan.*

Misi ini bermakna bahwa fungsi kelembagaan Bapedalda sejalan dengan semangat Otonomi Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang profesional didukung dengan Sumber Daya Alam, aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian bidang lingkungan dalam melaksanakan tugasnya, organisasi tersebut mampu memberikan pelayanan prima kepada publik serta mampu berkoordinasi kesemua sektor terkait.

- *Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.*

Misi ini bermakna bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan serta mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya sangat erat kaitannya dengan berbagai kepentingan masyarakat seperti industri, pertanian, kehutanan, pariwisata, pertambangan, perhubungan, perdagangan dan dunia usaha, sehingga perlu adanya dukungan dan peran serta kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kelestarian lingkungan hidup tersebut.

2.2.2 Strategi Pengelolaan Lingkungan

● **Sumberdaya Alam**

Pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan berkelanjutan secara efektif dan efisien dengan dukungan teknologi sehingga memiliki nilai tambah yang maksimal secara ekonomi guna menopang pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

● **Sumberdaya Manusia**

Peningkatan kapasitas dan kemampuan profesionalisme stake holder dengan dilandasi kesadaran lingkungan yang didukung oleh struktur kelembagaan yang proposional dan representatif baik vertikal maupun horizontal.

● **Sumberdaya Buatan**

Mengikuti segenap ketentuan standar operasional prosedur serta perizinan pengelolaan sumberdaya buatan dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan seperti yang tertuang dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup beserta perangkat peraturan yang ada dan mendukung di bawahnya.

2.2.3 Kebijakan Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup

ⓐ **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- Mempertegas kembali komitmen pemberdayaan lembaga lingkungan yang ada di Kabupaten Siak.
- Restrukturisasi Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan terbaru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Siak.
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Komisi AMDAL Daerah serta instansi teknis terkait melalui pendidikan baik tingkat degree ataupun non degree.
- Peningkatan fungsi kelembagaan dalam hal pembinaan, pemantauan, dan pengawasan.
- Pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dan relevansi terhadap pengelolaan lingkungan hidup, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
- Pembentukan lembaga/unit kerja non struktural ditingkat bawah yang dapat melaksanakan fungsi pengelolaan lingkungan.

ⓐ Peningkatan Peran Serta dan Kesadaran Masyarakat Secara Aktif Dalam Pengelolaan Lingkungan

- Melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat melalui kegiatan penyuluhan di tingkat bawah.
- Membentuk kelompok-kelompok peduli lingkungan ditingkat desa se Kabupaten Siak.
- Membantu peningkatan sumberdaya manusia organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, melalui pelaksanaan peningkatan pendidikan dan ketrampilan.
- Pengikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.
- Melaksanakan aksi sosial peduli lingkungan bersama-sama dengan masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat di sekitar lahan kritis.

ⓑ Rehabilitasi, Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

- Melakukan studi komprehensif terhadap daerah kritis dan yang terkena degradasi lingkungan.
- Melaksanakan rehabilitasi dan konservasi terhadap wilayah yang terkena degradasi lingkungan termasuk hutan, pantai, sungai dan laut.
- Memantapkan kembali kebijakan konservasi terhadap kawasan lindung dan kawasan suaka marga satwa di Kabupaten Siak.
- Melarang berbagai aktivitas yang dilakukan di wilayah daerah kritis, terutama yang dapat mengganggu ekosistem lingkungan.

ⓒ Pengintegrasian dan Pementapan Peran dan Fungsi Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Setiap Program Pembangunan

- Melakukan sosialisasi segenap instrumen pengelolaan lingkungan terhadap semua stake holder dan masyarakat, secara berkelanjutan.
- Kewajiban penerapan instrument Unit Pengelolaan Lingkungan yang memenuhi standar dan representatif.

ⓓ Terciptanya Koordinasi, Singkronisasi, dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan Antar Pemerintah Kabupaten dan Instansi Swasta di Daerah dan Pusat

- Meningkatkan koordinasi terhadap Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi dan Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota lainnya, terutama dalam perencanaan program kerja supaya hasil-hasilnya dapat saling mendukung, melengkapi dan sinergis.

- ✚ Peningkatan koordinasi dengan instansi teknis lintas sektoral di Kabupaten Siak.
- ✚ Pembinaan dan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan seperti LSM di bidang lingkungan.

Ⓢ **Pengintegrasian Pendekatan Budaya dan Agama Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- ✚ Melibatkan para alim ulama dan tokoh agama lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan secara informal maupun formal.
- ✚ Melibatkan cendekiawan dan budayawan melayu serta tokoh masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pengelolaan lingkungan hidup.
- ✚ Pencerdasan umat akan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendalaman agama dengan kutipan firman dan hadist.
- ✚ Pengintegrasian fungsi tempat ibadah dan lembaga adat untuk mendukung program pengelolaan lingkungan.

Ⓢ **Penegakan Supermasi Hukum Lingkungan Secara Nyata dan Terukur**

- ✚ Melengkapi dan menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional melalui pembuatan kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung dan mempertegas kebijakan nasional.
- ✚ Peningkatan sumberdaya aparat penegak hukum, melalui pendidikan dan pembekalan tentang aturan, kebijakan dan pengetahuan tentang permasalahan lingkungan hidup terhadap aparat penegak hukum di daerah.
- ✚ Mengintensifkan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di daerah.
- ✚ Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik polisi ataupun jaksa dan hakim.
- ✚ Peningkatan political will dan political action serta komitmen pemerintah terhadap perusak lingkungan tanpa ada perbedaan.

2.3 Kebijakan Tata Ruang

Untuk sinkronisasi kebijakan penataan ruang dengan implementasi serta perkembangan yang ada di lapangan maka dalam Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa diperlukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten setiap lima tahun. Hal ini untuk mengantisipasi serta mengakomodasi perubahan – perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut, mengingat perubahan perubahan yang terjadi seringkali menjadi hambatan, batasan dan atau kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Kendala ini menyebabkan adanya ketidak sesuaian dan atau simpangan yang terjadi antara rencana yang ada dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah disesuaikan dengan perkembangan baru saat ini. Selain adanya pemekaran kabupaten sebagaimana yang disebutkan di atas, perubahan ini juga dilakukan guna penyesuaian dengan paradigma baru pembangunan nasional yang terjadi bersamaan dengan diundangkannya UU Nomor : 22 Tahun 1999 yang terakhir dirubah menjadi UU : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebagai daerah otonom, Kabupaten Siak mempunyai kewenangan lebih luas dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya sendiri dan diharapkan sinergis dengan pengembangan kabupaten lain di sekitarnya. Adanya perubahan kebijakan tata ruang membawa implikasi terhadap perubahan sebagian kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, karena kebijakan tata ruang merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara global. Salah satu pertimbangan dalam perubahan kebijakan tata ruang adalah kemampuan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi kawasan sekitarnya.

2.3.1 Konsepsi Pemanfaatan Ruang

- ✘ Pemanfaatan ruang wilayah dikembangkan secara selaras dan terpadu terhadap struktur ruang dengan memperhatikan lokasi sebaran pusat - pusat pemukiman perkotaan (urban system), serta pola pergerakan barang dan penumpang dari kawasan produksi ke pusat pemukiman perkotaan dan ke simpul - simpul kegiatan utama transportasi wilayah.
- ✘ Pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya harus dikembangkan secara serasi, selaras dan seimbang melalui penerapan kriteria lokasi dan standar teknis pengelolaan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan permasalahan faktual pemanfaatan ruang di lapangan.

- ✘ Penataan ruang yang berwawasan lingkungan dengan pengintegrasian kebijakan pemulihan fungsi lindung wilayah yang mengalami kerusakan di sejumlah kawasan melalui solusi ruang yang adil, bijak dan tidak saling merugikan, dengan tetap lebih mengedepankan pentingnya upaya menjaga kelestarian potensi sumberdaya alam dan daya dukung ekosistem wilayah.
- ✘ Mendayagunakan pengembangan kawasan hutan produksi, sekaligus bagi upaya perlindungan terhadap ekosistem dan potensi sumberdaya alam wilayah, terutama yang berupa potensi sumberdaya air dan tanah dengan memperhatikan sebaran serta rasio kecukupan luasan kawasan hutan (hutan lindung, maupun hutan produksi) terhadap luas wilayah.
- ✘ Pengembangan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang mampu mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk – produk sektor / sub sektor unggulan wilayah berdasarkan pertimbangan kriteria lokasi, tingkat kesesuaian lahan, dan optimasi potensi SDA, SDB, dan SDM wilayah.
- ✘ Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara lebih adil dan berimbang diantara kepentingan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM) dengan usaha besar, sebagai bagian dari upaya pendistribusian secara lebih proposional potensi SDA dan asset perekonomian wilayah kepada semua pelaku ekonomi dalam nuansa pengembangan ekonomi kerakyatan.
- ✘ Pengembangan pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan lautan secara terpadu, saling menunjang dan tak terpisahkan dengan wilayah daratan (up land) dalam rangka mendayagunakan potensi – potensi SDA wilayah pesisir dan lautan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan memperkuat struktur perekonomian wilayah.

2.3.2 Arahan Struktur Pemanfaatan Ruang Kabupaten Siak (2002 – 2011)

Struktur pemanfaatan dan tata ruang kawasan perencanaan merupakan bentuk dari berbagai element – element kegiatan serta pola jaringan jalan yang terdapat di kawasan perencanaan. Pada dasarnya, arahan struktur ruang Kabupaten Siak ini merupakan pedoman untuk :

- ✘ Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang.
- ✘ Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Siak serta keserasian antar sektor pembangunan.
- ✘ Perlindungan terhadap kawasan lindung
- ✘ Penataan ruang wilayah kecamatan

Secara fungsional di Kabupaten Siak terdapat perbedaan karakteristik antar bagian wilayah di sebelah barat dan di sebelah timur. Dan hal lain perbedaan karakteristik tersebut adalah :

- ✚ **Bagian wilayah di sebelah barat**, yang selama ini sudah berkembang dengan intensitas pemanfaatan ruang dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah di masa yang akan datang, bagian wilayah ini memerlukan pemantapan fungsi bagi kegiatan yang akan tetap di pertahankan, pengendalian terhadap kegiatan yang di khawatirkan akan melampaui daya dukung wilayahnya, serta penanganan terhadap berbagai permasalahan fisik dan prasarana dasar perkotaan.
- ✚ **Bagian wilayah di sebelah timur**, yang relative belum berkembang dengan nominasi kawasan tidak terbangun dan kepadatan penduduk rendah karena sebagian besar merupakan daerah bergambut. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah di masa yang akan datang, bagian wilayah ini perlu dipertahankan fungsinya sebagai kawasan lindung .

Adanya perbedaan karakteristik perkembangan diatas, akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam perumus dan rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Siak pada masa yang akan datang, dimana diperlukan pemerataan pengembangan di seluruh wilayah Kabupaten Siak. Struktur ruang Kabupaten Siak terdiri dari pengembangan kegiatan utama kabupaten, dan sistem pelayanan kabupaten.

Kegiatan Utama Kabupaten

Pengembangan struktur ruang Kabupaten Siak di dasarkan pada perkembangan setiap komponen kegiatan yang ada. Untuk mendukung visi kabupaten, maka perlu di buat struktur ruang yang mampu mewujudkan terciptanya visi tersebut. Sesuai dengan visi kabupaten maka kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah perkebunan dan industri yang berbasis kehutanan dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya deskripsi kegiatan Kabupaten Siak dapat dilihat pada **Tabel 2.1.**

Tabel 2.1 Deskripsi Kegiatan Kabupaten Siak

No.	Kegiatan	Deskripsi
-----	----------	-----------

1.	Perkebunan	Tersebar di semua kawasan
2.	Pertanian	Tersebar di sepanjang sungai Siak
3.	Kehutanan	Tersebar di semua kawasan
4.	Industri	Kecamatan Sungai Apit (Buton) Kecamatan Tualang Perawang
5.	Pertambangan	Seluruh wilayah Coastal Plain Pekanbaru (CPP) yang terdapat di Kabupaten Siak
6.	Pariwisata	Kawasan bekas Kerajaan Siak dan Makam Marhum Buntan Sungai Siak Suaka Margasatwa Danau Pulau / Danau Bawah di Kecamatan Siak Sumur Miyak tertua di Kecamatan Minas Hutan Lindung dan Gajahnya di Kec. Minas Tasik Betung di Kecamatan Minas Budaya Suku Sakai

Pengembangan Sistem Pelayanan Kabupaten

Untuk mengoptimalkan pelayanan, maka pusat – pusat pelayanan Kabupaten Siak dibagi berdasarkan fungsi utamanya yaitu :

✘ Pusat Pelayanan Pemerintah dan Kegiatan Budaya dan Pariwisata

Kota Siak Sri Inderapura dijadikan pusat kegiatan yang melayani fungsi pemerintahan dan kegiatan budaya serta pariwisata. Selain Kota Siak Sri Indrapura juga disediakan pusat pendukung untuk pelayanan Pemerintah (pusat pelayanan sekunder) yaitu di masing – masing ibukota kecamatan. Sedangkan pusat kegiatan Budaya dan Pariwisata juga berada di Kota Siak Sri Indrapura dimaksudkan agar ciri khas kehidupan budaya Melayu Riau yang terdapat di Kota Siak Sri Indrapura dapat dilestarikan dan tidak rusak disebabkan oleh kegiatan – kegiatan perkotaan lainnya .

✘ Pusat Pelayanan Perekonomian

Pusat pelayanan perekonomian di Kabupaten Siak ini dibagi atas beberapa bagian yaitu : Pusat pelayanan perekonomian untuk mendukung kegiatan industri besar yaitu di Buton, dan Perawang. Pusat pelayanan perekonomian untuk mendukung kegiatan budaya dan wisata di kota Siak Sri Indrapura. Pusat pelayanan perekonomian untuk mendukung kegiatan perkotaan di kota Siak Sri Indrapura
Pembagian pusat pelayanan perekonomian ini dimaksudkan agar dapat mendukung potensi yang terdapat pada Kabupaten Siak ini. Dengan

demikian diharapkan visi misi yang telah ditetapkan unt Kabupaten Siak ini dapat tercapai dengan baik.

✘ Pusat Koleksi Pendistribusian

Sebagai pusat koleksi dan pendistribusian barang-barang di Kabupaten Siak adalah Buton Hal ini sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu menjadikan Buton sebagai pintu masuk dan keluarnya hasil produksi Kabupaten Siak. Untuk mewujudkannya pelabuhan Buton harus di lengkapi dengan seluruh fasilitas yang menunjang kegiatan ini. Selain itu meningkatkan value added (nilai tambah) hasil produksi dan dengan mempertimbangkan faktor keamanan hasil produks, di Buton perlu dibuat industri hilir yang mengolah hasil produksi yang di dihasilkan oleh industri – industri yang ada di Perawang dan Buton maupun produk yang dihasilkan di Kabupaten Siak lainnya.

✘ Pusat Pelayanan Jasa

Pusat pelayanan jasa juga dibagi atas beberapa bagian yang disesuaikan dengan pusat pelayanan perekonomian yaitu : Pusat pelayanan jasa pendukung kegiatan industri besar di Buton, dan perawang. Pusat pelayanan jasa pendukung kegiatan industri budaya dan wisata di Kota Siak Sri Indrapura. Pusat pelayanan jasa pendukung kegiatan perkotaan di Kota Siak Sri Indrapura. Untuk lebih jelasnya struktur tata ruang wilayah tersaji pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2 Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak

Tingkat Pelayanan	Hirarki Kota	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama
Pusat Primer (pusat pelayanan Kabupaten)	Kota orde I	Siak Sri Indrapura (Pusat Pelayanan Primer Pemerintah)	Pusat Pemerintah Pariwisata (Budaya Melayu) Pusat Pendidikan Pusat Kesehatan Permukiman Pusat Jasa Pendukung kegiatan Pemerintah dan pariwisata
		Perawang Buton (Pusat Pelayanan Primer Pemerintah)	Pusat Perdagangan dan Jasa Regional Pusat Distribusi dan Kolektor barang dan jasa Industri Pusat Jasa pendukung kegiatan Perekonomian
Pusat	Kota	Buton	Perdagangan dan Jasa

Sekunder	Orde II	Minas Sei Apit (Pusat Pelayanan Sekunder Perekonomian)	skala kecamatan Permukiman Pertanian tanaman basah dan kering Pertambangan (miyak Bumi dan Gas) Perkebunan (karet dan sawit)
Pusat Tersier	Kota Orde III	Bunga Raya Dayun Muara Kelantan Kerinci Kanan Kandis	Arahan Pengembangan kegiatan di pusat tersier untuk menunjang pusat pelayanan sekunder

2.3.3 Arahan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Siak (2002 – 2011)

● Kawasan Non Budidaya (Kawasan Lindung)

Tujuan penetapan kawasan lindung dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak adalah untuk melindungi sumber daya alam atau buatan yang ada di dalamnya, juga ditujukan mencegah berbagai kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan baik pada kawasan lindung maupun daerah sekitar. Penerapan kawasan lindung Kabupaten Siak mengacu pada Keppres 32/ 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Pembagian Kawasan Lindung meliputi :

- ➔ Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya
- ➔ Kawasan perlindungan Setempat
- ➔ Kawasan Cagar Alam
- ➔ Kawasan Pelestarian Alam / Taman Nasional
- ➔ Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks Situ
- ➔ Kawasan Cagar Alam, Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- ➔ Kawasan Bencana

Lebh jelasnya alokasi Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Ⓞ Kawasan Hutan Lindung Gambut

Dialokasikan seluas 154083 Ha (18,01 %) dengan fungsi sebagai daerah tangkapan air dan perlindungan kawasan dibawahnya. Kawasan hutan lindung gambut ini masih merupakan hutan alami yang cukup baik, dan disarankan tidak dikonversi ke kawasan budi daya yang bersifat konsevasi lahan. Disamping kawasan lindung gambut juga

terdapat Hutan Lindung yang difungsikan untuk kegiatan wisata yang dialokasikan seluas 8858 Ha atau 1,04 %

Ⓢ **Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai mencakup hampir diseluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Siak yang meliputi luas areal 9106 Ha atau 1,06 %. Luas tersebut dihasilkan melalui pendekatan buffer 100 meter kiri – kanan sungai besar (lebar > 30 meter). Sangat dimungkinkan bahwa luas Kawasan Sungai ini bertambah oleh karena buffer sungai kecil (lebar < 30 meter) 50 meter kiri dan kanan sungai belum dihitung .

Ⓢ **Kawasan Sempadan Pantai**

Kawasan Sempadan pantai hanya mencakup Kecamatan Sungai Apit dan Sabak Auk yang meliputi luas area 2.523 Ha atau 0,29 %. Luas tersebut dihasilkan melalui pendekatan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Secara fisiografis kawasan sempadan sungai ini adalah berdampingan dengan Arahan Perkebunan dan Hutan Produksi Terbatas.

Ⓢ **Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam**

Kawasan yang termasuk dalam Arahan Suaka Alam dan Cagar Alam, dapat dilihat dari **Tabel di 2.3.**

Tabel 2.3 Luas Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam

No.	Nama Suaka Alam	Luas (Ha)
1.	SM Giam Siak Kecil	25.003
2.	SM Danau Pulau Besar	28.000
3.	SM Balai Raja	2.300
4.	SM THR Sutan Syarif Hasyim	1.020
5.	SM Tasik Belat	1.551
	Total	57.874

Arahan Alokasi Kawasan Non Budidaya (Kawasan Lindung)

- ◆ Kawasan Pariwisata terdapat di Kecamatan Siak, Kecamatan Dayun dan Kecamatan Sei. Mandau.
- ◆ Kawasan Resapan Air terdapat di Kecamatan Siak.
- ◆ Kawasan Hutan Lindung Wisata terdapat di Kecamatan Siak.
- ◆ Hutan Lindung Gambut terdapat di Kecamatan Minas, Kecamatan Siak, Kecamatan Dayun, Kecamatan Sei. Mandau, Kecamatan Sei. Apit dan Kecamatan Bunga Raya.

- Kawasan Suaka Margasatwa terdapat di Kecamatan Dayun (SM Danau Pulau Besar dan Danau Pulau Kecil), Kecamatan Sie. Mandau (SM Giam Siak Kecil) Kecamatan Sei. Apit (SM Tasik Belat) dan Kecamatan Minas (SM Balai Raja).
- Kawasan Taman Hutan Raya Sultan syarif Qasim di Kecamatan Minas.

📍 **Kawasan Budidaya**

Pengembangan kawasan budidaya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Siak merupakan salah satu usaha pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Siak. Berdasarkan Keppres No. 57 th 1989 tentang Penataan Ruang Kawasan Budidaya maka daerah non lindung dapat dibudidayakan menjadi :

- Kawasan Hutan Produksi (HP), terdiri dari HP terbatas, HP tetap, HP konversi
- Kawasan Pertanian, terdiri dari tanaman pangan lahan basah, lahan kering, tahun/ perkebunan, peternakan, perikanan
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Perindustrian
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman

Arahan Alokasi Kawasan Non Budidaya (Kawasan Lindung)

- Arahan Perkebunan Rakyat dikembangkan di Kecamatan Sei. Apit, Kecamatan Siak, Kecamatan Tualang dan Kecamatan Kerinci Kanan.
- Arahan Pertanian Lahan Basah dikembangkan di Kecamatan Sei. Apit, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Siak dan Kecamatan Tualang.
- Kawasan Hutan Produksi dikembangkan di Kecamatan Sei. Apit, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Siak, Kecamatan Minas dan Kecamatan Sei. Mandau.
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas dikembangkan di Kecamatan Sei. Apit, Kecamatan Minas dan Kecamatan Tualang.
- Kawasan Perkebunan dikembangkan di Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun dan Kecamatan Siak.
- Lokasi pertambangan terdapat di Kecamatan Minas (Minyak Bumi dan Tambang Gambut) Kecamatan Dayun (Minyak Bumi), Kecamatan Sie. Apit (Minyak Bumi) dan Kecamatan Tualang (Tambang Gambut).

- Kawasan Industri dikembangkan di Kecamatan Tualang (Perawang), dan Kecamatan Sei. Apit (Kawasan Buton).
- Kawasan Pelabuhan Peti Kemas dikembangkan di Kecamatan Sei. Apit (Buton dan sekitarnya).

Arahan penataan ruang Kabupaten Siak tersaji pada **Gambar 2.2.**

2.4 Kebijakan Sosial Ekonomi dan Budaya

2.4.1 Sosial

Angin perubahan yang berhembus di pusat juga diikuti oleh beberapa daerah di Indonesia. Gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah banyak membuat perubahan – perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, baik perubahan ke hal – hal yang positif maupun ke hal – hal negatif. Salah satu bentuknya adalah berupa telah bergesernya nilai – nilai yang bersifat tertutup menjadi transparan, dari sentralistik menjadi desentralistik, dari sistem ekonomi berpusat di konglomerat menjadi berpusat pada ekonomi kerakyatan dan berbagai bentuk perubahan lainnya yang telah berimplikasi terhadap aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kondisi ini bukan saja telah menimbulkan ketegangan dan kerusakan, tetapi juga telah menimbulkan krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan serta terganggunya stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan pada tahun – tahun di awal reformasi.

Berbagai bentuk ketidakpuasan sosial yang terpendam selama ini telah mampu di kemas sedemikian rupa oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam rangka mencari keuntungan pribadi sesaat di era reformasi ini dalam bentuk provokasi, yang kemudian berkembang menjadi suatu tindakan berupa demonstrasi kepada pemerintah, perusahaan, dan kepada pihak – pihak yang diduga oleh masyarakat mempunyai keterkaitan dengan program tersebut. Bahkan pada awal reformasi di beberapa lokasi keadaan ini telah berubah menjadi tindakan anarkhisme seperti pengambil alihan secara paksa, pembakaran, pengrusakan di sejumlah lokasi perkebunan. Kondisi ini telah menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, oleh karena berbagai bentuk demonstrasi yang menjurus kepada tindakan anarkhisme, berupa pengrusakan, pembakaran dan bahkan penyerangan secara fisik kepada orang perorang pasti akan menimbulkan kerugian baik meterial maupun immaterial di kedua belah pihak. Hal ini tentu saja permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Siak mengingat pluralisme budaya lainnya selain budaya

Melayu, seperti Jawa, Minang dan Batak. Namun demikian problematika semua itu sebahagian besar sudah berlalu.

Dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, maka pada tahun 2006 secara umum kondisi sosial politik Kabupaten Siak sudah mulai membaik meskipun belum seperti yang diharapkan, gejolak sosial berupa demonstrasi dan turun ke jalan masih ada ditemui, yang didominasi oleh permasalahan lingkungan seperti masalah lahan,

Gambar 2.2 Peta Tata Ruang Kabupaten Siak

masalah pencemaran Sungai Siak. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan di berbagai sektor oleh pemerintah yang pada tahun tahun sebelumnya banyak menemui kendala sosial sudah mulai kondusif. Kehidupan masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan (**Tabel 2.4**) menampakkan eksistensinya dalam pembangunan. Sampai tahun 2006 tercatat tidak kurang dari 56 organisasi sosial kemasyarakatan terdapat di Kabupaten Siak. Kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) telah berhasil dilaksanakan dengan damai, dengan terpilihnya pasangan Bapak Arwin AS dan Bapak OK Nizamil sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Meskipun dewasa ini kondisi ini sudah mulai membaik, namun jika tidak dijaga dengan baik, tidak akan menutup kemungkinan munculnya kembali pergolakan sosial politik karena adanya ketidakpuasan dari kelompok yang merasa dipinggirkan. Akibat selanjutnya akan menjalar ke sektor - sektor lain, seperti sektor ekonomi pembangunan dan menurunkan minat investor untuk masuk ke Siak melakukan investasi.

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Siak, maka arah kebijakan umum pembangunan di bidang sosial di Kabupaten Siak ditujukan kepada :

- Meningkatkan kualitas penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang ada pada jalur sekolah maupun luar sekolah secara memadai agar sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berwawasan IPTEK dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan serta pembinaan gizi keluarga.
- Membina secara intensif terhadap angkatan kerja khususnya tenaga kerja tempatan serta penanggulangan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja.
- Mengembangkan aspek sosial budaya masyarakat dalam rangka membangun dan mengembangkan nilai - nilai sosial baru yang berkenaan dengan peningka

tan kualitas sumber daya manusia, seperti pengembangan wawasan, etos kerja dan semangat berkarya

- ➡ Meningkatkan pendidikan agama, serta meningkatkan apresiasi kesenian dan budaya daerah, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berwawasan iman dan taqwa (IMTAQ)

**Tabel 2.4 Organisasi Kemasyarakatan
Landscape 5 halaman**

Tabel 2.4 Data Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan

No.	NAMA ORGANISASI	PENGURUS	SURAT KEPUTUSAN DAN TGL PENDIRIAN	ALAMAT
1	Bakom PKB Kec. Tualang	Ketua : Saeran. AS Sekretaris : Syarkawi	Nomor : 02/KPTS-CPT/XI/2000 Tanggal : 28 oktober 2001	Jl. Masjid Muhajirin Kec Tualang Perawang
2	Bakom PKB Kec. Minas	Ketua : Umar Alisan Sekretaris : Afrizal Taustar	Nomor : 03/KPTS/V/2001 Tanggal : 8 Mei 2001	Jl. Sultan Wisata Minas Minas jaya
3	Bakom PKB Kec. Sungai Apit	Ketua : - Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Sungai Apit
4	Bathin Limo Kec. Minas	Ketua : M. Bungsu Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Minas jaya
5	DPB. Barisan Perjuangan Masyarakat	Ketua : T Ridwan Sekretaris : Ir. Hadi Lutfi	Nomor : Akte Notaris Tanggal : 1 maret 2001	Jl. Sultan Ismail Siak Sri Indrapura
6	DPC. Himpunan Masyarakat Nias	Ketua : Mikael Noruru Sekretaris : Hadirat Gulo. SE	Nomor : SM/MDT/DPD/IX/2001 Tanggal : 19 November 2001	Kec. Tualang Perawang
7	DPC. Pemuda Pancasila Kab. Siak	Ketua : Edizar, Bac Sekretaris : Ir Nurul Huda	Nomor : 002/KPTS/DPC/II/2001 Tanggal : 5 februari 2001	Kec. Tualang Perawang
8	DPD II Keluarga Sejahtera Pengemudi	Ketua : Liberty Siahaan Sekretaris : M Dahlan Rais	Nomor : 003/SK/DPD.II/III/2001 Tanggal : 6 Maret 2001	Kec. Tualang Perawang
9	DPD PUJAKESUMA Kab. Siak	Ketua : Sujatno Sekretaris : Supandi Ms	Nomor : SK/02/DPP/II/2001 Tanggal : 27 Februari 2001	Kec. Tualang Perawang
10	DPD TK II Barisan Banteng Riau	Ketua : Afrizal Sekretaris : Anwar Ali	Nomor : Akte Notaris Tanggal : 10 Maret 2001	Jl. Hangtuh No. 12 KM.3,5 Kec. Tualang Perawang
11	DPD Pemuda Peduli Siak	Ketua : Irfan Priyatno Sekretaris : Sudaryanto	Nomor : 037/DPP-PPS/X/1999 Tanggal : 28 oktober 1999	Jl. Sultan Ismail No. 116 Siak Sri Indrapura
12	DPD Forum Angkatan Muda Riau	Ketua : Said Bahrum Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : Tahun 2000	Jalan Yos Sudarso Minas Minas Jaya
13	Forum Komunikasi antar Suku dan Agama (FKSA)	Ketua : Umar Allisan Sekretaris : Afrizal Tausar	Nomor : Akte Notaris No. 19 Tanggal : 02 Mei 2000	Jl. Yos Sudarso KM. 38 Minas jaya
14	Forum Komunikasi antar Suku dan Agama (FKSA) Kec. Kerinci Kanan	Ketua : H. Syahrul Sekretaris : Sumaryo Ahmad	Nomor : - Tanggal : 12 November 2001	Jl. Raya Pertamina Kerinci Kanan
15	Forum Komunikasi Masyarakat Melayu Siak	Ketua : Drs. Wan Abdurrahman	Nomor : SK/05/MPFKM/B/2001	Jl. Sultan Ismail Siak Sri

	Bersatu (FKMMMSB)	Sekretaris : Mahmud Riyadh	Tanggal : 15 Februari 2001	Indrapura
16	Forum Komunikasi Pemuda Tualang (FKPT)	Ketua : - Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Kec. Tualang Perawang
17	Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Melayu Bekas Afdeling Bengkalis	Ketua : DR. Yusmar Yusuf, M.Pd Sekretaris :	Nomor : - Tanggal : 17 April 2000	Pekanbaru
18	Forum Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (FPPOD)	Ketua : Kamruzzaman Sekretaris : Ujang Prayitna	Nomor : Akte Notaris No. 26 Tanggal : 11 April 2001	Jl. Hanguah KM. 3,5 Tualang Perawang
19	GM. Kosgoro Kec. Minas	Ketua : Irhas Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Jl. Yos Sudarso Minas jaya
20	GOPTKI Kec. Minas	Ketua : Dra. Rasidah Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Komplek Kemuning Minas Jaya
21	Himpunan Pemuda Siak Bertuah	Ketua : Drs. Andri Dipa Sekretaris : Mus Mulyadi	Nomor : - Tanggal : 24 Januari 2001	Jl. Pasar Baru Siak Sri Indrapura
22	Himpunan Wanita karya (HWK) Kec. Minas	Ketua : Ernawati Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Jl. Yos Sudarso MinasJaya
23	Ikatan Alumni Mahasiswa Sungai Apit (IKAMSA)	Ketua : Asri Vival, S.Pd Sekretaris : Afrizal. S.Pd	Nomor : - Tanggal : 17 juni 1999	Jl. Gajah Mada No. 03 Sungai Apit
24	Ikatan Cendekiawan Siak	Ketua : Drs. Rusmini Indra Sekretaris : Ir. Salomo	Nomor : - Tanggal : 17 Februari 2001	Siak Sri Indrapura
25	Ikatan Keluarga Kampar (IKK) Kab. Siak	Ketua : H.M Rais Dahlan Sekretaris : Dasril	Nomor : - Tanggal : 7 September 2001	Jl. Tenggirir No. 02 Siak Sri Indrapura
26	Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Perawang	Ketua : Yulliardi. SH Sekretaris : Dedi Sunardi,SE	Nomor : 037/SK-IKMR/XI/2005 Tanggal : 12 November 2005	Jl. Raya KM. 4 Kec. Tualang Perawang
27	Ikatan Pemuda Pasar Baru Siak (IPPBS)	Ketua : Ir. Ahzan Usman Sekretaris : -	Nomor : 09/IPPBS/Siak/Ex/99 Tanggal : 27 Oktober 1999	Jl. Pasar baru No. 21 Siak Sri Indrapura
28	Ikatan Pemuda Siak (IPS)	Ketua : Ruslan Sekretaris : Said Marzuki	Nomor : - Tanggal : Januari 2001	Jl. Sultan Ismail No. 01 Siak Sri Indrapura
29	Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPMKS) Kab. Siak	Ketua : Iskandar Sekretaris : Saiful Amrizal	Nomor : - Tanggal : -	Jl. Bina Krida Komp. Villa Wahyu Minas
30	Ikatan warga Satya DPD Kab. Siak	Ketua : Abu Bakar Sekretaris : Efni Azmi	Nomor : 01/IWS-PPD/Siak/02 Tanggal : 8 februari 2000	Jl. Raya Pekanbaru Duri KM 71 Sam-sam

31	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kec. Minas	Ketua : Suprianta Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : Tahun 1997	Jl.hutan Wisata Minas Jaya
32	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Siak	Ketua : H. Said Muhammad Sekretaris : Ir. Hadi Lutfi	Nomor : - Tanggal : Tahun 1997	Jl. Sultan Ismail Siak Sri Indrapura
33	Laskar Melayu Bersatu Kab. Siak	Ketua : Ruslan Sekretaris : Ismail	Nomor : 07 Tanggal : 26 Juli 2001	Jl. Hangtuh KM 5 Perawang
34	Majelis Pertimbangan Kab. Siak	Ketua : Wan Ghailb Sekretaris : OK. Nizami Jamil	Nomor : KPTS/19/II/2000 Tanggal : 16 Maret 2000	Jl. Sultan Syarif Hasyim Siak
35	Muhammadiyah Kab. Siak	Ketua : H. Muhktar Sekretaris : Zulfri Nursal	Nomor : 54/SK-PP/I-A/I-b/2000 Tanggal : 17 Mei 2000	Jl. Hangtuh No. 87 Sungai Apit
36	Organisasi Laskar Melayu Bersatu	Ketua : Ruslan P Sekretaris : Edi Darma	Nomor : Akte Notaris No. 08 Tanggal : 8 Mei 2001	Perawang
37	PAC. Pemuda Pancasila Kec. Minas	Ketua : Edizar. Bac Sekretaris : Ir. Nurul Huda	Nomor : - Tanggal : 5 februari 2001	Jl. Minas Perawang KM. 5 Perawang
38	PC. Nahdhatul Ulama Kab. Siak	Ketua : Drs. Fathurrahman Sekretaris : Abdullah Said	Nomor : 020/A.II.04.D/04/2000 Tanggal : 24 April 2000	Dayun
39	Sanggar Pemuda Kreatif	Ketua : M. Sofwan Sekretaris : Zulfikar	Nomor : - Tanggal : 27 Juni 2001	Jl. Bahagia No. 190 Siak Sri Indrapura
40	Yayasan Al-Fadlah	Ketua : Azijar Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Jl. KUD Minas Timur Minas
41	Yayasan Al-Hidayah	Ketua : H. Malkayumi Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Desa Kandis Minas
42	Yayasan Korpri	Ketua : Kusri Gudang. BA Sekretaris : -	Nomor : - Tanggal : -	Komplek Kemuning Minas
43	Yayasan Pendidikan Bina Karya	Ketua : Ruslan Sekretaris : Muchtar Ahmad	Nomor : - Tanggal : -	Jl. Gajah Tunggal Perawang
44	Yayasan Pendidikan Persada Indah	Ketua : Ir. Yunus Wijaya Sekretaris : Ir. Fahmi Adnan	Nomor : - Tanggal : -	Jl. Sepuluh KPR-PT IKPP Perawang
45	Yayasan Pendidikan SMU Swasta Pemdak Kab Siak	Ketua : Drs. Said Arif Fadillah Sekretaris : Sugiantara	Nomor : - Tanggal : -	Jl. SMA No. 25 Perawang
45	Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kab. Siak	Ketua : Abdul Mukti Sekretaris : Hamdan	Nomor : Akte Notaris 04 Tanggal : 11 Mei 2005	Jl. Suak Lanjut No. 20 Perawang

46	Yayasan Pengembangan Tunas Nusantara Badan Kerjasama LSM (BK-LSM) Koordinator Kab. Siak	Ketua : Auzar. AM Sekretaris : Mariana	Nomor : 05/KPTS/YPTN/Wf/11/2004 Tanggal : 27 Februari 2004	Jl. Prona Kp. Dalam Siak Sri Indrapura
47	Yayasan Rusqah Islamiyah	Ketua : Drs. Nazar Khatan Sekretaris : -	Nomor : 97 Tanggal : 20 Oktober 1980	Jl. Indra Giri Kamp Rempak Siak Sri Indrapura
48	Yayasan Perkuaran Islam Dan Mesjid	Ketua : Suriadi Sekretaris :	Nomor : Akte Notaris Tanggal :	Desa Minas timur Minas
49	Yayasan Pemeliharaan Kaum Duafa	Ketua : Syarifah Suud Sekretaris : Zulkifli	Nomor : Akte Notaris No. 20 Tanggal : 28 Juli 2001	Jl. Sultan Syarif Qasim Kp Dalam Siak
50	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Perawang	Ketua : Muhammad Tarmiji Sekretaris : -	Nomor : 01 Tanggal : 31 desember 2002	Jl. Raya Perawang Km. 5 Kec. Tualang Perawang
51	Kesatuan Masyarakat Siak (KEMAS)	Ketua : Wan Abu Bakar Sekretaris : Jailani	Nomor : Akte Notaris No. 24 Tanggal : 9 September 2004	Jl. Indragiri Kp. Rempak Siak Sri Indrapura
52	Lembaga Kajian Insan Madani	Ketua : Husni Merza Sekretaris : -	Nomor : Akte Notaris No. 11 Tanggal : 14 februari 2003	Jl. Buntan Kp. Dalam Siak Sri Indrapura
53	Ikatan Pemuda Karya (IPK)	Ketua : Musran Pasaribu Sekretaris : Adi Nursyah	Nomor : Akte Notaris No. 56 Tanggal : 14 Maret 2003	Jl. Raya Perawang Minas Perawang
54	Gerakan Aliansi Cinta Pembangunan (GACIP)	Ketua : T. Sukma Jaya Sekretaris : Afan Khuanazi	Nomor : Akte Notaris 04 Tanggal : 11 Mei 2005	Jl. Suak Lanjut No. 20 Perawang
55	Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT)	Ketua : Adi Tavip Nasution Sekretaris : Ali Wijaya	Nomor : 004/SK/DPD/VII/2003 Tanggal : 20 Agustus 2003	Jl. Raya Perawang Perawang
56	Ikatan Pemuda Riau (IPR)	Ketua : T. M Zulkadri. S,Sos Sekretaris : T. S. Abdullah A.mp	Nomor : Akte Notaris No. 02 Tanggal : 17 Mei 2005	Jl. Sultan Syarif Hasyim No. 29 Kec, Siak
57	DPC Organda	Ketua : Mursyid Sekretaris : -	Nomor : Kep. 17/DPD-Riau/K-VI/2005 Tanggal : 10 juni 2005	Jl. Hang Nadim No. 01 Kec. Tualang Perawang
58	Pemuda Melayu Nusantara	Ketua : Drs. Amir Abdurrahman Sekretaris :Fathurrahman. S.Ag	Nomor : 01/SK/DKP.PMN-RI/IX/2004 Tanggal : 1Oktober 2004	Jl. Tanah Datar kampong Dalam Siak Sri Indrapura
59	Komite Nasional Wartawan Indonesia	Ketua : Akari. S.Pd Sekretaris : Erik Susanto	Nomor :011/SK/KMNS/WI/R/IX/2005 Tanggal : 12 September 2005	Jl.Raya Perawang Km. 5 Tualang Perawang
59	Melayu Tahta Bersimpuh	Ketua : Lukman Hakim Sekretaris : Iman Muyasir	Nomor : Akte Notaris No. 15 Tanggal : 6 Januari 2005	Jl. Tanjung Agung Siak Sri Indrapura

60	Clean Governance	Ketua : A. Manan Sekretaris : Andriyani	Nomor : Akte Notaris No. 130 Tanggal : 28 juli 2006	Jl. Raya Perawang KM. 73 Dayun
61	LBH. Tuah Batin Pandan	Ketua : Afrizal Ahmad, SH Sekretaris : Zulkifli Bahrum	Nomor : Akte Notaris No. 05 Tanggal : 1 September 2005	Jl. Raya Pertamina KM.4 Koto Gasib
62	Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI)	Ketua : Zainuddin Said Sekretaris : Elvisrina	Nomor : Akte Notaris No. 07 Tanggal : 13 september 2006	Jl. Raja Kecil Siak Sri Indrapura
63	Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (DPC PATRI)	Ketua : M. mangantar Sekretaris : Nazamuddin S.Hi	Nomor : Akte Notaris No. 23 Tanggal : 23 Juni 2004	Jl. Pertamina Kec. Lubuk Dalam Siak Sri Indrapura

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Siak , 2006

2.4.2 Ekonomi

Globalisasi pembangunan ekonomi terus berlangsung dengan cepat, dan tidak dapat dihindarkan serta dihindari. Proses ini dapat memberikan dampak positif maupun.

Daerah yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini hanya akan menjadi objek globalisasi. Perekonomian yang tidak memiliki daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis global dan akan tersisih dari medan persaingan serta akan mengalami kemunduran. Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya maka agenda yang penting dalam pembangunan ekonomi untuk jangka pendek adalah mempercepat pemulihan ekonomi disertai upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat. Lambatnya pemulihan ekonomi cenderung memicu konflik sosial dan akan membahayakan proses pemulihan ekonomi itu sendiri. Proses pemulihan ekonomi yang berjalan lambat juga menghadapi ancaman munculnya gejolak ekonomi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat menjadikan Indonesia semakin terpuruk.

Sasaran pembangunan ekonomi nasional pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan penduduk. Kondisi ini dapat tercermin dengan menurunnya kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin, meningkatnya daya saing, terjaganya ketersediaan cadangan sumber daya alam dan lingkungan yang sehat dan bersih. Sesuai dengan kondisi tersebut dengan arahan GBHN 1999 dan Pola Dasar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan harus mempunyai prinsip-prinsip utama sebagai berikut :

- Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan, berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.
- Pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang di susun secara transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan baik pemerintah maupun perusahaan.
- Pembangunan ekonomi harus berdasarkan daya dukung sumber daya alam lingkungan hidup dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan SDM serta *liberalogi* untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing.
- Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta masyarakat secara aktif dan nyata secara konsisten.
- Pembangunan ekonomi berorientasi pengembangan ekonomi global.

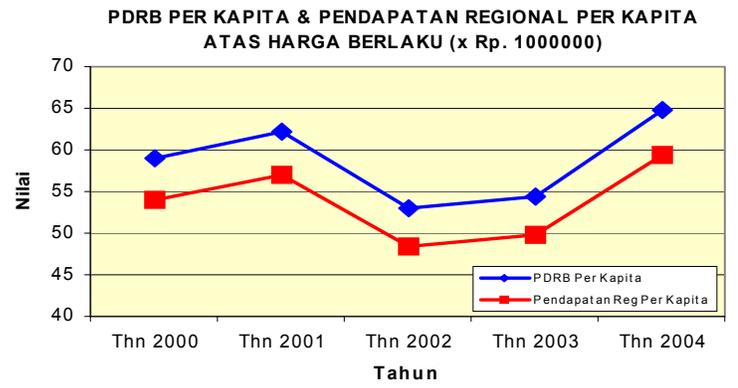
- Pembangunan ekonomi makro yang harus dikelola secara hati-hati, disiplin dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi.

Jatuhnya nilai rupiah yang menandai krisis ekonomi yang dimulai sejak Juli 1997, sampai tahun 2006, serta kenaikan harga BBM masih menyisakan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Siak, seperti masih terjadinya kesulitan sejumlah barang kebutuhan pokok terutama bahan bakar minyak (minyak tanah) akibat tidak terkendalinya harga minyak dunia dan merupakan salah satu bentuk globalisasi ekonomi dunia yang merasuk ke sendi – sendi ekonomi masyarakat kecil, termasuk di Kabupaten Siak. Harga barang yang semakin hari menunjukkan indikasi yang semakin menaik, harga jual pokok produk pertanian yang tidak stabil, harga pupuk sebagai input pertanian yang juga mengalami kenaikan akibat berkurangnya subsidi yang diberikan pemerintah.

Program peningkatan ekonomi masyarakat / kerakyatan yang merupakan salah satu misi dari Kabupaten Siak, sudah mulai memperlihatkan implementasi di lapangan. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan nenas merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Program ini juga merupakan salah satu program antisipasi pemerintah Kabupaten Siak, pasca habisnya bahan tambang minyak bumi yang merupakan sumber pendapatan utama dalam anggaran pembangunan Kabupaten Siak. Ribuan hektar lahan sawit sudah mulai ditanami dan tumbuh tersebar di wilayah Kabupaten Siak. Program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan dan pengembangan perkebunan sawit ini sudah mendapatkan pengakuan positif di tingkat nasional

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Siak dapat di lihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari angka PDRB tahun 2000 – 2004 atas dasar harga yang berlaku menurut lapangan usaha maka terjadi kenaikan dari 1.539.314,76 juta rupiah pada tahun 2003 meningkat mejadi 1.764.455,77 juta rupiah pada tahun 2004. Sedangkan angka – angka PDRB atas harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tercatat 780.250,79 juta rupiah tahun 2003 meningkat menjadi 827.491,07 juta rupiah pada tahun 2004. Hal ini berarti besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak pada tahun 2003 sebesar 5,71 %.

Angka PDRB perkapita mengalami kenaikan. Pada tahun 2004 PDRB perkapita atas harga berlaku sebesar 64.867.369,40 rupiah, sedangkan pada tahun 2003 sebesar 54.485.094,79 rupiah. Untuk harga konstan pada tahun 2004 sebesar 47.910.184,64 rupiah dan pada tahun 2003 sebesar 49.210.289,05 rupiah. Sedangkan pendapatan regional per kapita tahun 2004 atas harga berlaku tercatat 59.301.749,17 rupiah atau menunjukkan kenaikan jika dibanding tahun 2003 yang berjumlah 49.810.273,66 rupiah. Untuk harga konstan tahun 2000 pendapatan regional per kapita tahun 2004 adalah 43.799.490,79 rupiah atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003 yakni sebesar 44.988.046,25 rupiah **(Gambar 2.3).**



Gambar 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita Atas Harga Berlaku 2000 – 2004

Permasalahan yang merupakan kendala dan menyebabkan belum optimalnya upaya pemulihan sektor ekonomi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir antara lain adalah :

- ✚ Ketidakpaduan dalam membangun kebersamaan dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Siak dalam menjalankan upaya pemulihan ekonomi secara konsisten dan bersungguh sungguh, indikasi ini terlihat dari adanya upaya dari segelintir orang / pihak yang ingin memanfaatkan situasinya untuk melakukan tindakan spekulatif demi keuntungan pribadi/ kelompoknya masing - masing.
- ✚ Tidak sinkronnya kebijakan nasional dengan daerah. Kebijakan ekonomi terutama pada skala nasional masih berorientasi pada kebijakan yang bersifat makro kurang mengarah secara tajam pada sektor riil. Sementara kebijakan

untuk sektor riil lebih ditekankan pada peranan daerah. Hal ini mengakibatkan kurang konsistennya antara kebijakan yang ada pada tingkat pusat dengan kebijakan daerah.

- ✚ Keterbatasan sumberdaya manusia di daerah dalam menangani upaya pemulihan ekonomi masih sangat terbatas sekali, terutama dalam hal merumuskan kebijakan yang masih banyak kewenangannya di pegang oleh pemerintah pusat, seperti pendistribusian sejumlah barang kebutuhan pokok, terutama bahan bakar minyak, beras, pupuk dan sebagainya.
- ✚ Kuatnya pengaruh ekonomi skala besar terutama pada sub sektor perkebunan, sehingga pada tingkat petani posisi tawarnya (*bargaining position*) relatif sangat lemah, akibatnya harga barang - barang pertanian yang dihasilkan masyarakat terutama kelapa sawit sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi besar tersebut.
- ✚ Ketidak mampuan para petani ikut mengontrol nilai komoditi yang dihasilkannya di pasar internasional. Meskipun hasil pertanian di Kabupaten Siak mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi di pasar luar negeri dan bersifat strategis oleh karena dijual dalam mata uang dollar, namun manfaat tersebut kurang dirasakan oleh para petani. Kondisi ini sangat bertolak belakang dari yang semestinya, dimana seyogyanya fluktuasi harga komoditi tersebut (kelapa sawit dan karet) mengikuti fluktuasi mata uang dollar terhadap nilai rupiah. Kenyataannya fluktuasi positif ini tidak memberikan keuntungan terhadap para petani secara signifikan.

Guna mendukung visi dan misi yang ada maka arah kebijakan pembangunan di bidang Ekonomi di Kabupaten Siak adalah ditujukan kepada :

- Mengembangkan dan meningkatkan produksi dan produktifitas sektor unggulan khususnya perkebunan dan tanaman pangan sebagai pemasok utama bagi kebutuhan masyarakat ataupun industri dan sebagai komoditi yang kompetitif dalam persaingan pasar global.
- Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta informasi pasar.
- Mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Mengembangkan kawasan-kawasan industri.
- Membangun sarana dan prasarana utilitas yang mendukung kawasan industri.
- Menumbuh kembangkan industri rumah tangga dan kerajinan yang berorientasi pasar.

- Membangun kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain sebagai peluang pasar bagi produk-produk industri.
- Pengembangan industri alat angkutan umum.
- Perluasan dan pembuatan lembaga pendukung PKPM.
- Pengembangan wisata.
- Penataan, pengawasan, dan penertiban pertambangan.
- Perluasan dan pemanfaatan jaringan transportasi darat, laut, udara dan telekomunikasi.
- Penataan dan penguatan basis produksi dan distribusi.
- Perluasan dan peningkatan pertanian rakyat, mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Dalam mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Siak, maka diperlukan strategi kebijakan di bidang perekonomian seperti berikut ini :

- ✘ Mendorong berkembangnya potensi ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan untuk memiliki, memanfaatkan dan mengembangkan faktor produksi, meningkatkan kemampuan untuk mengakses permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta mengembangkan kemitraan secara vertikal maupun horizontal atas dasar saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan.
- ✘ Mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan masyarakat lokal, peningkatan keterampilan. Strategi diprioritaskan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, permukiman yang padat, daerah rawan bencana dan di desa yang terpencil.

2.4.3. Budaya

Heterogenitas kebudayaan haruslah dipandang sebagai suatu anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga merupakan sebuah potensi besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Siak. Pembangunan sektor kebudayaan di Kabupaten Siak diarahkan kepada upaya membangun ketahanan budaya daerah yang kokoh, dinamis, kreatif dengan kepribadian yang tetap berakar pada jati diri bangsa dan budaya dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Sasaran yang akan dicapai adalah terbentuknya rujukan sistem nilai budaya yang berbasis pada warisan leluhur guna mendukung keberadaan budaya daerah. Isu strategis pembangunan kebudayaan meliputi seperti berikut ini.

- Peningkatan kualitas kinerja lembaga kebudayaan agar dapat membina dan mengembangkan budaya lokal.
- Peningkatan kualitas kinerja lembaga kebudayaan agar lebih pro aktif menyuguhkan atraksi kebudayaan lokal pada setiap event kebudayaan.
- Peningkatan kerjasama dengan instansi lainnya agar dapat menghasilkan produk kebudayaan dalam kemasan yang berkualitas.

Kondisi wilayah Kabupaten Siak yang secara geografis cukup strategis telah banyak menarik para pendatang dari luar dengan berbagai latar belakang budaya. Masuknya para pendatang dari berbagai wilayah ini telah terbukti banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Perkembangan pembangunan di sektor perkebunan telah meningkatkan daya tarik bagi pendatang. Sehingga pada kawasan perkebunan dengan mudah dijumpai para pendatang yang berasal dari wilayah utara, baik sudah lama menetap maupun bagi pendatang baru. Sektor perdagangan juga dipengaruhi oleh budaya dari Sumatera Barat yang cukup dikenal sebagai orang perantau. Kesemuanya ini telah membaaur menjadi satu aktivitas dan gerak langkah pembangunan di Kabupaten Siak. Kesatuan dan harmonisasi gerak ini jika dapat dikelola dengan baik merupakan salah satu potensi yang dapat mendorong laju pembangunan Kabupaten Siak.

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan upaya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai budaya tempatan untuk memperkaya budaya nasional dan budaya melayu, guna menangkal eksese negatif dari penetrasi budaya asing yang cukup kuat.
- Mengekspresikan nilai-nilai budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk menumbuhkembangkan budaya yang kondusif bagi perwujudan suasana bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib, disiplin dan bermoral serta beretika tinggi.
- Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pendokumentasian situs-situs budaya dan situs sejarah lainnya yang bernilai tinggi melalui pembangunan museum, pembuatan mikro film dan penetapan Cagar Budaya.
- Meningkatkan kegiatan pengembangan kesenian daerah, disamping bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kesenian daerah, juga untuk menjadikan sebagai aset daerah yang bernilai ekonomis sehingga dapat menarik devisa, meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyerap tenaga kerja.
- Mendorong masyarakat untuk mengembangkan aktifitas, kreatifitas dan inovasi dalam bidang seni dan budaya.

BAB III

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Amanat dan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 pada Bab IV Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, kemudian pada Pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, untuk itu pendayagunaan sumber daya tersebut haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan tetap mengedepankan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Keterbatasan sumber daya alam merupakan suatu kendala pembangunan nasional yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu upaya konservasi yang merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan harus tetap dilaksanakan secara konsisten.

Pengelolaan dan permasalahan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang sangat kompleks, dimana pelestarian sumberdaya alam adalah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi menyebabkan semakin meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam. Kondisi ini dapat meningkatkan tekanan terhadap fungsi lingkungan hidup. Berbagai konflik kepentingan baik kepentingan vertikal maupun kepentingan horizontal turut memberikan warna terhadap tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Princip) yang berwawasan lingkungan yang dicanangkan dalam visi pembangunan daerah tercermin dalam salah satu rumusan misi pembangunan daerah yaitu " Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan *pembangunan daerah yang berkelanjutan* "

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah pusat sesuai dengan PP No. 25/2000 hanya mempunyai kewenangan membina dan menyusun kebijaksanaan makro, standard dan kriteria, sedangkan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU no. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang proporsional dan

tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah daerah tersebut diberikan secara luas dan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, dimana dalam implementasi pelaksanaannya harus dilakukan secara sinergi dan melibatkan semua pihak.

3.1 ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP

Dinamika berbagai permasalahan lingkungan terus berkembang di sepanjang tahun 2006 di Kabupaten Siak. Karakteristik permasalahan lingkungan dengan kompleksitas tinggi ini memerlukan penanganan yang komprehensif dan sungguh sungguh dari segenap stake holder dan segenap lapisan masyarakat yang didukung oleh political will dari pemerintah. Pada umumnya isu lingkungan yang cukup mengemuka di Kabupaten Siak sepanjang tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan isu lingkungan pada tahun 2005. Isu lingkungan di Kabupaten Siak pada tahun 2006 tersebut adalah masalah *Kebakaran Lahan dan Hutan ; Illegal Logging ; Pencemaran Sungai Siak ; dan Abrasi Sungai Siak*. Berbagai bentuk isu lingkungan tersebut dapat dijelaskan seperti berikut ini.

3.1.1 Kebakaran Hutan dan Lahan

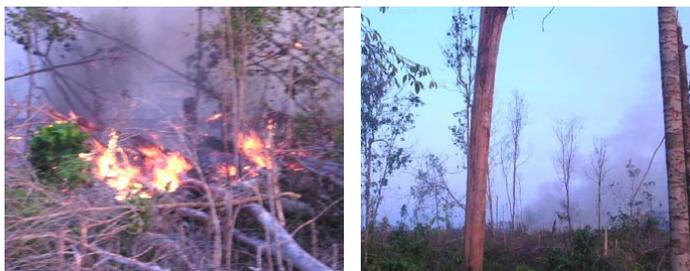
Peristiwa kebakaran lahan dan hutan di Propinsi Riau dan termasuk Kabupaten Siak sepertinya sudah merupakan agenda tahunan fenomena alam dalam satu dekade terakhir ini. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi kebanyakan di kawasan hutan produksi dan areal kawasan perkebunan, meskipun sebagian lagi juga terjadi pada kawasan hutan konservasi. Kondisi ini tentu saja telah menyebabkan degradasi lingkungan dan mengancam fungsi – fungsi ekologis pada kawasan hutan (**Gambar 3.1**).



Gambar 3.1 Kebakaran Hutan Merusak Lingkungan

Disamping telah menimbulkan kerugian hilangnya potensi nilai ekonomis kayu pada hutan, bencana kebakaran lahan dan hutan ini juga telah mengakibatkan kerusakan ekosistem kawasan hutan termasuk kawasan lindung. Dampaknya adalah fungsi kawasan lindung tersebut sudah tidak optimal lagi untuk melindungi biota di dalamnya ataupun sebagai penyangga kehidupan lain di sekitarnya. Langkah antisipasi dini untuk menghindari bencana alam ini sepertinya belum membuahkan hasil yang signifikan. Begitu juga upaya penanggulangan setelah terjadinya bencana kebakaran tidak memberikan arti yang signifikan, meskipun sudah menghabiskan anggaran yang besar dengan teknologi hujan buatan. Ancaman terhadap terjadinya potensi kebakaran hutan di tahun – tahun berikutnya masih tetap menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.

Bencana alam ini secara nyata telah mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar. Dampak yang ditimbulkan dari masalah ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, namun pengaruhnya telah meluas sampai ke wilayah lain, termasuk kenegara – negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Musibah kebakaran hutan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Disamping dampak berupa asap (**Gambar 3.2**) yang dapat mengganggu kesehatan dan sektor perekonomian seperti lalu lintas penerbangan, kebakaran ini juga telah menghilangkan keanekaragaman hayati suatu kawasan berupa flora dan fauna yang musnah terbakar.



Gambar 3.2 Dampak Asap Akibat Kebakaran Hutan

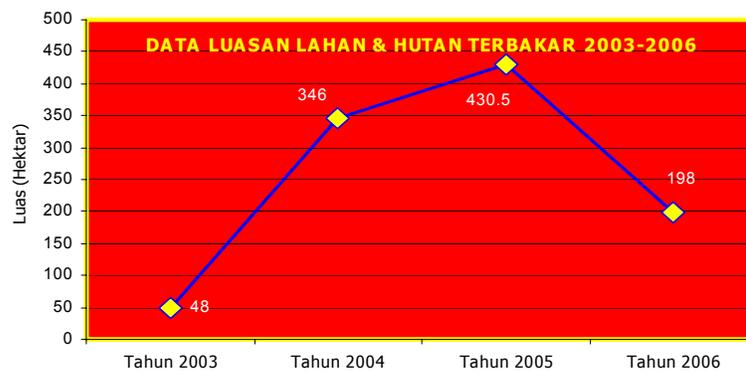
Terjadinya kebakaran hutan disebabkan dua faktor, yakni faktor alami dan faktor antropogenik (aktivitas manusia). Faktor alami disebabkan oleh iklim (curah hujan, kelembaban, suhu, udara, kecepatan angin, dsb), bahan bakar (vegetasi perusak), jenis tanah (mineral, gambut, batu bara), sedangkan faktor antropogenik diantaranya adalah pola bercocok tanam, pembukaan lahan kehutanan menjadi kawasan perkebunan (**Gambar 3.3**) dan peningkatan aksesibilitas. Dari tahun 2003 bencana kebakaran lahan dan hutan terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari

jumlah luasan hutan yang terbakar. Tahun 2003 lahan yang terbakar mencapai 48 hektar dan meningkat mencapai 346 hektar tahun 2004 dan 430,5 hektar tahun 2005. Pada tahun 2006 data sementara luasan kebakaran hutan sampai bulan Juli sebesar 168 hektar (**Gambar 3.4**). Biasanya puncak terjadinya kebakaran hutan adalah pada bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober di setiap tahunnya.



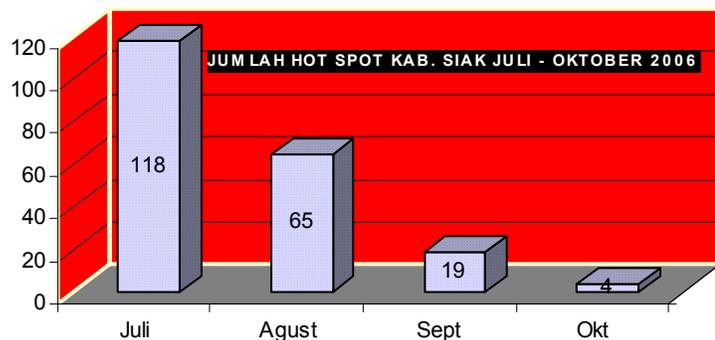
Gambar 3.3 Pembakaran Lahan Untuk Pembukaan Perkebunan

Salah satu upaya untuk penanganan potensi terjadinya bencana alam ini, Pemerintah Kabupaten Siak telah membentuk unit kerja penanganan kebakaran hutan dan lahan di tingkat kabupaten. Untuk pemantapan tugas telah di lakukan rapat dan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan/lahan dan terbentuk Satlak Dalkarhutla (Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan). Pembentukan Satlak Dalkarhutla tersebut adalah untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi terhadap kegiatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 3.4 Luasan Lahan & Hutan Yang Terbakar 2003-2006

Data kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Siak dapat diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kompetensi menangani bencana alam ini. Masing masing sumber menggunakan alat pemantau hot spot dengan tingkat sensitivitas berbeda. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA) Bapedalda Siak yang diperoleh dari pengamatan Satelit NOA-12, kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Siak sepanjang tahun 2006 sebanyak 206 titik api yang terjadi pada bulan Juli sampai Oktober, dengan jumlah titik api terbanyak terjadi pada bulan Juli yakni sebesar 118 titik api dan terendah pada bulan Oktober sebanyak 4 titik api (**Gambar 3.5**). Data penyebaran dan lokasi titik api berada di Kecamatan Kandis, Minas, Sungai Mandau, Bungaraya, Tualang, Dayun, Siak, Koto Gasib, Sungai Apit dan Kerinci Kanan (**Gambar 3.6-3.9**). dan **Tabel 3.1**.



Gambar 3.5 Grafik Jumlah Hot Spot Juli 2006 – Oktober 2006

Faktor Penyebab

Faktor penyebab (*pressure*) terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak dipengaruhi antara lain :

- Meningkatnya konversi lahan hutan ke bentuk penggunaan lain seperti pembukaan perkebunan dan pemukiman
- Sangat lemahnya penegakan hukum (low enforcement) dibidang lingkungan hidup.
- Masih lemahnya aspek kelembagaan dalam hal koordinasi antar sektoral dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dukungannya terhadap SATLAK DALKARHUTLA.



**BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**



Gambar 3. 6
PETA SEBARAN HOT SPOT BULAN JULI



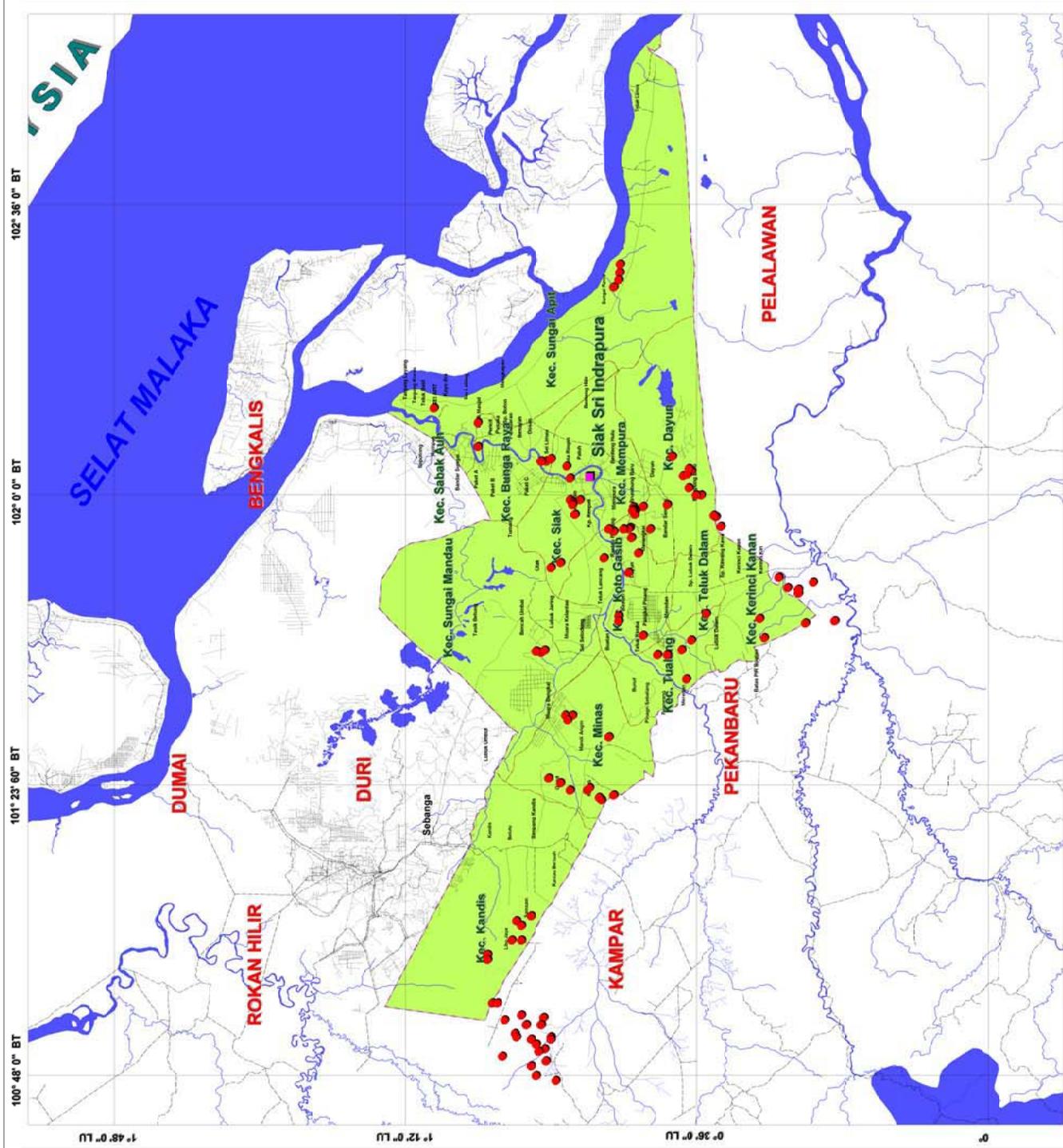
KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Ibukota kabupaten
- Titik Hotspot
- Perairan
- Kabupaten Siak



Sumber : Peta Digitasi BAKOSURTANAL
Software : MapInfo Professional 7.8

SARALISA CREW





**BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**

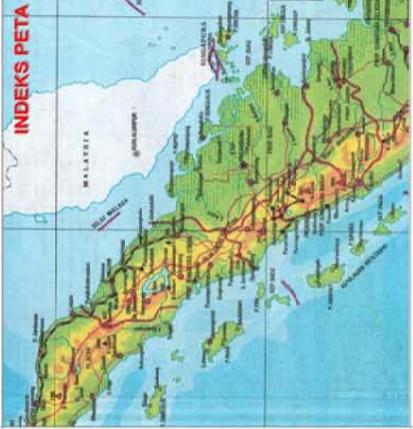


**Gambar 3.7
PETA SEBARAN HOTSPOT BULAN AGUSTUS**



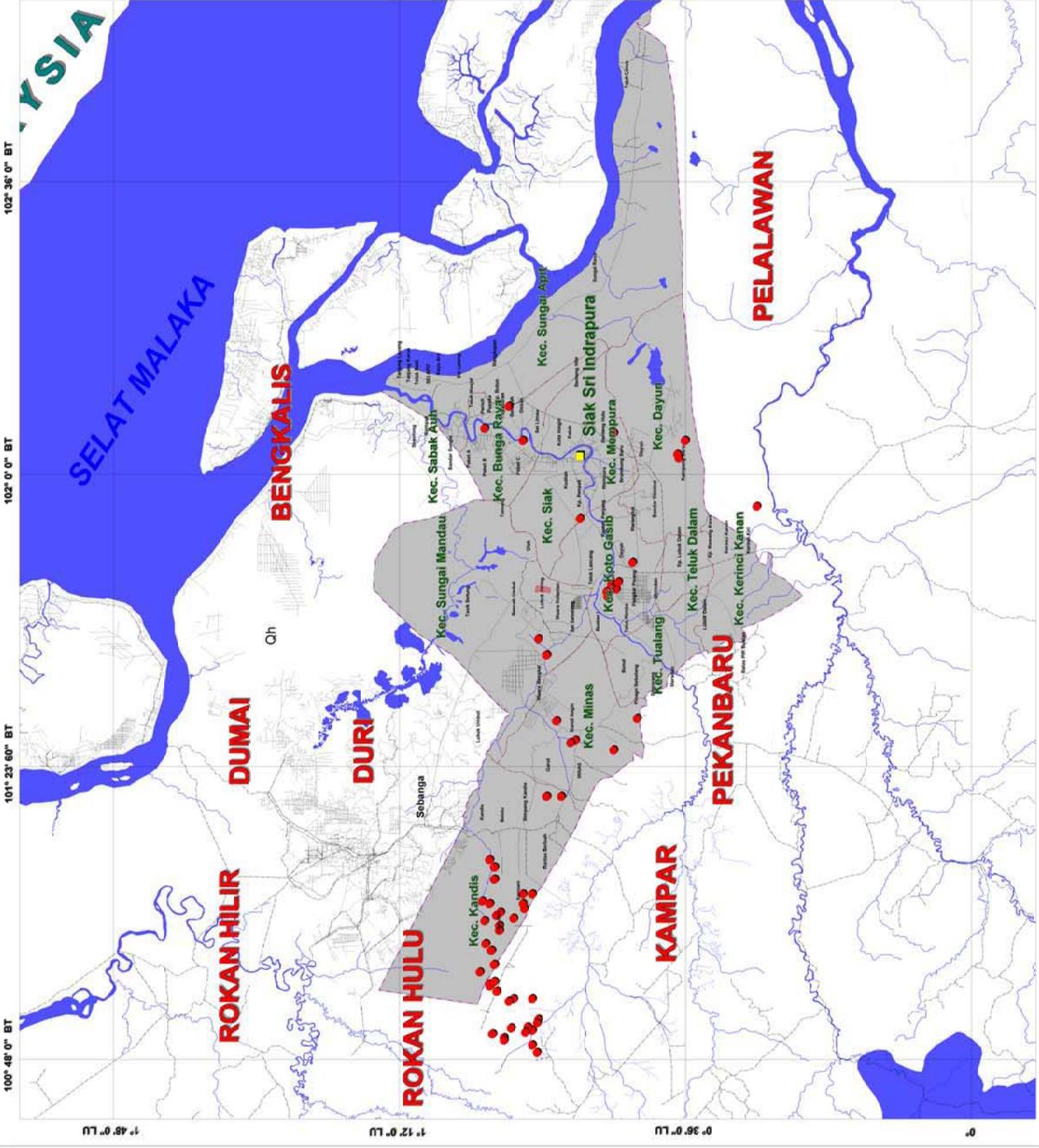
KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Ibukota kabupaten
- Titik Hotspot
- Perairan
- Kabupaten Siak



Sumber : Peta Digitasi BAKOSURTANAL
Software : MapInfo Professional 7.8

Suralia Crew





**BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**
BAPEDAL

Gambar 3. 8
PETA HOTSPOT BULAN SEPTEMBER

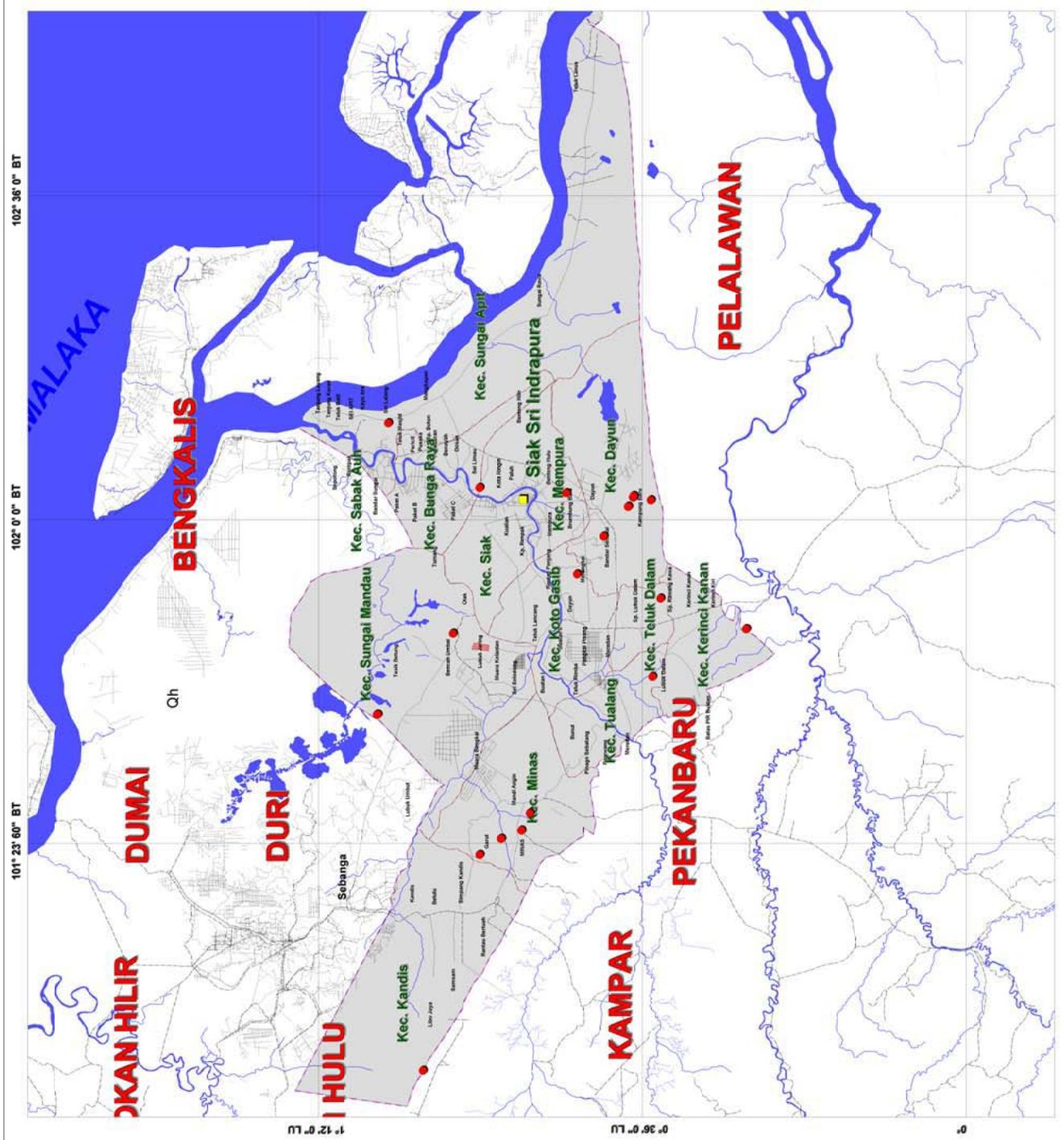


KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Ibukota kabupaten
- Titik Hotspot
- Perairan
- Kabupaten Siak



Sumber : Peta Digitasi BAKOSURTANAL
Software : MapInfo Professional 7.8



Tabel 3.1 Data Hot Spot Kabupaten Siak Bulan Juli Sampai Oktober 2006

Juli 2006

No.	Lokasi		Kecamatan	Lahan		Waktu Kejadian
	Desa			Pemilik	Kegunaan	
1.	Sam - Sam		Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH	1 Juli 2006
2.	Minas Barat		Minas	-	APL	
3.	Kerinci Kanan		Kerinci Kanan	PT Perkebunan V	Kebun	
4.	Pangkalan Pisang		Koto gasib	PT. Perkebunan V	Kebun	
5.	Pinang Sebatang		Tualang	PT. Aneka Inti Persada	Kebun	
6.	Pinang Sebatang		Tualang	PT. Aneka Inti Persada	Kebun	
7.	Pinang Sebatang		Tualang	PT. Pratama Riau	Kebun	
8.	Rantau Panjang		Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun	
9.	Jaya Pura		Bunga Raya	PT. Gelora Sawit Makmur	Kebun	
10.	Lubuk Umbut		Sungai Mandau	PT. Arara Abadi	HTI	
11.	Lubuk Umbuk		Sungai Mandau	PT. Arara Abadi	HTI	
12.	Pinang Sebatang		Tualang	PT. Aneka Inti Persada	Kebun	
13.	Pinang Sebatang		Tualang	PT. Aneka Inti Persada	Kebun	
14.	Rantau Panjang		Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun	
15.	Jaya Pura		Bunga Raya	PT. Glora Sawita Makmur	Kebun	
16.	Pinang Sebatang		Tualang	PT. Kimia Tirta Utama	Kebun	
17.	Kerinci Kanan		Kerinci kanan	PT. Meridan Sejati Surya	Kebun	
18.	Pangkalan Pisang		Koto Gasib	PT. Perkebunan II	Kebun	
19.	Bukit Agung		Kerinci Kanan	PT. Riau Muda Agrindo	Kebun	
20.	Pebadaran		Bunga Raya	PT. Trisetia Usaha Mandiri	Kebun	
21.	Bunga Raya		Bunga Raya	PT. Trisetia Usaha Mandiri	Kebun	
22.	Sengkemang		Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun	2 Juli 2006
23.	Langkai		Siak	PT. Gelora Sawita Makmur	Kebun	
24.	Pangkalan Makmur		Dayun	PT. RAPP	HTI	
25.	Muara Bangkal		Sungai Mandau	PT. Riau Abadi Lestari	HTI	
26.	Tumang		Siak	-	APL	
27.	Seminai		Kerinci Kanan	Kud Dayun Mas	Kebun	
28.	Rantau Panjang		Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun	
29.	Rantau Panjang		Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun	
30.	Jaya Pura		Bunga Raya	PT. Gelora Sawita Makmur	Kebun	
31.	Lubuk Umbut		Sungai Mandau	PT. Arara Abadi	HTI	

32.	Becah Umbai	Sungai Mandau	PT. RAPP	HTI
33.	Tanjung Kurus	Sungai Apit	Areal Masyarakat	APL
34.	Tumbang	Siak	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun
35.	UPT SPX II/Sukamulia	Dayun	PT. Inti Prona	HPH
36.	Rantau Panjang	Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun
37.	Rantau Panjang	Koto Gasib	PT. INTI PRONA	HPH
38.	Pangkalan Makmur	Dayun	PT. INTI PRONA	HPH
39.	Empang Baru	Kerinci Kanan	PT. INTI PRONA	HPH
40.	Sam-Sam	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
41.	Sam-Sam	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
42.	Jaya Pura	Bunga Raya	PT. Wira Karya Sakti	HPH
43.	Sam-Sam	Kandis	PT. Astra Agro Niaga	Kebun
44.	Rantau Panjang	Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun
45.	Rantau Panjang	Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun
46.	Langkai	Siak	PT. Gelora Sawita Makmur	Kebun
47.	Kerinci Kiri	Kerinci Kanan	PT. Raja Garuda Mas	Kebun
48.	Kumbaran Utama	Kerinci kanan	PT. Riau Muda Agrindo	Kebun
49.	Kerinci Kiri	Kerinci Kanan	PT. Riau Muda Agrindo	Kebun
50.	Tumbang	Siak	PT. Wana Subur Sawit Indah	Kebun
51.	Mandi Angin	Minas	Areal Masyarakat	APL
52.	Rantau Panjang	Koto Gasib	PT. Inti Prona	HPH
53.	Pangkalan Makmur	Dayun	PT. Inti Prona	HPH
54.	Pangkalan Makmur	Dayun	PT. Inti Prona	HPH
55.	Seminai	Kerinci Kanan	PT. Inti Prona	HPH
56.	Dayun	Dayun	PT. Kangli Lumber	HPH
57.	Sam-Sam	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
58.	Sam-Sam	Kandas	PT. Mandau Abadi	HPH
59.	Kandis	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
60.	Sam-Sam	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
61.	Sam-Sam	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
62.	Buna Bakti	Kerinci Kanan	BPP Sei Putih	Kebun
63.	Sam-Sam	Kandis	PT. Astra Agro Niaga	Kebun
64.	Buatan II	Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun
65.	Rantau Panjang	Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun
66.	Rantau Panjang	Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun
67.	Jaya Pura	Bunga Raya	PT. Gelora Sawita Makmur	Kebun
68.	Teluk Lancang	Mandau	PT. Kimia Tirta Utama	Kebun
69.	Empang Pandan	Kerinci Kanan	PT. Perkebunan II	Kebun

70.	Kerinci Kiri		Kerinci Kanan	PT. Pusaka Megah Bumi Nusntra	Kebun
71.	Kumbaran Utama		Kerinci Kanan	PT. Riau Muda Agrindo	Kebun
72.	Sam-Sam		Kandis	PT. Rokan Adi Makmur	Kebun
73.	Bukit Agung		Kerinci Kanan	PT. Tani Swadaya Perdana	Kebun
74.	Penyengat		Sungai Apit	PT. Triomas PDI	Kebun
75.	Sungai Apit		Sungai Apit	PT. TriSetia Usaha Mandiri	Kebun
76.	Penyengat		Sungai Apit	PT. Triomas FDI	Kebun 14 Juli 2006
77.	Sam-Sam		Kandis	PT. Insan Sastra Abadi	HTI
78.	Sam-Sam		Kandis	PT. Insan Sastra Abadi	HTI
79.	Pangkalan Makmur		Dayun	PT. RAPP	HTI
80.	Sam-Sam		Kandis	PT. Rokan Permai Timber	HTI
81.	UPT. XLXII/ SUKAMULIA		Dayun	Areal Masyarakat	APL
81.	Teluk Lancang		Sungai Mandau	PT. Pertamina Riau	Kebun 16 Juli 2006
83.	Sam-Sam		Kandis	PT. Instan Sastra Abadi	HTI
84.	Lubuk Umbut		Sungai Mandau	PT. Riau Abadi Lestari	HTI
85.	Sam-Sam		Kandis	PT. Rokan Permai Timber	HTI
86.	Kandis		Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
87.	Minas Barat		Minas	-	-
88.	Tasik Betung		Sungai Mandau	-	-
89.	Sam-Sam		Kandis	Koperasi	Kebun 17 Juli 2006
90.	Teluk Lancang		Sungai Mandau	PT. Priatama Riau	Kebun
91.	Sam-Sam		Kandis	PT. Insan Sastra Abadi	HTI
92.	Sam-Sam		Kandis	PT. Insan Sastra Abadi	HTI
93.	Sam-Sam		Kandis	PT. Rokan Permai Timber	HTI
94.	Sam-Sam		Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
95.	Sam-Sam		Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
96.	Sam-Sam		Kandis	PT. Insan Sastra Abadi	HTI 24 Juli 2006
97.	Sam-Sam		Kandis	PT. Insan Sastra Abadi	HTI
98.	Sam-Sam		Kandis	PT. Insan Sastra Abadi	HTI
99.	Rantau Panjang		Koto Gasib	PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun 25 Juli 2006
100.	Bencah Umbai		Sungai Mandau	PT. RAPP	HTI
101.	Kandis		Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
102.	Kandis		Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
103.	Lubuk Umbut		Sungai Mandau	-	APL
104.	Minas Barat		Sungai Mandau	-	APL

105	Tasik Betung	Sungai Mandau	-				APL		
106	Bandar Sungai	Sabak Auh	-				APL		
107	Pebadaran	Bunga Raya	-				APL		
108	Minas Barat	Minas	-				APL	26 Juli 2006	
109	Dayun	Dayun	PT. RAPP				HTI		
110	Minas Barat	Minas	-				APL		
111	Minas Timur	Minas	PT. ARARA ABADI				HTI		
112	Bencah Umbai	Sungai Mandau	PT. RAPP				HTI		
113	Benayah	Bunga Raya	PT. TRISETIA USAHA MANDIRI				Kebun		
114	Penyengat	Sungai Apit	TROMAS FDI				Kebun		
115	Penyengat	Sungai Apit	TROMAS FDI				HPH		
116	Penyengat	Sungai Apit	TROMAS FDI				HPH		
117	Penyengat	Sungai Apit	TROMAS FDI				HPH		
118	Penyengat	Sungai Apit	TROMAS FDI				HPH		

Agustus 2006

No.	Lokasi		Kecamatan	Lahan		Waktu Kejadian	
	Desa			Pemilik	Kegunaan		
1.	Sam-Sam		Kandis		PT. Insan Sastra Abadi	HTI	2 Agust 2006
2.	Sam-Sam		Kandis		PT. Mandau Abadi	Eks. HPH	3 Agust 2006
3.	Dusun Pusaka		Sungai Apit			APL	
4.	Buatan I		Koto Gasib		PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun	6 Agust 2006
5.	Sam - Sam		Kandis		PT. Ekadura Indonesia	Kebun	
6.	Langkai		Siak		PT. Gelora Sawita Makmur	Kebun	
7.	Teluk Lancang		Sungai Mandau		PT. Priatama Riau	Kebun	
8.	Lubuk Umbut		Sungai Mandau		PT. Arara Abadi	HTI	
9.	Minas Barat		Minas		PT. Arara Abadi	HTI	
10.	Beteng Hulu		Merpura		PT. Ekawana Lestari Darma	HTI	
11.	Sam-Sam		Kandis		PT. Insan Sastra Abadi	HTI	
12.	Pangkalan Makmur		Dayun		PT. RAPP	HTI	
13.	Kandis		Kandis		PT. Rokan Permai Timber	HTI	
14.	Sam-Sam		Kandis		PT. Rokan Permai Timber	HTI	
15.	Kandis		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	

16.	Belutu		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	
17.	Kandis		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	
18.	Sam-Sam		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	
19.	Sam-Sam		Kandis		-	APL	
20.	Sam-Sam		Kandis		-	APL	
21.	Mandi Angin		Minas		-	APL	
22.	Pangkalan Makmur		Dayun		-	APL	
23.	Pangkalan Makmur		Dayun		PT. Kangli Lumber	HPH	7 Agust 2006
24.	Sam-Sam		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	
25.	Belutu		Kandis		PT. Rokan Permai Timber	HPH	
26.	Mandi Angin		Minas		PT. Ivomas Tunggal	Kebun	10 Agust 2006
27.	Teluk Lancang		Sungai Mandau		PT. Priatama Riau	Kebun	
28.	Sam-Sam		Kandis		PT. Rokan Adi Makmur	Kebun	
29.	Teluk Mesjid		Sungai Apit		PT. TriSetia Usaha Mandiri	Kebun	
30.	Sam-Sam		Kandis		PT. Insan Sastra Abadi	HTI	
31.	Sam-Sam		Kandis		PT. Insan Sastra Abadi	HTI	
32.	Sam-Sam		Kandis		PT. Insan Sastra Abadi	HTI	
33.	Bencah Umbai		Sungai Mandau		PT. RAPP	HTI	
34.	Kandis		Kandis		PT. Mandau Abadi	EKS. HPH	
35.	Sam-Sam		Kandis		PT. Rokan Permai Timber	EKS. HPH	
36.	Sam-Sam		Kandis		-	APL	
37.	Bandar Angin		Sabak Auh		-	APL	
38.	Teluk Lancang		Sungai Mandau		PT. Priatama Riau	Kebun	11 Agust 2006
39.	Minas Timur		Minas		-	APL	13 Agust 2006
40.	Sam-Sam		Kandis		-	Koperasi	
41.	Teluk Lancang		Sungai Mandau		PT. Priatama Riau	Kebun	14 Agust 2006
42.	Sam-Sam		Kandis		PT. Rokan Abadi Makmur	Kebun	
43.	Teluk Lancang		Sungai Mandau		PT. Kimia Tirta Utama	Kebun	15 Agust 2006
44.	Sam-Sam		Kandis		PT. Insan Sastra Abadi	HTI	
45.	Sam-Sam		Kandis		PT. Insan Sastra Abadi	HTI	
46.	Kandis		Kandis		PT. Mandau Abadi	Eks. HPH	21 Agust 2006
47.	Sam-Sam		Kandis		PT. Rokan Permai Timber	HTI	
48.	Sam-sam		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	22 Agust 2006
49.	Belutu		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	
50.	Kandis		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	
51.	Sam-Sam		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	
52.	Sam-Sam		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	
53.	Sam-Sam		Kandis		PT. Mandau Abadi	HPH	

54.	Sam-Sam	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
55.	Sam-Sam	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
56.	Sam-Sam	Kandis	PT. Mandau Abadi	HPH
57.	Sam-Sam	Kandis	PT. Rokan Permai Timber	HPH
58.	Sam-Sam	Kandis	PT. Rokan Permai Timber	HPH
59.	Sam-Sam	Kandis	PT. Rokan Permai Timber	HPH
60.	Sam-Sam	Kandis	PT. Rokan Permai Timber	HPH
61.	Minas Barat	Minas	PT. Arara Abadi	HTI
62.	UPT. XII. SP. X1/ BUANA MAKMUR	Dayun	PT. RAPP	HTI
63.	Sam-Sam	Kandis	PT. Rokan Adi Makmur	Kebun
64.	Muara Bungkal	Sungai Mandau	Areal Masyarakat	-
65.	Minas Timur	Minas	Areal Masyarakat	-

September 2006

No.	Lokasi		Lahan	Kegunaan	Waktu Kejadian
	Desa	Kecamatan			
1.	Benayah Tasik Betung Lubuk Umbut Tasik Betung Pangkalan Makmur	Bunga Raya Sungai Mandau Sungai mandau Sungai Mandau Dayun	PT. TRISETIA USAHA MANDIRI PT. ARARA ABADI HTI	Kebun HTI APL APL APL	19 Sep 2006
2.	Sungai Kayu Ara Sam-Sam Pangkalan Makmur Minas Barat Minas Barat Kerinci Kiri Sungai Mempura	Sungai Apit Kandis Dayun Minas Minas Kerinci Kanan Merpura	PT. TRISETIA USAHA MANDIRI PT. Insan Satra Abadi PT. RAPP - - -	Kebun HTI HTI - - - -	20 Sep 2006
3.	Pangkalan Makmur Rantau Panjang Merangkai UPT XII.SP.XII/BUANA MAKMUR Kuala Gasib Rawang Kao	Koto Gasib Dayun Dayu Koto Gasib Lubuk Dalam	RAPP PT. Duta Swakarsa Indah PT. Indo Sawit Subur PT. RAPP PT. Aneka Inti Persada PT. Perkebunan V	HTI Kebun Kebun HTI Kebun Kebun	21 Sep 2006 24 Sep 2006
4.	Lubuk Umbut	Sungai Mandau	Areal Masyarakat	-	28 Sep 2006

--	--	--	--	--	--

Oktober 2006

No.	Lokasi		Kecamatan	Lahan		Waktu Kejadian
	Desa			Pemilik	Kegunaan	
1.	Muara kelantan Tasik Betung Langkai Rantau Panjang		Sungai Mandau Sungai Mandau Siak Koto Gasib	PT. Surya Inti Sari Surya - PT. Gelora Sawita Makmur PT. Duta Swakarsa Indah	Kebun APL Kebun Kebun	5 Okt 2006

- Belum terbangunnya sistem informasi kebakaran hutan dan lahan yang memadai dan representatif, sehingga data yang dihasilkan kurang akurat dan kurang up to date untuk mendukung tindakan di lapangan dalam hal informasi.
- Kemampuan Aparatur Pemerintah masing - masing instansi terkait dalam mengkoordinasikan bencana kebakaran hutan dan lahan masih lemah.
- Minimnya dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga fasilitas dan sarana pemadaman api kurang memadai.
- Kurangnya kesadaran perusahaan besar dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.
- Belum adanya alternatif penyiapan lahan (*Land Clearing*) yang relatif lebih murah dibandingkan dengan penyiangan lahan dengan cara membakar.
- Keterbatasan sarana, prasarana dan dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terprogram.
- Sistem penerapan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan di bidang kebakaran hutan dan lahan belum optimal diterapkan.
- Masih rendahnya sistem informasi (peringatan dini) tentang kebakaran hutan dan lahan.
- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Kurangnya pengawasan di areal HTI dan perkebunan besar swasta terhadap aktivitas penyiapan lahan.

Dampak

Dampak kebakaran lahan dan hutan terhadap ekosistem lingkungan (**state**), antara lain :

- Terganggunya kegiatan penerbangan, lalu lintas pelayaran sebagai akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan sampai ke negara tetangga (Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam).
- Timbulnya kerugian ekonomi yang besar di berbagai sektor pembangunan.
- Timbulnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) bagi masyarakat.
- Terganggunya aktivitas pendidikan.
- Punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lahan kebakaran.
- Terganggunya produksi pertanian akibat lemahnya intensitas matahari untuk fotosintesa.

- ➔ Terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara.
- ➔ Jika tidak ada antisipasi dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir.

● Penanggulangan

Untuk mengatasi masalah kebakaran hutan maka perlu langkah penanggulangan (**respon**) berikut ini.

- ➔ Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau siapapun (*Law Enforcement*).
- ➔ Membangun sistem informasi kebakaran hutan dan lahan yang representatif yang dapat diakses masyarakat, melalui Sistem Informasi Geografi (SIG).
- ➔ Sosialisasi UU Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- ➔ Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik tentang kebakaran hutan dan lahan.
- ➔ Menyediakan alokasi dana (dana kontigensi) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai cadangan dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, termasuk pencadangan untuk hujan buatan.
- ➔ Meningkatkan koordinasi antar daerah (kabupaten/kota) untuk penanggulangan kebakaran, melalui penyelenggaraan rapat koordinasi.
- ➔ Mengaktifkan dan memfungsikan Polisi Kehutanan (Polhut) dan Satuan Petugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (*Satlak Dalkarhutla*).
- ➔ Meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan penyiangan lahan oleh HPHTI dan Perkebunan besar swasta.
- ➔ Mewajibkan memasang papan peringatan kepada pengusaha pada daerah yang rawan kebakaran.
- ➔ Menyiapkan perlengkapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- ➔ Mengupayakan pengembangan sistem deteksi dini yang didukung dengan peningkatan kelancaran penyampaian informasi tepat waktu ke daerah, bahkan sampai ke lokasi kebakaran.
- ➔ Peningkatan kemampuan dan keterampilan personil petugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui sistem diklat secara periodik dan berjenjang.

Kendala

Belum maksimalnya hasil yang dicapai dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain :

- ➔ Kondisi lahan Kabupaten Siak yang sebagian besar bergambut, memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam hal pemadaman api.
- ➔ Posisi geografis Kabupaten Siak yang memanjang sehingga sulit untuk menjangkau lokasi tertentu dengan sarana yang terbatas
- ➔ Aksesibilitas yang sulit untuk mencapai lokasi titik api
- ➔ Keterbatasan dalam anggaran operasional di lapangan dan fasilitas peralatan pemadaman api yang dimiliki.
- ➔ Belum jelasnya acuan teknis kebijakan Zero Burning dalam pelaksanaan pembukaan lahan.
- ➔ Pola pembukaan masyarakat tani yang melakukan pembakaran sisa kayu / tebangan.
- ➔ Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya melakukan pembakaran hutan / lahan .

3.1.2 Illegal Logging

Salah satu bentuk kejahatan lingkungan kehutanan yang sangat kompleks adalah aktivitas illegal logging. Kejahatan ini sangat merugikan negara dalam jumlah besar, hal ini juga berarti kejahatan ini telah memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dalam jumlah besar pula. Aktivitas illegal logging melibatkan banyak elemen masyarakat dengan berbagai kepentingan, mulai dari masyarakat bawah sampai kepada pejabat tingkat atas, pengusaha, termasuk aparat penegak hukum, baik kejaksanaan, kepolisian dan militer, meskipun dikatakan dalam kapasitasnya sebagai oknum dari institusi yang menaungi para oknum tersebut. Kejahatan ini telah berlangsung sejak lama dan berlangsung terus menerus termasuk di Kabupaten Siak **(Tabel 3.2)** serta telah menimbulkan kerugian dalam jumlah besar baik secara ekonomi terlebih lagi kerugian secara ekologis. Kegiatan pencurian kayu tidak hanya dilakukan pada lahan kawasan hutan produksi, tetapi juga sudah melebar, merambah ke kawasan konservasi, seperti hutan lindung dan kawasan suaka marga satwa. Setiap tahunnya tidak kurang 30 juta M³ kayu yang ditebang secara illegal.

Disamping disebabkan kegiatan illegal logging, maka kegiatan eksploitasi hutan secara legal seperti adanya kegiatan usaha HPH dan pembukaan lahan HTI **(Gambar 3.10)** turut memperparah kerusakan sumberdaya hutan. Cadangan hutan yang telah menipis



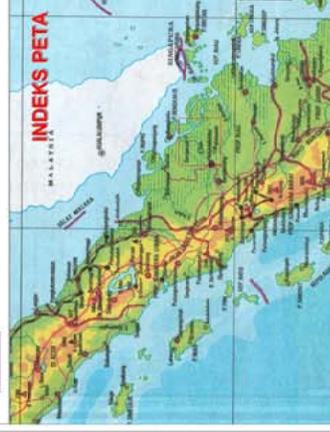
**BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**
BAPEDAL

Gambar 3.10
PETA SEBARAN HPH DAN HTI KAB. STAK



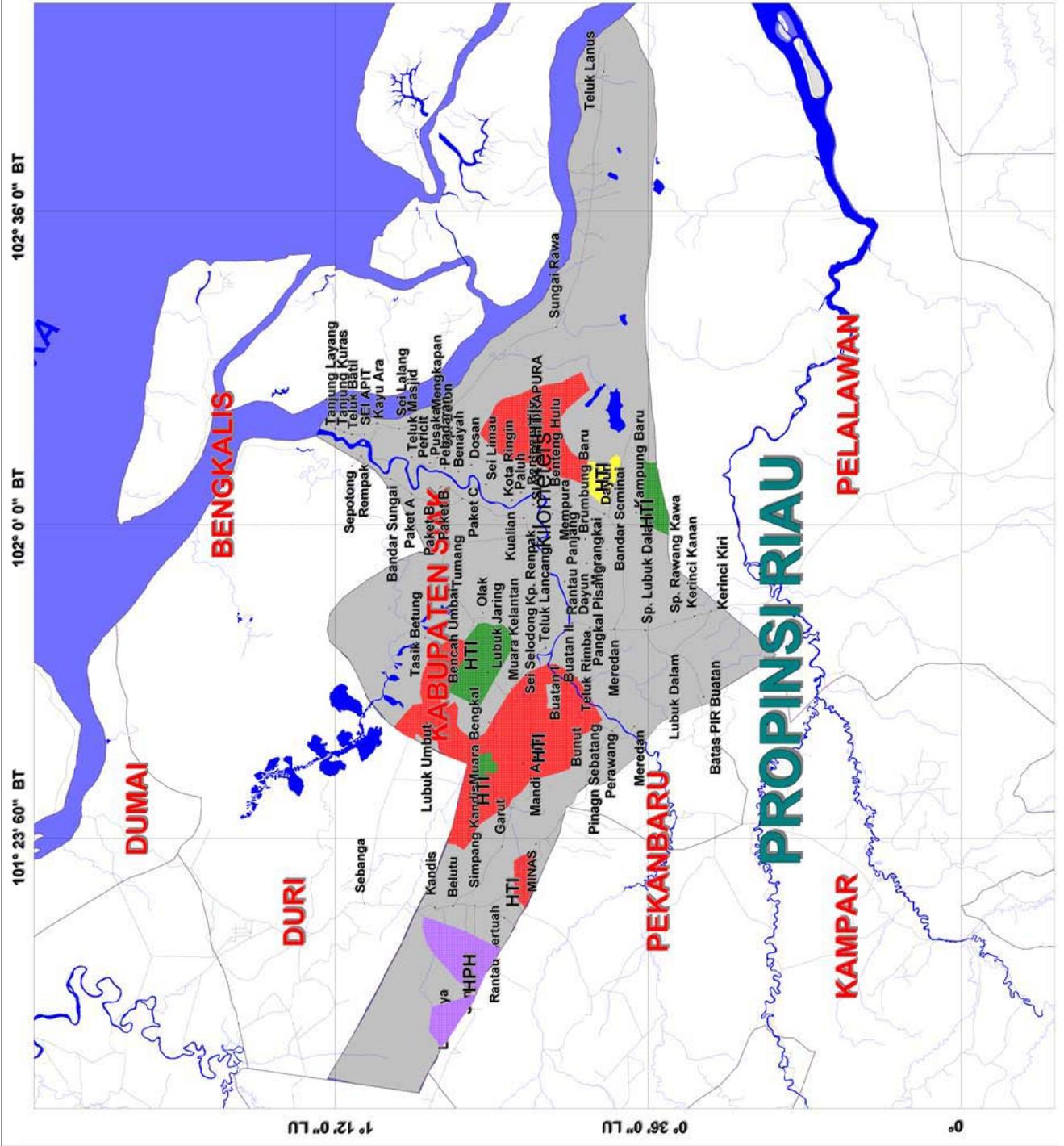
KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Ibukota kabupaten
- Desa/Kelurahan
- Perairan
- HTI PT. ARARA ABADI
- HTI PT. RAPP
- HTI PT. EKA WANA LESTARI
- HPH PT. MANDAU ABADI



Sumber : Peta Digitasi BAKOSURTANAL
Software : MapInfo Professional 7.8

SARALISA CREW

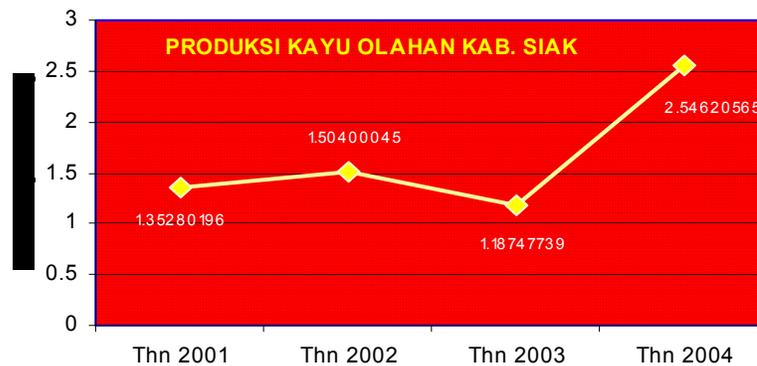


Tabel 3.2 Data Ilegal Logging Kabupaten Siak

No.	Jenis Kayu	Volume	Lokasi	Waktu
1.	Kayu Kempas	1.037 keping/ 125.9934 m ³	Desa Tumang	19 Juni 2006
2.	Kayu Meranti	28 btg	Sungai Belat	8 Des 2005
3.	Kayu Afkir	22 btg	Sungai Belat	8 Des 2005
4.	Campuran	11 btg	Sungai Belat	8 Des 2005
5.		24.445 keping/ 71,9833 m ³	Dayun	2005
6.	1 Rakit kayu log Meranti dan campuran	527 btg/ 550,02 m ³		17 Maret 2004
7.	Kayu log Meranti dan campuran	1.848 btg/ 1.248,57 m ³		27 Jan 2004
8.	1 Rakit kayu log Meranti dan campuran			25 Nov 2004
9.	Kayu log kempas campuran	19 tual	Sungai Pinang	30 Maret 2004
10.		15.425 tual/ 1.404.1436 m ³	Desa Tumang	5 Jan 2004
11.	Kayu Log Kempas	27.318 tual	Desa Tumang	6 Jan 2004
12.		21.418 keping	Desa Tumang	8 Mar 2004
13.	Kayu log kempas	74 tual	Jl. Raya Perawang Buton Km 70 Dayun	18 Des 2003
14.	Kayu Log Kempas	11 truck	Perawang	2003
15.	Kayu Log Kempas	38 btg/tual	Jl. Raya Perawang Buton	23 Des 2004
16.	Balok tim Kempas	4 truck/ 16 m ³	Jl. Raya Perawang Buton	23 Des 2004

Sumber : Polhut Siak, 2006

terus dieksploitasi jauh melebihi maksimum sustainability yield (MSY), sehingga terjadi degradasi lingkungan. Eksploitasi kayu hutan secara legal di Kabupaten Siak untuk jenis kayu olahan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 jumlah produksi



Gambar 3.11 Produksi Kayu Olahan Kabupaten Siak

Tabel 3.3 Jumlah Produksi Kayu Olahan Kab. Siak

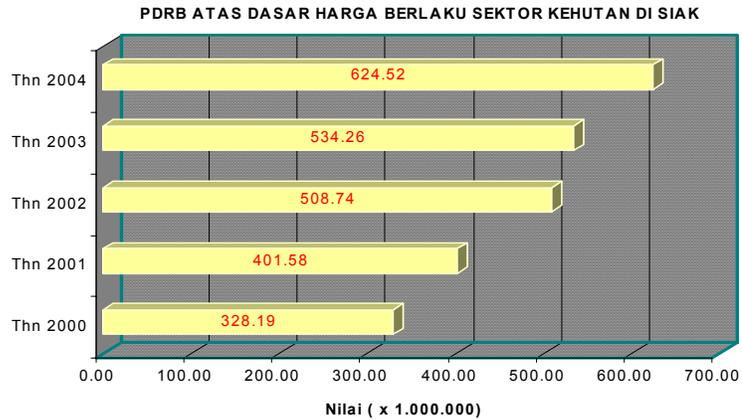
No	Jenis Kayu	Produksi (M ³)			
		2001	2002	2003	2004
1.	Kelompok Indah	202,49	2.378,96	-	-
2.	Kelompok Meranti	16.897	20.440,90	41.051,99	37.019,04
3.	Kelompok Campuran	86.265,03	166.594, 66	159.868, 61	96.095,07
4.	Kelompok Kayu Bulat Kecil	115.153,90	101.755,30	66.704,96	296.622,25
5.	Kelompok Bhn Baku Serpih	606.795,71	869.041, 88	478.858,16	1.283.138,43
6.	Kelompok Akasia	527.487,83	343.768,75	440.993,67	863.290,86
	Jumlah	13.52.801,96	1.504.000,4	1.187.477,3	25.46.205,6

kayu olahan tercatat 1.352.801,96 m³ sedangkan pada tahun 2004 tercatat sebesar 2.546.205,65 m³ (**Gambar 3.11**), atau meningkat hampir dua kali lipat. Produksi itu terdiri dari kayu Kelompok Indah, Kelompok Meranti, Kelompok Campuran, Kelompok Kayu Bulat Kecil, Kelompok Bahan Baku Serpih, Kelompok Akasia (**Tabel 3.3**).

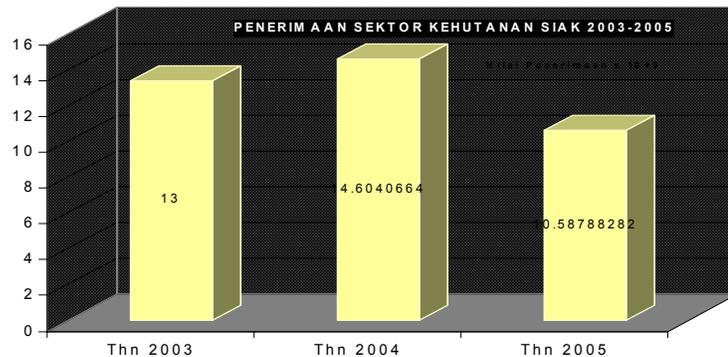
Prediksi yang menyatakan bahwa pada tahun 2005 hutan di Sumatera akan habis serta menyusul tahun 2010 hal yang serupa terjadi di hutan Kalimantan, ternyata sudah mulai menjadi kenyataan. Salah satu buktinya adalah banyaknya pabrik pabrik industri kayu lapis yang sudah menutup usahanya karena sudah tidak tersedianya bahan baku berupa kayu alam dengan ukuran yang dibutuhkan. Beberapa pabrik yang masih menjalankan usaha sudah mengalami penurunan produksi yang signifikan. Pabrik yang masih beroperasi tersebut terpaksa mendatangkan bahan bakunya dari luar Sumatera, seperti dari Kalimantan dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Keinginan investor untuk berinvestasi di sektor perkebunan turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan illegal logging. Sebagian investor tersebut hanya menjadikan rencana usaha perkebunan sebagai kedok untuk melakukan illegal logging, disamping banyaknya terjadi pemalsuan dokumen perkebunan.

Namun disisi lain, sektor kehutanan juga memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Siak. Dari tahun 2001 sampai tahun 2004 PDRB dari sektor usaha kehutanan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 nilai PDRB sektor usaha kehutanan tercatat 328.185,72 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2004 menjadi 624.524,41 juta rupiah (**Gambar 3.12**). Dari segi penerimaan, sektor kehutanan juga telah memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Meskipun redistribusi hasil hutan mengalami penurunan tetapi sektor ini tetap memberikan nilai yang berarti. Pada tahun 2003 penerimaan redistribusi sebesar Rp. 13.387.546.093 melampaui dari target penerimaan sebesar Rp. 11.000.000.000. sedangkan pada tahun 2005 menurun menjadi Rp. 10.587.882.824. Nilai penerimaan ini tidak mencapai dari target yang diharapkan sebesar Rp. 12.500.000.000 (**Gambar 3.13**). Penurunan penerimaan ini bertolak belakang dari peningkatan PDRB di sektor kehutanan. Hal ini menunjukkan salah satu indikasi sebab terjadinya penurunan penerimaan ini adalah makin maraknya kejahatan illegal logging. Dimana praktek kejahatan ini tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.



Gambar 3.12 PDRB Atas Harga Berlaku Sektor Kehutanan Kab. Siak



Gambar 3.13 Penerimaan sektor Kehutanan Kabupaten Siak

Kegiatan eksploitasi kayu alam di hutan termasuk kegiatan illegal logging (**Gambar 3.14**), juga mengakibatkan perubahan penutupan lahan yang berakibat terbukanya lahan semakin besar. Hilangnya pohon besar mengakibatkan tidak adanya penutupan dari atas sehingga lahan semak dibawahnya akan terkena langsung sinar matahari yang dapat memicu pertumbuhan semak belukar dengan cepat. Pembuatan kanal sebagai media transportasi kayu mengakibatkan lahan menjadi kering. Kondisi ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan sebagai aktivitas budidaya dengan cara membakar. Dengan demikian terjadinya deforestasi di kawasan hutan semakin cepat, dimana disamping disebabkan oleh aktivitas kehutanan legal, adanya kebakaran hutan dan illegal logging akan memicu terjadinya hal tersebut.



Gambar 3. 14 Aktivitas Illegal Logging di Siak

Faktor Penyebab

Faktor penyebab (*pressure*) terjadinya illegal logging di Kabupaten Siak dipengaruhi antara lain :

- ➔ Harapan keuntungan ekonomi yang sangat besar dari pelaku kejahatan kegiatan illegal logging
- ➔ Masih tetapnya lemahnya penegakan hukum dan kurangnya political wil pemerintah.
- ➔ Belum tegasnya kebijakan kehutanan di daerah sehubungan dengan konsep otonomi daerah dan perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang belum sepenuhnya dipahami, membingungkan berbagai stake holder. Kebingungan ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membuat kebijakan sendiri.
- ➔ Kesalahan pengelolaan kebijakan yang memberikan *privilege* kepada kelompok usaha tertentu dengan memberikan izin HPH, IPK, IPHH dan izin lainnya yang disinyalir melegalkan penebangan liar di blok tebangan, pada masa orde baru

- Kompleksnya dan terorganisirnya kejahatan *Illegal logging* dan *illegal cutting* dengan melibatkan berbagai kepentingan seperti anggota masyarakat, oknum aparat sipil dan non sipil dari pusat sampai ke daerah.
- Kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang menjadikan mereka tidak menyadari dijadikan alat bagi para pemilik modal.
- Supremasi hukum dibidang kehutanan antara lain berupa penerapan UU Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 belum berjalan sebagaimana mestinya.
- Kurang adanya dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional untuk melaksanakan operasi *preventif* dan *represif* yang berkesinambungan.
- Kurang cermatnya pengawasan pengembangan usaha perkebunan yang sering menjadi kambing hitam kegiatan illegal logging.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional kesadaran perusahaan HPH/HPHTI dalam menjaga kelestarian hutan di wilayah kerjanya dan kurangnya penerapan AMDAL.
- Kurangnya kesamaan persepsi tentang kebijakan tata ruang antar instansi vertikal maupun horizontal.
- Arahan kebijakan tata ruang dan pengembangan wilayah sesuai kepentingan pihak tertentu.

Dampak

Dampak yang ditimbulkan (**state**), akibat kegiatan illegal logging antara lain :

- Meningkatnya proses degradasi lingkungan hutan, terlebih lagi illegal logging dikawasan konservasi seperti hutan, akibat hilangnya vegetasi dan dampak pembuatan kanal.
- Meningkatnya luasan lahan kritis, erosi dan sedimentasi serta permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan masyarakat.
- Konversi lahan kawasan hutan menjadi semak belukar dan lahan tidak produktif.
- Mudahnya terjadi banjir disebabkan tidak adanya lagi penyangga air terutama pada daerah tangkapan air (*Catchment Area*).
- Punahnya/hilangnya kawasan lindung dan konservasi. Kawasan konservasi sebagai kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi komunitas hayati (flora dan fauna serta ekosistemnya).
- Rusaknya prasarana jalan karena melebihi tonase jalan.

- ➔ Kerugian negara secara finansial atas pengambilan kayu secara ilegal dan biaya yang diperlukan untuk rehabilitasinya tinggi.
- ➔ Hilangnya mata pencaharian masyarakat hutan akibat monopoli pemilik modal dalam eksploitasi sumberdaya hutan yang berdampak pada kecemburuan sosial.

Penanggulangan

Untuk mengatasi masalah illegal logging maka perlu langkah penanggulangan (**respon**) berikut ini.

- ➔ Intensifikasi penegakan hukum kehutanan secara konsisten ditingkat Kabupaten Siak
- ➔ Pemberian sanksi pemecatan dan hukuman penjara terhadap aparat kehutanan yang terlibat illegal logging
- ➔ Membangun komitmen nasional pemberantasan illegal logging pada semua level sipil dan non sipil dari pusat sampai ke daerah.
- ➔ Sosialisasi pemantapan konsep otonomi (desentralisasi) di bidang kebijakan sektor kehutanan agar tidak adanya dualisme kebijakan pusat dan daerah.
- ➔ Pembentukan Satgas operasi *represif* (tindakan fisik) terhadap para pelaku pelanggaran dilapangan, dan Satgas administratif di instansi teknis.
- ➔ Mengadakan operasi terpadu penanggulangan illegal logging oleh aparat pemerintah, TNI/POLRI pada level Kabupaten/Kota dalam memberantas illegal logging dan memonitor jalur penggunaan bahan kayu (*saw mill*) yang beroperasi secara illegal, termasuk pada daerah rawan penyeludupan.
- ➔ Pembinaan masyarakat sekitar hutan dengan pemberian solusi alternatif lapangan kerja dan usaha yang cocok bagi mereka dengan memanfaatkan hutan secara lestari sebagai upaya pokok pemberantasan illegal logging.
- ➔ Memantapkan kinerja polisi hutan (jagawana).
- ➔ Dana hasil lelang kayu sitaan dan denda pelanggaran kehutanan dikembalikan ke daerah untuk biaya konservasi dan operasional kegiatan pengamanan hutan serta insentif bagi petugas dinas/instansi terkait.
- ➔ Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengamanan hutan (kapal tarik, kapal patroli cepat, speed boat, mobil patroli, senjata api dan sebagainya).
- ➔ Melakukan rehabilitasi kawasan hutan dengan dana reboisasi.
- ➔ Melakukan sosialisasi dan penyebaran brosur /pamflet/ leaflet kepada seluruh lapisan masyarakat dan pengusaha kayu tentang dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas *illegal logging*.

- ➔ Mengupayakan dana reboisasi dan dana kompensasi dari luar negeri untuk kegiatan rehabilitasi dan reboisasi dengan sistem multi culture.
- ➔ Perbaiki pengelolaan kehutanan melalui perbaikan manajemen, sosialisasi dan action plan.

Kendala

Belum maksimalnya hasil yang dicapai dalam mengatasi masalah illegal logging disebabkan beberapa kendala antara lain seperti berikut ini.

- ➔ Keterlibatan aparat kehutanan dalam kejahatan illegal logging
- ➔ Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan illegal logging ini.
- ➔ Belum adanya dukungan penuh dari masyarakat sekitar hutan atas informasi kegiatan illegal logging.
- ➔ Tidak berjalannya low enforcement.
- ➔ Belum berhasilnya pembinaan masyarakat hutan sehingga belum diperolehnya mata pencaharian alternatif.

3.1.3 Pencemaran Sungai Siak

Sungai Siak merupakan satu dari empat sungai besar di Provinsi Riau. Sungai ini memiliki panjang sekitar 345 km, lebar 75-150 meter dan kedalaman rata-rata 5-28 meter. Sungai Siak memiliki 3 anak sungai utama yaitu Tapung kiri, Tapung kanan dan keduanya bermuara menjadi up stream, serta Sungai Mandau. Kondisi fisik lingkungan Sungai Siak berkelok – kelok, sempadan sungainya ditumbuhi tumbuhan lokal seperti pandan, rengas, beringin, rotan, kumpai, bambu, meranti, sialang dan tumbuhan lokal lainnya. Karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Siak sebagian besar merupakan kawasan bergambut dengan topografi yang relatif landai. Sesuai dengan kondisi lahan DAS nya, rona lingkungan alami Sungai Siak berwarna coklat kemerahan dengan pH berkisar antara 4 sampai 5 dan DO relative rendah pula. Sungai Siak memiliki debit air maksimum rata- rata 209 m³ perdetik sedangkan debit minimum rata-rata 5,32 m³ perdetik. Secara astronomis letak DAS Siak kurang lebih antara 100° 28 BT sampai dengan 102° 12 BT dan antara 0° 20' LU sampai dengan 1° 16' LU.

Secara administratif DAS Siak mencakup lima kabupaten kota yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis. Adapun luas daerah tangkapan (catchment area) DAS Siak berdasarkan pengukuran planimetris (peta) dengan peta dasar 1 : 250.000 yang dikeluarkan oleh

Badan Planologi Kehutanan adalah 1.132.776,04 Ha dengan perincian luas perwilayah administrasi adalah seperti tersaji pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Luas Wilayah Administrasi dalam DAS Siak

No.	Kabupaten / Kota	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1.	Kab. Bengkalis	92.355,42	8,1
2.	Kab. Kampar	329.861,51	29,1
3.	Kab. Rokan Hulu	148.033,30	13,0
4.	Kab. Siak	496.871,97	43,8
5.	Kab. Pekanbaru	65.953,84	5,8
	Jumlah	1.132.776,04	100,00

Keberadaan sungai Siak dengan karakteristik yang khas, selain memiliki nilai ekologis dan ekonomis juga memiliki nilai – nilai historis, sosial dan budaya serta estetika yang penting, khususnya masyarakat Riau. Ketergantungan masyarakat terhadap Sungai Siak sangat tinggi terutama sebelum berkembangnya sarana angkutan darat. Selain itu Sungai Siak juga berfungsi sebagai :

- Sumber air minum dan keperluan rumah tangga bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Siak serta sumber air baku PDAM Kota Pekanbaru.
- Sebagai sumber air bagi proses produksi industri yang ada di sepanjang Sungai Siak.
- Sebagai prasarana transportasi air yang penting baik untuk penumpang maupun barang, karena dapat dilayani oleh kapal dengan bobot 5000 DWT
- Sumber kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Siak yang mata pencariannya sebagai nelayan tradisional.

Masalah pencemaran air merupakan isu penting yang banyak terjadi hampir disetiap perairan di Riau, termasuk perairan Sungai Siak. Terjadinya pencemaran di sungai umumnya disebabkan oleh adanya masukan limbah ke badan air sungai. Limbah tersebut meliputi limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah perkebunan (**Gambar 3.15**). Sebagai sebuah ekosistem terbuka, maka sungai juga memiliki karakteristik sama dengan ekosistem terbuka lainnya yakni bersifat common property dan open acces. Artinya sungai merupakan kepemilikan umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Setiap pihak dapat mengakses dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada pada kawasannya, dan berawal dari karakteristik inilah masalah pencemaran sungai menjadi sesuatu yang sulit untuk dikelola.



Gambar 3.15 Potensi Pencemar Sei. Siak (Perumahan, Industri, Perkebunan)

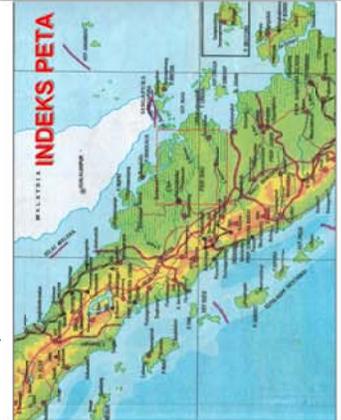
Kebijakan pengelolaan Sungai Siak sampai saat ini belum lagi menampilkan hasil yang menggembirakan. Degradasi terhadap kualitas air Sungai Siak, kian hari kian semakin parah. Berbagai upaya sudah dilakukan, baik ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Riau, termasuk Kabupaten Siak. Upaya yang dilakukan kebanyakan baru sebatas mencari formulasi terbaik untuk melakukan pengelolaan Sungai Siak yang komprehensif pada berbagai seminar dan lokakarya. Berbagai kegiatan penelitian telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun hasil penelitian tersebut belum dapat ditindaklanjuti sebagai upaya penanggulangan masalah pencemaran di Sungai Siak. Pembentukan Forum DAS Siak, maupun Forum DAS Riau sebagai salah satu langkah awal belum menampilkan hasil nyata di lapangan. Berbagai konsep dan program pembangunan yang bertujuan sebagai upaya konservasi Sungai Siak, seperti konsep one river one plan dan konsep perencanaan pembangunan water front city, masih sebatas wacana di atas kertas.

Kesadaran masyarakat dan dunia usaha sebagai salah satu komponen penghasil limbah yang dapat mencemari Sungai Siak, masih jauh dari yang diharapkan. Beberapa aktivitas usaha di sepanjang DAS Siak yang berpotensi mencemari Sungai Siak (**Gambar 3.16**) masih belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya secara optimal. Disamping terdapatnya aktivitas rumah tangga dan pemukiman penghasil limbah di sepanjang Sungai Siak, maka juga tidak kurang dari 43 jenis industri yang menghasilkan limbah mengalirkan limbahnya ke Sungai Siak (**Tabel 3.5**). Dari buangan limbah pencemar tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya beban pencemaran Sungai Siak (**Gambar 3.17**) dan ini berarti proses degradasi Sungai Siak terus berlanjut. Beberapa perusahaan industri di sepanjang Sungai Siak telah memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL), namun keberadaannya masih sebatas formalitas saja. Industri yang telah memiliki IPAL yang representatifpun masih belum secara optimal memfungsikan IPALnya dengan alasan mahalnya biaya operasional IPAL.

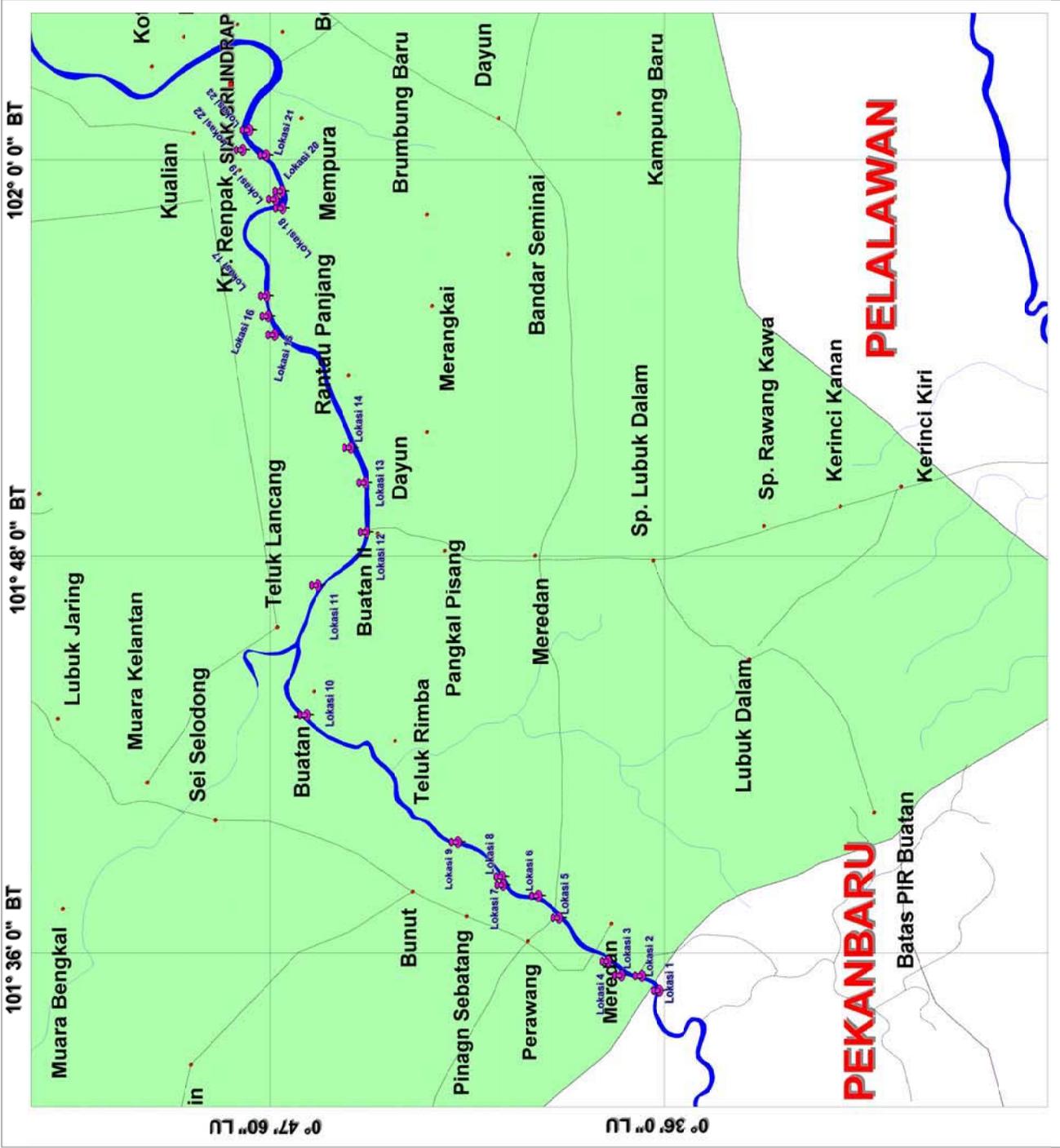
Gambar 3. 16
PETA POTENSI SEBARAN PENCEMARAN



LOKASI 1 = Kawasan Perkebunan kelapa sawit yang akan menimbulkan limbah pertanian
 LOKASI 2 = Aktivitas bongkar muat (loading) dengan kapal ponton, tumpahnya borax
 LOKASI 3 = Pembangunan jembatan penghubung antara meredan dan Tumbang
 LOKASI 4 = Industri sawit Dumai Plywood, ceramahnya air sungai akibat limbah industri.
 LOKASI 5 = Sampah domestik pemukiman penduduk di tepian sungai.
 LOKASI 6 = Limbah dari limbah industri dan aktivitas kelas-kelas menengah-bawah yang terakumulasi.
 LOKASI 7 = Kincir, aktivitas bongkar muat barang dan kayu
 LOKASI 8 = Aktivitas bongkar muat barang dan kayu
 LOKASI 9 = Kawasan PT. Arana Abadi. Limbah pertanian
 LOKASI 10 = Kawasan pemukiman menyebarkan limbah rumah tangga.
 LOKASI 11 = Tumpukan sampah di bawah rumah tepi sungai.
 LOKASI 12 = Kawasan pemukiman menyebarkan limbah rumah tangga.
 LOKASI 13 = Pembangunan limbah rumah tangga, sawang.
 LOKASI 14 = Limbah industri dan limbah kapal
 LOKASI 15 = Kawasan pemukiman menyebarkan limbah rumah tangga.
 LOKASI 16 = Kawasan PT. Pasa Sisa Barak
 LOKASI 17 = Kawasan perkebunan kelapa sawit, pembuangan limbah industri ke sungai.
 LOKASI 18 = Kawasan pemukiman menyebarkan pencemaran limbah domestik.
 LOKASI 19 = Kawasan pemukiman menyebarkan pencemaran limbah domestik.
 LOKASI 20 = Kawasan pemukiman menyebarkan pencemaran limbah domestik.
 LOKASI 21 = Kawasan industri PT. Siskaya Timber. Pembuangan limbah industri dan pengolahan bahan-bahan kimia.
 LOKASI 22 = Kawasan pemukiman menyebarkan pencemaran limbah domestik.
 LOKASI 23 = Kawasan pemukiman menyebarkan pencemaran limbah domestik.
 Raja Timber



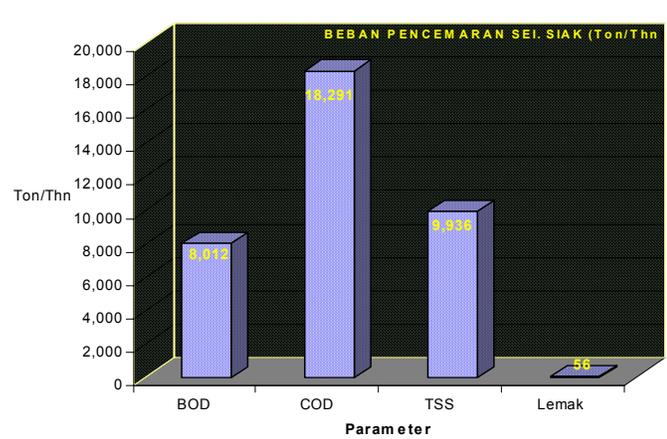
Sumber : Peta Digitasi BAKOSURTANAL
 Software : MapInfo Professional 7.8



Tabel 3.5 Kegiatan Usaha Penghasil Limbah ke Sungai Siak

No	Kegiatan	Jumlah (Unit)
1	Perkebunan / PKS	19
2	Pabrik Crumb Rubber	3
3	Playwood	6
4	Pulp dan Kertas	1
5	Pabrik Glue	1
6	GS Penambangan Miyak Bumi	13

Sumber : Amri, AT, 2004



Gambar 3.17 Beban Pencemaran Sei. Siak Kegiatan Non Domestik

Berbagai regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup masih belum diikuti sebagaimana mestinya. Aturan yang dikeluarkan pemerintah tentang keberadaan *green belt* di kawasan sempadan sungai (*100 m sungai besar, 50 m sungai kecil*) sepertinya tidak berlaku bagi sebagian besar stake holder yang berada di sepanjang aliran Sungai Siak. Bahkan ada kegiatan usaha yang melakukan pembukaan lahan untuk kawasan perkebunan persis berbatasan langsung dengan dinding sungai (**Gambar 3.18**). Kegiatan pembukaan lahan yang bersinggungan langsung dengan bibir sungai akan mengancam kawasan konservasi sempadan sungai. Disamping itu potensi pencemaran yang disebabkan limbah perkebunan juga akan semakin besar terhadap pencemaran Sungai Siak. Demikian juga dengan kegiatan industri di sepanjang Sungai Siak yang melakukan pembangunan pabrik dengan jarak kurang

dari 100 meter dari bibir sungai akan meningkatkan intensitas terjadinya pencemaran dari limbah industri terhadap Sungai Siak.



Gambar 3.18 Perkebunan Sempadan Dinding Sungai Siak

Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri diindikasikan dengan tingginya nilai COD di perairan, disamping nilai parameter lingkungan lainnya (**Tabel 3.6**). Nilai COD yang tinggi mengakibatkan kadar oksigen terlarut di perairan akan semakin menipis untuk dikonsumsi bagi kehidupan biota di perairan. Oksigen lebih banyak digunakan oleh mikro organisme untuk mendegradasi limbah yang masuk ke perairan. Akibatnya biota perairan terutama nekton akan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan kematian. Kondisi ini sudah sering menimpa perairan Sungai Siak.

Tabel 3.6 Dampak Limbah Pencemar Industri Terhadap Biota Perairan

No.	Pencemar	Pengaruh	Sumber Pencemaran
1.	BOD ₅	Deoksigenasi keadaan anaerobik, mematikan ikan dan bau busuk	Karbohidrat terlarut dalam jumlah tinggi, pengilangan gula, pengalangan, penyulingan pabrik minuman, proses susu, pembuatan pulp dan kertas
2.	Zat Racun Primer	Mematikan ikan, meracuni ternak, mematikan plankton, terakumulasi dalam daging ikan dan kerang	Pencucian logam pickling, pengilangan fosfat dan bauksit, pembuatan gas CO ₂ , pembuatan baterai, penyamaan kulit
3.	Asam dan Alkali	Menggangu PH penyangga sistem perairan	Penyaringan pabrik batubara, seel pickling, pabrik bahan kimia, pencucian wol, binatu kimia
4.	Desinfektan C12, formalin, phenol	Mematikan mikro organisme tertentu, mengubah rasa dan	Pengelantangan kertas, tekstil, resinsintesis, pembuatan penicillin, pembuatan gas,

		bau	cokes dan ter, pabrik zat warna dan bahan kimia
5.	Bentuk Ion : Fe, Ca, Mg, Mn, C ₁ SO ₄	Mengubah kekhasan air, warna, kesadahan, salinitas	Pengelantangan kertas, tekstil, resinsintesis, pembuatan penicilin, pembuatan gas, cokes dan ter, pabrik zat warna dan bahan kimia
6.	Oksidator dan reduktor : NH ₃ , NO ₂ , NO ₃ , S dan SO ₃	Mengubah keseimbangan kimia, bau, dan pertumbuhan mikroba tertentu	Pembuatan barang logam, pembuatan semen, keramik dan pompompaan sumur bor
7.	Yang terlihat dan tercium	Buih, bahan mengapung, zat-zat yang menetap, bau yang merangsang, endapan dasar yang bersifat anaerobik, lemak, minyak, dan gemuk merusak kehidupan ikan	Buangan deterjen, zat penyamak, prosesing makanan dan daging, pengilangan gula, pemintalan wol, pertumbuhan cendawan dalam bak penampungan limbah air buangan, proses limbah air buangan peternak
8.	Organism pathogen Bacillus anthracis, leptospiral, cendawan beracun virus	Reinfeksi pada manusia dan reinfeksi pada hewan, penyakit – penyakit tanaman dari air irigasi yang terkontaminasi	Sampah – sampah dari perusahaan pemotongan hewan, proses wol, pertumbuhan cendawan dalam bak penampungan limbah air buangan, proses limbah air buangan peternakan

Dari data yang ada tercatat beberapa kasus kematian ikan di sepanjang aliran Sungai Siak yang antara lain adalah :

- Kematian ikan pada tanggal 1 oktober 1998 yang berjumlah ribuan ekor dengan berat total sekitar dua ton terjadi di sekitar Kuala Sungai Gasib
- Kematian ikan pada bulan Agustus tahun 1999, yang berjumlah ribuan ekor di sekitar Perawang, sebagai akibat terbakarnya kapal Stephani XVI yang telah menumpahkan 1200 metrik ton bahan minyak ke badan sungai Siak
- Kematian ikan di sepanjang DAS Siak sejak tahun 2000 sampai 2003 pada puncak musim kemarau antara bulan Juni sampai bulan Agustus setiap tahunnya dengan berat total berkisar antara 300 sampai 400 kg. Hal ini lebih disebabkan oleh turunnya debit air sampai ke tingkat yang sangat rendah, sementara aktivitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) meningkat tajam karena masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih sebagai akibat musim kemarau itu, karena telah terjadi pemekatan konsentrasi limbah karena debit airnya sangat rendah.
- Pada tanggal 8 Juni 2004 telah terjadi kematian ikan dalam jumlah ribuan ekor dengan berat sekitar 1,2 sampai 1,5 ton . Adapun lokasi kejadian di sekitar

muara Sungai Bangso sampai Jembatan Siak II. Hal ini juga merupakan indikator betapa buruknya mutu perairan Sungai Siak yang telah menyebabkan punahnya biota perairan itu.

- Pada bulan Juli dan Agustus tahun 2004 terjadi pula dua kasus tenggelamnya kapal pengangkut Pulp PT. IKPP di pelabuhan perusahaan itu yakni Perawang. Walaupun peristiwa itu dapat ditanggulangi dengan baik namun kejadian tersebut telah menunjukkan kondisi ketidak hati-hatian dalam menangani suatu pekerjaan yang terkait dengan aspek keselamatan kerja dan mutu lingkungan hidup. Peristiwa ini juga akan membentuk opini yang kurang menguntungkan terhadap perusahaan PT. IKPP dalam mengelola aspek lingkungan di sekitarnya .

Konsep pengelolaan lingkungan yang memasukkan komponen pengelolaan lingkungan dalam sebuah investasi masih belum secara sadar diterapkan oleh kalangan dunia usaha. Pengelolaan lingkungan masih dianggap sebagai cost yang tidak memberikan benefit bagi sebagian besar kalangan dunia usaha. Kebanyakan pelaksanaan pengelolaan lingkungan bagi kalangan dunia usaha adalah suatu keterpaksaan karena merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui aturan yang ada, seperti kewajiban pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL dan pembuatan IPAL yang representatif. Akibatnya proses degradasi lingkungan termasuk Sungai Siak masih saja berlanjut hingga saat ini.

Disamping masalah kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan, maka komitmen pengelolaan lingkungan Pemerintah di Kabupaten Siak dalam mengatasi pencemaran Sungai Siak selalu terkendala dengan alasan masalah pendanaan, padahal dibanding daerah lainnya di Riau, Kabupaten Siak memiliki sumber pendanaan yang lebih baik dan lebih besar, apalagi Sungai Siak lebih memiliki nilai historis bagi Kabupaten Siak. Potensi pendapatan dari sumber yang berkenaan dengan lingkungan hidup sudah sepantasnya dikembalikan sebagiannya untuk pengelolaan lingkungan. Dari segi penerimaan pos retribusi pembuangan limbah cair, terdapat penerimaan sebesar Rp. 1.722.239.000 pada tahun 2005. Jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000 atau penerimaan melebihi target sebesar 344,48 %. Jumlah ini masih memiliki potensi yang amat besar untuk ditingkatkan pada tahun tahun berikutnya. Jumlah penerimaan ini akan sangat berarti jika dikembalikan untuk mengatasi permasalahan pencemaran di Sungai Siak.

Faktor Penyebab

Faktor penyebab (*pressure*) terjadinya pencemaran Sungai Siak dipengaruhi antara lain :

- Rendahnya kesadaran perusahaan dalam melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan.
- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga hilangnya fungsi pengawasan dari masyarakat di lapangan
- Lemahnya aspek penegakan hukum (low enforcement).
- Belum semua kegiatan wajib AMDAL / UKL – UPL melakukan studi tersebut.
- Belum diimplementasikannya RKL – RPL / UKL – UKL secara sungguh - sungguh.
- Rendahnya pengawasan dan belum semua kegiatan melakukan pelaporan kondisi dan kebijakan lingkungan / melakukan pelaporan RKL – RPL.
- Belum semua kegiatan yang menghasilkan limbah cair memiliki dan mengoperasikan IPAL yang representatif dan benar.
- Belum semua perusahaan penghasil limbah memiliki izin pembuangan limbah.
- Adanya kegiatan pengelolaan limbah yang tidak mengikuri prosedur yang ada.
- Belum adanya penyusunan pengelolaan DAS Siak yang komprehensif, terpadu, dan terintegrasi dengan DAS lainnya yang mempertimbangkan aspek geofisik, ekonomi, budaya dan kelembagaan.
- Pengelolaan sumber daya hutan dan lahan yang tidak /kurang bijaksana.
- Kegiatan pertanian dan perkebunan kurang memperhatikan kaidah konservasi.
- Tingginya laju konversi lahan hutan menjadi bentuk penggunaan lainnya.
- Adanya konflik kepentingan lahan dan hutan.
- Kurangnya aturan daerah yang mendukung kebijakan nasional tentang pencemaran air dan baku mutu.
- Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar DAS.
- Kurangnya peralatan pemantauan yang dimiliki oleh aparat terkait dalam meneliti kualitas air.

Dampak

Dampak yang ditimbulkan (*state*), akibat pencemaran air sungai Tapung terhadap Sungai Siak antara lain :

- Makin beratnya beban pencemaran di perairan Sungai Siak

- Menurunnya kualitas air Sungai Siak
- Sulitnya masyarakat sekitar DAS Siak memperoleh kualitas air yang baik untuk kebutuhan MCK rumah tangga.
- Timbulnya masalah kesehatan seperti penyakit kulit dan sakit perut karena rendahnya kualitas air minum masyarakat di DAS Siak.
- Terganggunya kehidupan biota perairan di Sungai Siak.
- Terancamnya keanekaragaman hayati perairan Sei. Siak.
- Menurunnya hasil tangkapan nelayan di Sei Siak.
- Munculnya masalah sosial seperti penurunan pendapatan nelayan yang dapat berujung pada kriminalitas di kawasan DAS Siak.

Penanggulangan

Untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai maka perlu langkah penanggulangan (**respon**) berikut ini.

- Membentuk forum komunikasi pengusaha di DAS Siak sebagai media koordinasi.
- Pemantapan komitmen penegakan hukum (low enforcement).
- Penyusunan master plan pengelolaan DAS Siak yang terintegrasi dengan DAS lainnya.
- Penyusunan Perda dan Baku Mutu Air Sungai yang mendukung kebijakan pengelolaan DAS Siak oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
- Intensifikasi, implementasi dan pengawasan terhadap instrumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
- Penggunaan IPAL yang representatif.
- Melaksanakan penghijauan dan reboisasi.
- Sosialisasi program Prokasih kepada masyarakat setempat dalam kawasan DAS Siak.
- Menetapkan beberapa stasiun pemantauan yang permanen sebagai parameter kualitas air.
- Melakukan pemantauan berkala dengan sampling kualitas air sungai.
- Melakukan sosialisasi kebijakan dan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar DAS Siak.
- Kewajiban pelaporan kondisi dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi setiap aktivitas yang ada di sekitar DAS Siak.

Kendala

Belum maksimalnya hasil yang dicapai dalam mengatasi masalah pencemaran air dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain seperti berikut ini.

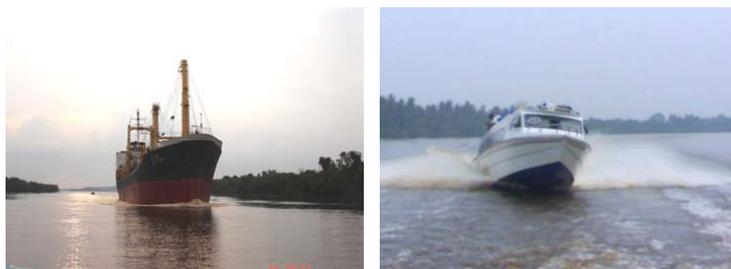
- ➔ Belum terwujudnya pola pikir yang berwawasan lingkungan bagi segenap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di DAS Tapung
- ➔ Belum optimalnya fungsi pejabat PPNS dibidang kejahatan lingkungan hidup.
- ➔ Belum mantapnya implementasi instrumen pengelolaan lingkungan.
- ➔ Lemahnya sumberdaya manusia di bidang pengelolaan sungai dan kualitas air.
- ➔ Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan DAS.
- ➔ Kurangnya koordinasi antar berbagai stake holder.
- ➔ Minimnya dukungan dana operasional, fasilitas pemantauan dan laboratorium.
- ➔ Kurangnya sumberdaya manusia yang representatif.

3.1.4 Abrasi Sungai Siak

Sungai Siak yang secara ekologi sebagai sebuah ekosistem terbuka juga memiliki karakteristik sama dengan ekosistem terbuka lainnya yakni bersifat *common property dan open acces*. Artinya Sungai Siak merupakan kepemilikan umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Setiap pihak dapat mengakses dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada pada kawasannya, yang seharusnya tentu dengan mengikuti norma, kaidah dan ketentuan yang telah disepakati bersama, di bawah payung hukum yang telah ditetapkan oleh pihak legislatif berkompeten. Berawal dari konsep pemahaman *common property dan open acces* inilah permasalahan Sungai Siak menjadi sesuatu yang sulit untuk di kelola. Pemahaman konsep ini lebih cenderung diarahkan kepada aktivitas yang bersifat destruktif dan mengakibatkan degradasi lingkungan. Masyarakat cenderung mengambil keuntungan apabila terdapat potensi keuntungan yang diberikan, namun jika terjadi permasalahan terhadap Sungai Siak, maka masyarakat cenderung akan lepas tangan.

Disamping masalah pencemaran, Sungai Siak juga menghadapi masalah abrasi dan sedimentasi yang signifikan. Permasalahan abrasi dan sedimentasi di Sungai bersumber pada aktivitas manusia yang berada pada kawasan DASnya. Terjadinya abrasi di Sungai Siak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor – faktor tersebut saling mengakumulasi antara satu dengan lainnya. Diantara penyebab tersebut antara lain adalah karena pola penggunaan dan pengelolaan lahan yang kurang tepat, kegiatan

transportasi (**Gambar 3.19**) di sepanjang lintasan aliran Sungai Siak, pola arus sungai, sistem drainase tepi sungai yang kurang baik, struktur tanah tebing yang rapuh dan daya dukung tebing yang terlampaui.



Gambar 3.19 Aktivitas Transportasi Di Lintasan Sungai Siak

Kesalahan penggunaan dan pengelolaan lahan di kawasan DAS Siak telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan abrasi di Sungai Siak. Pada konteks yang lebih besar kesalahan pengelolaan lahan disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan untuk pengembangan usaha kehutanan dan usaha perkebunan, sedangkan pada skala yang lebih kecil terjadi pada pembukaan lahan pemukiman yang langsung berbatasan dengan dinding sungai. Penyebab utama terjadinya abrasi di sepanjang Sungai Siak dari luar badan sungai adalah penggunaan lahan budidaya yang tidak memperhatikan ketentuan pencadangan lahan sebagai barrier atau green belt. Untuk sungai besar seharusnya tidak boleh melakukan pembukaan lahan minimal 100 meter di kiri – kanan sungai, sedangkan untuk sungai kecil minimal pada jarak 50 meter kiri kanan sungai tidak boleh ada gangguan terhadap keberadaan vegetasi. Kebijakan ini tidak sepenuhnya dapat di implementasikan di kawasan DAS Siak.

Salah satu kegiatan pada kawasan DAS Siak yang telah terbukti memberikan kontribusi negatif terhadap Sungai Siak adalah kegiatan kehutanan dan pembukaan lahan perkebunan. Eksploitasi sumberdaya hutan dan pengembangan usaha perkebunan yang tidak terkendali dan dengan tidak memperhitungkan dampak lingkungan mengakibatkan hutan akan kehilangan fungsi ekologisnya, dimana salah satunya berfungsi sebagai penyimpan air penyangga terjadinya bencana erosi yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya sedimentasi Sungai Siak. Kerusakan kawasan konservasi akibat eksploitasi sumberdaya hutan dan pembukaan lahan pertanian untuk berladang telah meningkatkan erosi serta laju sedimentasi perairan Sungai Siak.

Sebagai media transportasi, Sungai Siak memiliki peranan yang sangat penting di Propinsi Riau. Semakin hari kegiatan mobilisasi orang dan barang dengan menggunakan media transportasi semakin meningkat. Sampai tahun 2005 tercatat sekitar 25 kali lalu lintas kapal barang dan 24 kapal penumpang umum yang melintasi Sungai Siak (**Tabel 3.7**). Aktivitas lalu lintas pelayaran kapal yang menghasilkan gelombang telah terbukti berdampak pada peningkatan terjadinya abrasi tebing sungai (**Gambar 3.20**). Gelombang yang menyisir dan arus akibat baling baling kapal merambat sepanjang tebing. Run-up dan run down gelombang di tebing sungai akan menggerus tanah dasar tebing. Lokasi penggerusan terjadi pada muka air. Intensitas penggerusan yang dominan terutama terjadi pada posisi permukaan air surut. Proses abrasi yang disebabkan oleh gelombang terjadi sedikit demi sedikit, namun berlangsung secara terus menerus. Abrasi tebing yang terjadi semakin di picu oleh hilangnya vegetasi pinggir sungai akibat kesalahan penggunaan lahan. Dengan semakin meningkatnya frekwensi lalu lintas di lintasan Sungai Siak di masa selanjutnya akibat penambahan penduduk maka diprakirakan proses abrasi Sungai Siak akan semakin meningkat.

Tabel 3.7 Data Frekwensi Lalu Lintas Kapal Lintasan Sei. Siak

No.	Jenis Kapal	Frekwensi
1.	Kapal Barang - Ponton - Kapal Motor - Tanker - Kapal Cargo	25 kali / hari
2.	Kapal Penumpang - Mulya Kencana - Surya Gemilang - Pelita Indomal - Speed Boat - Jelatik	24 kali / hari



Gambar 3.20 Gelombang Penyebab Abrasi Tebing Sungai Siak

Arus Sungai Siak yang cukup deras dan bentuk alur sungai yang relative sempit dan dalam menyebabkan arus sungai terkonsentrasi pada alur tersebut. Gerusan tebing oleh arus sungai terjadi di daerah alur sungai yang lurus maupun pada belokan sungai, tetapi kerusakan yang lebih parah terjadi pada belokan sungai bagian tingkungan luar. Gerusan tersebut terutama terjadi di daerah tebing sungai yang tidak terlindung baik oleh vegetasi yang rapat maupun oleh perlindungan buatan. Pada saat terjadi arus yang besar (kuat) atau pada saat banjir, gerusan pada belokan sungai bagian luar dapat terjadi cukup cepat sehingga bangunan yang berada pada belokan luar rawan terhadap gerusan.

Kerusakan tebing juga terjadi pada saat hujan yang cukup deras sehingga air dari saluran drainasi maupun limpasan permukaan langsung melimpah ke sungai. Drainasi yang kurang baik pada sisi luar tanggul sungai dapat pula menyebabkan lemahnya tanggul. Air yang menggenang di sisi luar tanggul akan berusaha meresap ke dalam tanah dan mengalir ke sungai lewat tubuh tanggul dan tanah dan tanah dasar pondasinya. Akibatnya timbul gaya rembesan yang dapat menimbulkan terjadinya proses 'piping'. Apabila proses ini berlangsung cukup lama tanggul akan runtuh atau hancur. Pada bagian sungai yang tidak bertanggul, limpasan langsung pada tebing sungai yang tidak lagi terlindung dengan vegetasi akan menyebabkan erosi permukaan (*Sheet erosion maupun rill erosion*) yang lama – kelamaan akan mengikis tebing sungai.

Pada tebing yang rapuh, apabila terjadi gangguan sedikit saja stabilitas tebing akan terusik dan dapat menyebabkan kerusakan tebing tersebut. Gangguan terhadap tebing ini dapat berupa resapan air kedalan tanah, adanya beban tambah di atas tebing, adanya kapal tambat di tebing (membuat angker ditebing) dan sebagainya. Dari studi PAU ilmu Teknik UGM (1994) kondisi daya dukung tanah tebing pada umumnya lemah hingga sedang dengan lereng stabil mencapai 1:3 . Bila bantaran sungai banyak menerima beban karena pengembangan bantaran tersebut dengan bangunan – bangunan berat, maka daya dukung dan stabilitas tebing akan berkurang dengan usikan dari air hujan maupun dari sungai akan dapat melongsorkan tebing.

Biasanya tebing tanah mempunyai kemampuan mendukung gaya yang besarnya tertentu. Apabila kemampuan dukung ijin tebing tersebut terlampaui, otomatis tebing tersebut akan runtuh. Penyebab kelebihan beban yang bekerja diatas tebing diantaranya adalah adanya bangunan diatas tebing seperti pemukiman, dan adanya timbunan barang/muatan yang berlebihan (lapangan penumpukan) (**Gambar 3.21**).



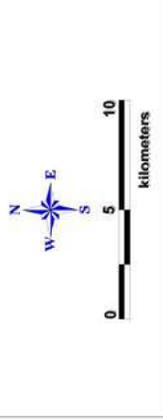
Gambar 3.21 Pemukiman dan Tumpukan Material Mengancam Stabilitas Tebing Sungai Siak

Data hasil pengamatan di sepanjang Sungai Siak di Kabupaten Siak terlihat kawasan rawan abrasi terdapat pada lintasan wilayah Maredan sampak ke Kota Siak Sri Indrapura (**Gambar 3.23**). Intensitas abrasi pada kawasan ini adalah berkisar antara 4 meter sampai 15 meter (**Tabel 3.8**). Secara umum abrasi disebabkan oleh hantaman gelombang kapal ke bibir sungai terutama pada kawasan yang tidak memiliki vegetasi penahan gelombang. Dampak terjadinya abrasi telah terlihat secara nyata di pinggiran Sungai Siak. Beberapa bangunan yang berada di tepi sungai sudah mengalami keruntuhan, bahkan masih banyak lagi yang terancam akan runtuh (**Gambar 3.22**). Dampak abrasi juga terjadi pada sektor perikanan. Dengan adanya abrasi dan sedimentasi di pinggir sungai, maka akan dapat merusak habitat kehidupan bagi ikan. Kerusakan akan semakin parah apabila habitat yang dirusak merupakan tempat bertelur dan memijah bagi ikan. Apabila yang dirusak adalah tempat – tempat sensitif tersebut, maka lambat laun dapat berdampak pada musnahnya keanekaragaman spesies ikan tertentu di Sungai Siak. Kekhawatiran ini telah dirasakan saat ini, dengan semakin berkurangnya hasil tangkapan masyarakat terhadap ikan - ikan yang berasal dari Sungai Siak ini.



Gambar 3.22 Dampak Abrasi Terhadap Tempat Ibadah dan Pemukiman

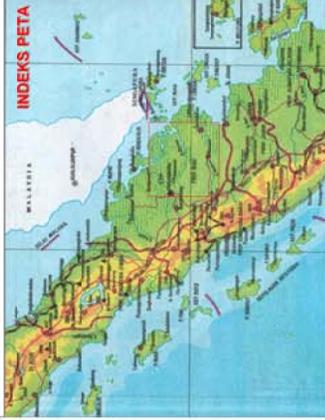
Gambar 3. 23
PETA SEBARAN ABRASI SEI. SIAK



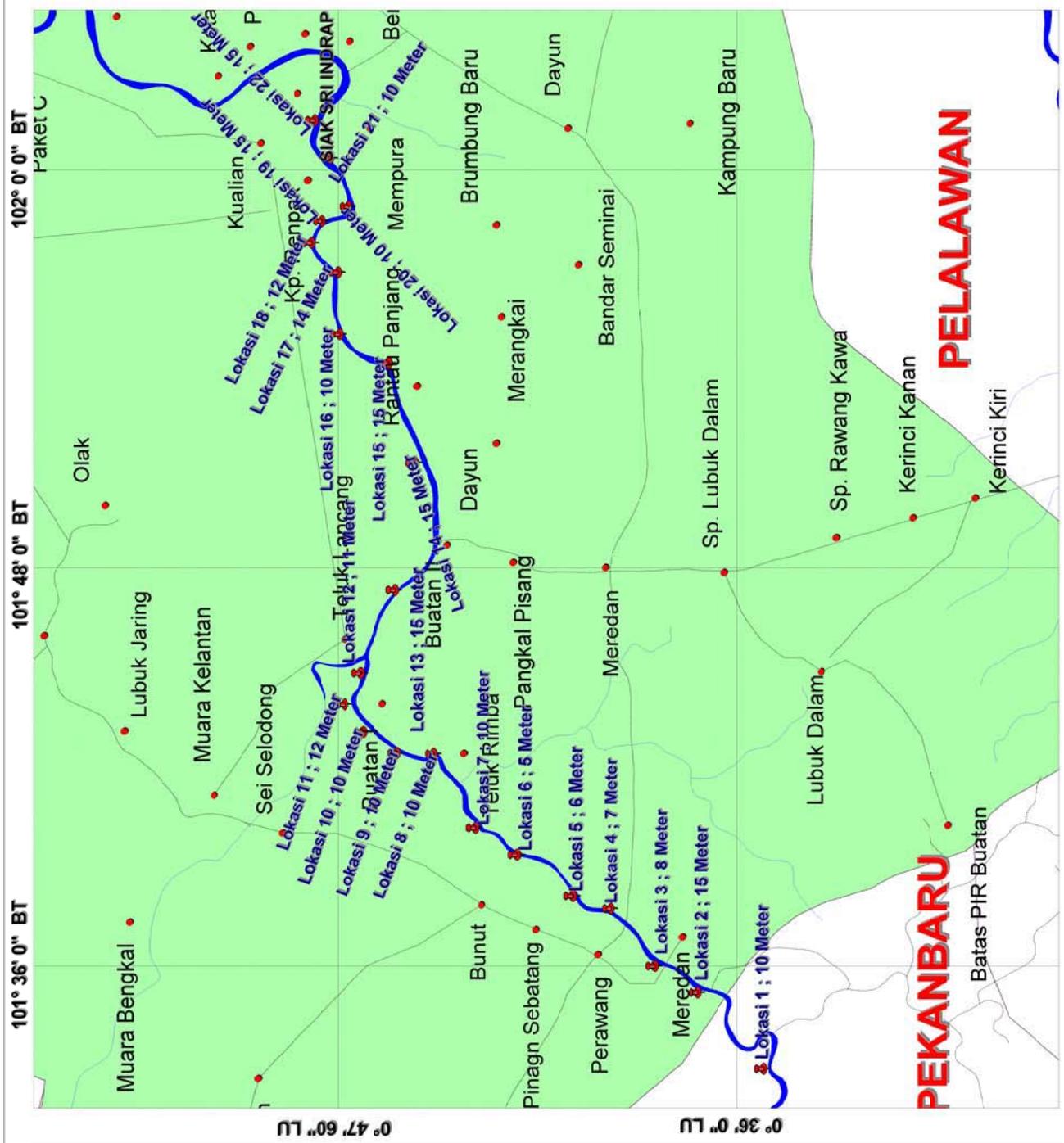
KETERANGAN

	Basah Kepulauan
	Jalan
	Sungai
	Kabupaten
	Desa/Kelurahan
	Titik Lokasi

LOKASI 1 = Pohon yang berada di tepian sungai sudah tergenang pada air sungai pasang.
 LOKASI 2 = Tunggai abrasis cukup parah, tepian sungai membentuk kerumuk pantai kecil.
 LOKASI 3 = Pada kerumuk dan kiri tepian sungai dititik ini sudah membentuk daratan.
 LOKASI 4 = Sempit dibawah pemukiman masyarakat tepian sungai organik dan erogatif.
 LOKASI 5 = Kawasan erogatif PT. Induri di kawasan ini sudah sangat erogatif.
 LOKASI 6 = Kawasan erogatif PT. Induri di kawasan ini sudah sangat erogatif.
 LOKASI 7 = Beberapa pohon tumbang dan di dinding sungai terlekat pada kawasan ini.
 LOKASI 8 = Kawasan ini terlihat beberapa pohon yang ada ditepian sudah berada di air.
 LOKASI 9 = Masih terlihat abrasis pada tepian sungai.
 LOKASI 10 = Masih terlihat abrasis pada tepian sungai.
 LOKASI 11 = Tepian kawasan ini sudah menyempit pantai akibat abrasis sungai, yang cukup parah.
 LOKASI 12 = Reseknya tumbuhan yang ada dan terlihat di dinding tepian pada tepian sungai akibat banjir abrasis.
 LOKASI 13 = Kawasan erogatif di kawasan ini sudah sangat erogatif.
 LOKASI 14 = Kawasan hutan alam.
 LOKASI 15 = Kawasan hutan alam.
 LOKASI 16 = Lintah perikanan.
 LOKASI 17 = Lintah perikanan.
 LOKASI 18 = Kawasan hutan alam pada pinggir sungai membentuk pantai sepanjang kawasan ini.
 LOKASI 19 = Kawasan erogatif yang akibat banjir abrasis.
 LOKASI 20 = Lintah perikanan.
 LOKASI 21 = Kawasan pemukiman masyarakat yang berdekatan dengan Induri PT. Sisk Raya, Timber.
 LOKASI 22 = Menembuka pantai sepanjang kiri badan sungai terlihat air sungai surut.



Sumber : Peta Digital BAKOSURTANAL
 Software : MapInfo Professional 7.8



● Faktor Penyebab

Faktor penyebab (*pressure*) terjadinya abrasi Sungai Siak dipengaruhi antara lain :

- Kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap pola penggunaan lahan di kawasan DAS Siak.
- Hilangnya vegetasi pinggir Sungai Siak yang berfungsi sebagai green belt
- Mormologi fisik sungai yang berbelok belok
- Aktivitas transportasi di lintasan Sungai Siak
- Penggunaan kawasan pinggi Sungai Siak sebagai kawasan pemukiman
- Kurangnya pengelolaan terhadap pelabuhan
- Aktivitas sandar kapal yang tidak pada tempatnya
- Pengaruh arus pasang surut
- Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar DAS Siak terhadap bahaya abrasi
- Kondisi lahan pinggir Sungai yang relatif labil
- Tidak adanya upaya reklamasi bagi kegiatan usaha yang tidak beroperasi lagi.
- Tidak di implementasikannya RKL – RPL yang telah disusun bersama studi AMDAL.

● Dampak

Dampak yang ditimbulkan (*state*) erosi dan sedimentasi terhadap perairan Sungai Siak antara lain :

- Terjadinya pendangkalan Sungai Siak
- Terancamnya bangunan yang berdiri di pinggiran Sungai Siak
- Potensi terjadinya bencana banjir akibat luapan Sungai Siak
- Terganggunya kehidupan biota perairan, terutama akibat rusaknya habitat ikan.
- Terancamnya keanekaragaman hayati perairan, terutama akibat rusaknya tempat bertelur dan memijah ikan.
- Menurunnya hasil tangkapan nelayan setempat.
- Munculnya masalah – masalah kesehatan akibat terjadinya bencana banjir.
- Munculnya masalah – masalah sosial seperti penurunan pendapatan nelayan yang dapat berujung pada kriminalitas.
- Ancaman terhadap keberlanjutan fungsi ekologi sungai

Penanggulangan

Untuk mengatasi masalah erosi dan sedimentasi perairan Sungai Siak maka perlu langkah penanggulangan (**respon**) berikut ini.

-  Melakukan rehabilitasi dan upaya konservasi terhadap kawasan sungai yang kritis terhadap bahaya abrasi dan sedimentasi. Seperti penanaman vegetasi kembali dan pembangunan turap.
-  Penerapan aturan batasan kecepatan kapal yang melintasi Sungai Siak
-  Pemantapan komitmen penegakan hukum (low enforcement).
-  Penyusunan master plan pengelolaan DAS Siak.
-  Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar DAS Siak tentang bahayanya abrasi.

Kendala

Belum maksimalnya hasil yang dicapai dalam mengatasi masalah erosi dan sedimentasi perairan Sungai Siak dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain seperti berikut ini.

-  Kurangnya kesadaran masyarakat di DAS Siak tentang pola penggunaan lahan terutama tentang kawasan penyangga sungai
-  Belum dipahaminya aturan batasan kecepatan kapal yang melintas di Sungai Siak oleh para nahkoda/kapten kapal
-  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan DAS Siak.
-  Terbatasnya anggaran untuk melakukan rehabilitasi lahan abrasi
-  Kurangnya koordinasi antar berbagai stake holder di pemerintahan dan swasta.

3.2 EVALUASI KEBIJAKAN

Salah satu buah hasil reformasi adalah adanya perubahan kebijakan dibidang penyelenggaraan pemerintahan melalui konsep otonomi daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi yang diatur melalui Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya di revisi menjadi Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah No : 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini telah memberikan pengaruh secara nyata terhadap peningkatan gerak pembangunan di daerah – daerah termasuk di Kabupaten Siak, pembangunan yang meliputi perencanaan program, implementasi program serta evaluasi program di bidang pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Komitmen yang kuat serta adanya political will merupakan modal dasar keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Program ini harus didukung oleh berbagai pihak yang terkait seperti : *Pemerintah* (eksekutif), baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, sebagai pelaksana pembangunan ; *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif)*, *Kejaksaan*, *Kepolisian PPNS (Yudikatif)* , melalui komitmen penegakan hukum (Law Enforcement) sesuai pasal 27 Undang – Undang Dasar 45 dan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 1997; *Dunia Usaha* , melalui implementasi program kebijakan lingkungan dalam kegiatan usahanya ; *Masyarakat*, sebagai komponen yang berhak mendapatkan lingkungan yang baik, dan dapat bertindak melalui kesadaran yang tinggi untuk kepentingan lingkungan hidup ; *Perguruan Tinggi*, sebagai pusat sumber daya manusia berkualitas melalui pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk mendukung upaya pengelolaan lingkungan ; *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, sebagai sebuah kelompok dalam masyarakat yang memiliki komitmen dalam pengelolaan lingkungan. Bercermin pada isu lingkungan hidup yang muncul serta kondisi aktual di lapangan sepanjang tahun 2006 di Kabupaten Siak, maka diperlukan berbagai evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang telah dilakukan seperti dijelaskan berikut ini.

3.2.1 Kebakaran Hutan dan Lahan

Masalah kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu isu lingkungan yang kerap terjadi belakangan ini. Sejauh ini upaya mengatasi masalah kebakaran lahan dan hutan lebih banyak ditentukan oleh alam. Tindakan pencegahan (preventif) terhadap terjadinya bahaya kebakaran merupakan upaya yang lebih baik untuk dilaksanakan dari pada tindakan setelah terjadinya kebakaran berupa kegiatan pemadaman api.

Terus berlangsungnya bencana kebakaran hutan dari tahun ke tahun dalam satu dasawarsa terakhir ini banyak disebabkan oleh belum diimplementasikan sepenuhnya segenap program kerja penanggulangan masalah kebakaran hutan. Penanggulangan masalah kebakaran hutan selama ini hanya dilakukan secara temporer, dan lebih banyak merupakan tindakan represif, belum terencana dan terprogram dengan baik, serta belum adanya standar baku operasional penanggulangan (SOP) kebakaran hutan. Untuk itu diperlukan rumusan SOP penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan segenap stake holder serta dukungan dana operasional yang proposional dan ketersediaan peralatan pemadam api yang lebih representatif.

Kebijakan Low Enforcement sampai sejauh ini masih belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Keberadaan sumber daya manusia di bidang penegakan hukum belum terimplementasi dengan baik. Disamping itu keberadaan PPNS bidang lingkungan hidup sampai ini belum menunjukkan aksinya dalam menangani pelanggaran hukum dan menindaklanjuti berbagai kasus hukum yang terjadi. Dengan demikian para pelanggar hukum lingkungan masih bebas melakukan tindakan dan kejahatan lingkungan hidup. Penanggulangan kebakaran lahan sejauh ini belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Belum ada terlihat terobosan baru dari penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Siak. Dalam rangka perbaikan kinerja penanggulangan masalah kebakaran lahan dan hutan maka perlu adanya evaluasi atas beberapa kebijakan yang telah dilakukan. Beberapa kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan antara lain :

- Perbaikan program kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan
- Perubahan struktur organisasi Satlak – Dalkarhutla di Kabupaten Siak dengan melibatkan stake holder akar rumput yang merasakan langsung dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
- Merealisasikan alokasi dana taktis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun berikutnya untuk penanggulangan masalah bencana lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan.
- Mempertimbangkan pembentukan bidang penegakan hukum setingkat eselon III di BAPEDALDA yang dibekali dengan pengetahuan hukum lingkungan untuk menyeret pelaku kejahatan di bidang lingkungan, ataupun melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang profesional dibidang lingkungan.
- Efektifitas kinerja PPNS dan PPLHD di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Siak.

- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan kepada segenap pihak terkait.

3.2.2 Illegal Logging

Eksplorasi sumberdaya kehutanan secara illegal sampai saat ini sudah mulai menunjukkan pengurangan. Indikasi ini terlihat dari banyaknya pabrik-pabrik sawmill sebagai penadah hasil kejahatan illegal logging yang tidak memproduksi lagi dan bahkan sebahagian sudah tutup total. Meskipun demikian berkurangnya kejahatan ini bukan berarti telah berhasilnya program serta tepatnya langkah penanganan kejahatan illegal logging di daerah. Berkurangnya kejahatan illegal logging lebih banyak disebabkan oleh memang sudah habis atau menipisnya ketersediaan kayu alam, baik yang berada pada kawasan hutan produksi, maupun hutan konservasi. Disamping itu adanya kebijakan penanganan illegal logging dari pusat juga telah mengurangi intensitas kejahatan ini.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Siak sebagai langkah untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan illegal logging ini sepanjang tahun 2006 yang merupakan terobosan baru sama sekali tidak ada. Dengan demikian sepanjang tahun 2006 hanya menjalankan kebijakan tahun sebelumnya, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Kebijakan pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) dari areal rencana perkebunan sering dijadikan kedok untuk melakukan illegal logging. Kebijakan yang pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada swasta dalam melakukan eksploitasi sumberdaya hutan sebaiknya perlu untuk ditinjau kembali. Dewasa ini sulit membedakan mana komoditas kayu yang berasal dari kegiatan legal, dan mana kayu yang hasil dari pada illegal logging. Kayu yang berasal dari kegiatan illegal logging dapat dengan mudah dilegalkan dengan bantuan oknum melalui selembar surat yang diperlukan sebagai legalitas. Pemanfaatan masyarakat sekitar hutan oleh para pencuri kayu turut menambah kerumitan masalah illegal logging. Masyarakat bukan saja membantu pencuri dalam hal pengambilan kayu, tetapi juga telah menjadi tameng bagi para cukong kayu untuk melindungi kegiatan illegal logging yang mereka lakukan.

Dengan tidak terlihatnya langkah nyata dari pembuat kebijakan dan penegakan hukum di Siak terhadap para pelaku kejahatan illegal logging di sepanjang tahun 2006 dan demi kelestarian fungsi – fungsi lingkungan hidup, maka perlu beberapa evaluasi dan perbaikan kebijakan antara lain :

- Merealisasikan komitmen bersama untuk pemberantasan kejahatan illegal logging.
- Merealisasikan keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan illegal logging di Kabupaten Siak
- Meminta dukungan dan mengikutsertakan para tokoh masyarakat, pemuka adat setempat dalam pemberantasan illegal logging.
- Menambah dan mengintegrasikan fungsi PPNS dan PPLHD di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menuju penegakan hukum yang lebih baik.
- Melakukan peringatan kepada pengusaha di bidang kehutanan akan ada penutupan semua bentuk perizinan pemanfaatan kayu alami dari hutan secara bertahap dalam kurun waktu maksimal 5 tahun kedepan.
- Secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat hutan, dan pemberian solusi terhadap alternatif mata pencaharian pengganti.

3.2.3 Abrasi Sungai Siak

Perubahan ekosistem suatu sungai banyak dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang terdapat pada kawasannya DASnya. Berbagai langkah dan kebijakan yang diambil terhadap kegiatan di kawasan daerah aliran sungai secara langsung akan berdampak terhadap kondisi perairan sungai. Begitu juga terhadap kondisi ekosistem perairan Sungai Siak. Beberapa bentuk kegiatan pada daerah aliran Sungai Siak yang mempengaruhi intensitas abrasi di Sungai Siak antara lain adalah transportasi perairan, pola penggunaan lahan (pertanian, kehutanan, pertambangan, pemukiman).

Masalah abrasi merupakan salah satu isu utama yang penting dalam pengelolaan perairan Sungai Siak. Masalah ini merupakan salah satu ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem Sungai Siak. Terjadinya abrasi pada perairan Sungai Siak disebabkan oleh kesalahan pengelolaan sumberdaya lahan di DASnya. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terencana dan tidak memperhatikan kaidah – kaidah kelestarian fungsi lingkungan hidup mengakibatkan hilangnya salah satu fungsi ekologis hutan yakni penahan lajunya erosi lahan. Di samping itu pembukaan lahan untuk kegiatan perladangan juga turut meningkatkan lajunya run off air yang mengakibatkan abrasi.

Disamping masalah pola penggunaan lahan, masalah transportasi perairan di lintasan alur pelayaran Sungai Siak turut memberikan kontribusi negatif terhadap ancaman

abrasi di Sungai Siak. Kebijakan pemasangan rambu – rambu pembatasan laju kecepatan belum sepenuhnya dipatuhi oleh nahkoda kapal. Pada lintasan pelayaran yang dilalui kapal dimana terdapat pemukiman masyarakat, maka kecepatan kapal mengalami pengurangan, namun pada kawasan rawan abrasi yang tidak berpenduduk kecepatan kapal tidak mengalami perubahan. Keberadaan rambu – rambu pada kawasan ini sering tidak dipedulikan oleh para awak kapal.

Upaya penanggulangan abrasi dengan melakukan pembangunan turap (**Gambar 3.24**) mengalami kendala dari segi pendanaan. Kebijakan pembangunan turap yang memerlukan biaya besar tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemerintah kabupaten Siak secara sendiri. Untuk itu diperlukan bantuan dan keterlibatan pihak propinsi ataupun pusat. Kegiatan pembangunan Jembatan Siak dan Jembatan Maredan oleh Pemerintah Kabupaten Siak merupakan salah satu langkah tepat untuk mengurangi frekwensi lalu lintas pelayaran di lintasan alur Sungai Siak. Dengan terbangunnya Jembatan Siak ini, maka kelancaran transportasi darat akan semakin baik. Masyarakat akan lebih banyak menggunakan transportasi darat untuk dari dan menuju Siak dan Bengkalis, sehingga beban lalu lintas perairan di lintasan alur pelayaran Sungai Siak dapat di minimalkan, tanpa menghilangkan fungsi Sungai Siak sebagai media transportasi air.

Untuk mempercepat mengatasi masalah abrasi di Sungai Siak, maka perlu evaluasi atas beberapa kebijakan yang telah dilakukan. Beberapa kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan antara lain :

- Meningkatkan pengawasan masalah penggunaan lahan, terutama yang berada di sepadan Sungai Siak.
- Melakukan upaya reboisasi lahan di pinggir Sungai Siak
- Menyusun aturan resmi pelayaran di Sungai Siak
- Melengkapi kekurangan rambu – rambu bagi kegiatan pelayaran di Sungai Siak
- Merealisasikan dengan segera penyelesaian dan penggunaan Jembatan Siak dan Jembatan Maredan
- Mempertegas kembali komitmen pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Siak.
- Merealisasikan penyusunan dan perencanaan master plan pengelolaan DAS Siak secara terpadu.
- Menempatkan keterlibatan Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat, Ninik Mamak di Kabupaten Siak pada skala prioritas dalam upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pengelolaan DAS Siak.
- Menindak lanjuti hasil penelitian yang berbaitan dengan abrasi Sungai Siak.



Gambar 3.24 Pembangunan Turap Pencegah Abrasi Sungai Siak

3.2.4 Pencemaran Sungai Siak

Masalah pencemaran perairan merupakan salah satu isu lingkungan yang kerap terjadi belakangan ini, bukan hanya terjadi di Kabupaten Siak, tetapi juga di wilayah lainnya. Penanganan pengelolaan lingkungan hidup termasuk masalah pencemaran air tidak dapat dilakukan secara partial, namun harus dilakukan secara komprehensif. Belum maksimalnya penanggulangan masalah ini salah satunya disebabkan oleh cara memandang (*how to look*) timbulnya masalah ini. Upaya penanggulangan masalah pencemaran air harus dipandang secara global, artinya mengatasi pencemaran yang terjadi di perairan sungai harus dengan memperbaiki sistem yang terjadi pada kawasan daerah aliran sungai yang bersangkutan. Untuk itu perlu peninjauan kembali dan evaluasi kebijakan terhadap pengelolaan Sungai Siak dalam kaitan dampak yang ditimbulkannya dengan mengedepankan upaya pencegahan pencemaran secara preventif, bukan seperti yang dilakukan selama ini, dimana ketika adanya kasus baru dilaksanakan penanggulangannya.

Konsep pengelolaan masalah pencemaran air yang diakibatkan aktivitas perkebunan dan limbah cair industri yang dilaksanakan oleh dunia usaha, selama ini lebih mengandalkan teknologi *End of Pipe* dengan membangun instalasi pengolahan air limbah. Metode ini disamping memberatkan kalangan usaha terbukti belum mampu memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu dimasyarakatkan konsep *Clean Production* terhadap kalangan dunia usaha melalui kegiatan sosialisasi secara intensif, sekaligus sebagai langkah awal menuju sertifikasi ISO 14.000 series.

Kebijakan Low Enforcement terhadap penanganan masalah pencemaran Sungai Siak sampai sejauh ini masih belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu evaluasi atas beberapa kebijakan yang telah

dilakukan. Beberapa kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan antara lain :

- Menerapkan strategi pengelolaan DAS dengan konsep satu perencanaan untuk satu sungai yang terintegrasi dari hulu ke hilir (*one plan one river*)
- Evaluasi kebijakan yang bersifat represif terhadap pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Tapung dengan mengedepankan kebijakan yang bersifat preventif.
- Penyusunan dan perencanaan master plan pengelolaan DAS Siak secara terpadu.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis sektoral terhadap berbagai kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai di Propinsi Riau.
- Membangun kembali komitmen pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dengan melibatkan segenap stake holder

BAB IV

REKOMENDASI

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban bagi kita semua yang patut diwujudkan melalui upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup **(UU No. 23 / 1997)**. Keberadaan Undang – Undang Nomor : 04 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat untuk melaksanakan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berpedoman pada undang undang tersebut, beserta peraturan pendukung lainnya yang ada di bawahnya, upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan. Dimana dalam undang – undang tersebut dinyatakan bahwa upaya pengelolaan lingkungan dilakukan secara sadar dan terencana, oleh karena itu perlu adanya kesamaan persepsi tentang pengelolaan lingkungan.

Mengamati kondisi dan permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Siak Tahun 2006 serta dengan membandingkannya dengan tahun 2005, maka di suatu sisi sudah terlihat beberapa kemajuan dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi yang telah diperoleh melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta evaluasi harus terus dapat ditingkatkan. Karena masih banyak kelemahan dan kekurangan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya kemajuan ini tidak terlepas dari dukungan segenap pihak terkait dari beberapa komponen pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Siak, baik dari kalangan pemerintahan, sektor swasta, maupun munculnya kesadaran masyarakat. Setelah mengkaji permasalahan pengelolaan lingkungan sepanjang tahun 2006, serta membandingkannya dengan permasalahan tahun 2005 serta dengan tetap mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan untuk lebih mengoptimalkan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Siak, maka perlu tidak lanjut dari upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut.

Disamping itu mengingat isu lingkungan yang hampir sama dengan tahun sebelumnya disamping sifat dari konsep pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan terintegrasi

serta belum dijalankannya rekomendasi yang diberikan terhadap status lingkungan hidup 2005, maka secara umum program yang direkomendasikan pada laporan Status Lingkungan Hidup Daerah tahun 2006 untuk isu lingkungan yang sama hampir sama pula dengan program yang direkomendasikan pada laporan Status Lingkungan Hidup Daerah tahun 2005. Beberapa perbedaan hanya bersifat pemantapan dan penambahan pertimbangan prioritas pelaksanaan sehubungan adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan. Beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai dukungan terhadap upaya tersebut secara umum antara lain adalah seperti berikut ini.

4.1 REKOMENDASI PROGRAM

● Program Penataan Fungsi Kelembagaan & Pengembangan SDM.

- ✚ Memantapkan penataan struktur organisasi tata laksana pemerintahan Kabupaten Siak, dengan mengintegrasikan adanya keterwakilan kepentingan fungsi lingkungan hidup disetiap instansi teknis terkait.
- ✚ Menindaklanjuti dan membangun kerjasama dengan setiap stake holder yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dengan membentuk lembaga independen sebagai mediator antara pihak pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat.
- ✚ Membangun kerjasama dengan instansi terkait lain baik instansi vertikal maupun horizontal, baik dalam penyusunan program kerja ataupun dalam implementasinya agar tercipta sinergi, sehingga dapat memberikan output yang maksimal, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja dan anggaran dana.
- ✚ Merealisasikan pembentukan lembaga non struktural ditingkat bawah (desa) sebagai perpanjangan fungsi Bapedalda Kabupaten.
- ✚ Secara kontinyu melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan ataupun kursus – kursus dibidang lingkungan hidup.
- ✚ Peningkatan kualitas SDM bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen terhadap upaya pengelolaan lingkungan.
- ✚ Mengintensifkan kinerja aparaturnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Siak, dengan melengkapi sarana dan fasilitas di dalamnya termasuk laboratorium.
- ✚ Melaksanakan seminar, kursus penyadaran dan pemahaman lingkungan bagi segenap pembuat kebijakan di Kabupaten Siak.

- ✚ Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Siak yang memadai untuk merealisasikan program Penataan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

● **Program Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam Lingkungan**

- ✚ Menempatkan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap ekosistem sumberdaya alam dan lingkungan yang telah terkena degradasi lingkungan ke dalam skala prioritas pembangunan pengelolaan lingkungan hidup.
- ✚ Melanjutkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan terhadap kegiatan ataupun usaha yang menghasilkan limbah, dengan melakukan pemantauan lapangan yang berkesinambungan.
- ✚ Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak ke kondisi semula, termasuk hutan lindung, suaka marga satwa, dan green belt di kawasan rawan lingkungan.
- ✚ Pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi yang merupakan kawasan publik dan tempat - tempat tertentu.
- ✚ Merealisasikan upaya rehabilitasi terhadap kawasan – kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan.
- ✚ Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Siak yang memadai untuk merealisasikan Program Konservasi Dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam /Lingkungan

● **Program Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup**

- ✚ Membuat dan menyusun perangkat peraturan seperti peraturan daerah dan keputusan bupati yang dapat mengayomi segenap kepentingan lingkungan secara komprehensif di berbagai sektor dan bukan secara parsial.
- ✚ Melakukan sosialisasi terhadap aturan dan kebijakan yang diambil
- ✚ Penyusunan petunjuk teknis operasional dari setiap kebijakan yang dilaksanakan, khususnya terhadap penanganan isu pokok lingkungan yang berkembang di Kabupten Siak.
- ✚ Mengadopsi dan menyesuaikan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan menerbitkan peraturan daerah dan ketentuan pada tingkat kabupaten.
- ✚ Mengintegrasikan instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan pada setiap kegiatan pembangunan dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Siak diberbagai sektor, seperti adanya

- kewajiban penyusunan AMDAL ataupun UKL UPL di setiap kegiatan yang dikenai wajib AMDAL dan wajib UKL UPL.
- ✚ Mewajibkan setiap kegiatan yang memberikan dampak terhadap lingkungan untuk menyusun dan melaporkan standar operasional prosedur (SOP).
 - ✚ Memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penyusunan perda (legislatif), aparat penegakan hukum (yudikatif) lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan.
 - ✚ Intensifikasi kinerja aparat penegakan hukum lingkungan, termasuk kinerja aparat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada di institusi pengelolaan lingkungan kabupaten.
 - ✚ Mengintensifkan kegiatan sosialisasi terhadap semua produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
 - ✚ Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Siak yang memadai untuk merealisasikan Program Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup.

● **Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upaya Pengelolaan Lingkungan**

- ✚ Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium lingkungan sebagai rujukan terhadap berbagai analisis parameter lingkungan hidup.
- ✚ Menyediakan fasilitas laboratorium bergerak untuk melakukan sampling dan analisis yang harus dilakukan secara in situ.
- ✚ Pengadaan fasilitas dan sarana mobilisasi petugas lapangan agar dapat menjangkau dan memiliki aksesibilitas lebih terhadap lokasi – lokasi yang menjadi sasaran peninjauan lapangan.
- ✚ Pengadaan sarana dan fasilitas pemadaman api secara bertahap.
- ✚ Pengadaan sarana dan fasilitas yang digunakan untuk sampling limbah.
- ✚ Pengadaan fasilitas pendukung lainnya seperti gedung, dan peralatan kantor yang lebih representatif.
- ✚ Pengadaan sarana perpustakaan dan berbagai buku sebagai pusat referensi teori upaya pengelolaan lingkungan.

● **Program Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Lingkungan Hidup**

- ✚ Melibatkan segenap pemuka dan tokoh masyarakat serta pemuka adat setempat dalam setiap pengambilan kebijakan lingkungan hidup dengan tetap memegang prinsip efektifitas dan efisiensi.
- ✚ Mengintegrasikan program pengelolaan lingkungan kepada dunia pendidikan baik tingkat dasar, menengah ataupun tingkat atas dan

- perguruan tinggi dengan memasukkan materi pengelolaan lingkungan kedalam kurikulum muatan lokal.
- ✚ Melibatkan tokoh masyarakat dan tetua adat dalam melakukan sosialisasi terhadap semua kebijakan lingkungan kepada segenap lapisan masyarakat.
 - ✚ Melakukan pembinaan masyarakat agar dapat diikutsertakan dan berpartisipasi terhadap upaya penanggulangan bencana alam dan lingkungan.
 - ✚ Merealisasikan pembentukan kelompok – kelompok sadar lingkungan ditingkat desa sebagai perpanjangan tangan Bapedalda ditingkat bawah dan memasukkannya kedalam organisasi non struktural.
 - ✚ Melakukan pembinaan masyarakat hutan dan masyarakat pesisir serta nelayan tentang tata cara melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - ✚ Memberikan insentif khusus bagi masyarakat yang dianggap berjasa dalam pengelolaan lingkungan.

4.2 REKOMENDASI PROYEK

Sehubungan dengan permasalahan dan isu lingkungan yang terjadi pada tahun 2006, maka program – program tersebut di atas perlu diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan - kegiatan yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan terhadap isu pokok tersebut pada tahun 2007. Diantara proyek kegiatan tersebut antara lain adalah berikut ini.

Kebakaran Hutan dan Lahan

✚ Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan.

Sasaran :

- ✘ Masyarakat Desa sekitar hutan agar tidak melakukan kegiatan perladangan berpindah – pindah dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- ✘ Memahami cara bercocok tanam dengan benar dan memperhatikan bahaya lingkungan yang mungkin muncul akibat kebakaran lahan dan hutan.

✚ Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan Ditingkat Desa.

Sasaran :

- ✘ Pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak pencegahan terjadinya kebakaran hutan.
- ✘ Dapat lebih bertanggung jawab menjaga wilayahnya masing – masing, bukan saja terhadap ancaman kebakaran, namun juga terhadap proses degradasi lingkungan lainnya.
- ✘ Sebagai perpanjangan tangan Bapedalda untuk mensosialisasikan kebijakan - kebijakan pada tingkat bawah, termasuk kebijakan penanggulangan masalah kebakaran hutan.

✚ Pendidikan dan Pelatihan Personil Satuan Pemadam Kebakaran.

Sasaran :

- ✘ Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tata cara penanggulangan masalah kebakaran hutan.
- ✘ Peningkatan pengetahuan tata cara penyelamatan dan pertolongan korban kebakaran hutan.
- ✘ Memiliki pengetahuan manajemen penanggulangan kebakaran hutan dalam arti luas, termasuk cara memobilisasi penduduk dan koordinasi terhadap pihak terkait.

✚ Pengadaan fasilitas sarana penanggulangan kebakaran hutan,.

Sasaran :

- ✘ Mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas lapangan dalam rangka penanggulangan masalah kebakaran.
- ✘ Mempermudah aksesibilitas terhadap lokasi – lokasi tempat terjadinya kebakaran hutan.

✚ Pemberian insentif khusus ataupun award kepada PPNS yang berhasil menyeret pelaku pembakaran lahan dan hutan ke pengadilan.

Sasaran :

- ✘ Meningkatkan motivasi PPNS dan PPLHD dalam bekerja untuk mengungkap kasus kejahatan lingkungan dan menangkap para pelaku kejahatan tersebut
- ✘ Memberikan shock terapi kepada pelaku kejahatan lingkungan agar menyadari kesalahan pekerjaannya.

Illegal Logging

Sosialisasi dan Penyuluhan Kejahatan Illegal Logging Kepada Masyarakat Desa Sekitar Hutan.

Sasaran :

- ✘ Peningkatan kesadaran masyarakat desa sekitar hutan dalam melestarikan fungsi ekologis hutan
- ✘ Tidak melakukan kerjasama ataupun mendukung para pemodal untuk melakukan kejahatan illegal logging.

Pemantapan Kelompok Sadar Lingkungan Ditingkat Desa, Sebagai Pengawas Langsung Di Lapangan.

Sasaran :

- ✘ Peningkatan peran dan partisipasi langsung masyarakat dalam pencegahan kegiatan illegal logging.
- ✘ Lebih mudah dalam pengkoordinasian dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemberdayaan fungsi pejabat PPNS Bapedalda.

Sasaran :

- ✘ Mengintensifkan Peran dan Fungsi Sumberdaya Manusia Bapedalda Siak.
- ✘ Penegakan Hukum Lingkungan.
- ✘ Menyeret Perusak Lingkungan ke Pengadilan.

Seminar dan lokakarya penanganan masalah illegal logging melalui pemberdayaan masyarakat hutan.

Sasaran :

- ✘ Memberikan wawasan dan pemahaman lingkungan hidup bagi masyarakat hutan.
- ✘ Memberikan pengetahuan dan tata cara eksploitasi sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
- ✘ Memberikan solusi alternatif mata pencaharian pengganti bagi masyarakat sekitar hutan.

✚ Pemberian Insentif Khusus ataupun Reward Kepada PPNS Yang Berhasil Menyeret Pelaku Kejahatan Illegal Logging dan Hutan Ke Pengadilan.

Sasaran :

- ✘ Peningkatan kinerja PPNS dan PPLHD dalam bekerja untuk mengungkap kasus kejahatan lingkungan dan menangkap para pelaku kejahatan tersebut
- ✘ Memberikan shock terapi kepada pelaku kejahatan lingkungan agar menyadari kesalahan pekerjaannya.

✚ **Abrasi Sungai Siak**

✚ Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Lahan yang Rawan Terhadap Bahaya Abrasi dan Sedimentasi di Kawasan DAS Siak .

Sasaran :

- ✘ Sebagai pengumpulan informasi terbaru dan akurat sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.
- ✘ Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan penanganan masalah abrasi dan sedimentasi di Sungai Siak.

✚ Melakukan penyusunan aturan dan pengelolaan transportasi perairan Sungai Siak

Sasaran :

- ✘ Sebagai panduan bagi awak kapal dalam melewati lintasan pelayaran di Sungai Siak
- ✘ Sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengawasi perairan Sungai Siak sebagai media transportasi

✚ Melakukan Kajian Khusus Masalah Abrasi dan Sedimentasi Di Sungai Siak.

Sasaran :

- ✘ Mengetahui sejauh mana tingkat abrasi dan sedimentasi yang terjadi di Sungai Siak
- ✘ Mengetahui penyebab terjadinya bahaya abrasi dan sedimentasi secara lebih akurat

✚ Melakukan upaya konservasi tebing sungai yang mengalami abrasi melalui penanaman vegetasi yang sesuai untuk kawasan DAS Siak.

Sasaran :

- ✘ Menahan agar tidak terjadi runtuhnya dinding – dinding Sungai Siak.
- ✘ Melakukan konsevasi terhadap ekosistem sungai dengan vegetasi setempat.

- ✚ Melaksanakan Studi Khusus Tentang Masalah Penggunaan Lahan Di DAS Siak Untuk Menghindari Dampak Abrasi dan Sedimentasi Dikaitkan Dengan Kondisi Lingkungan dan Musim.

Sasaran :

- ✘ Terciptanya peta penggunaan lahan aktual dan faktual serta kondisi tingkat kerawanan di kawasan DAS Siak.
- ✘ Adanya panduan bagi pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam melakukan pengelolaan lahan.

✚ **Pencemaran Sungai Siak**

- ✚ Pembinaan Pengusaha dan Masyarakat DAS Siak.

Sasaran :

- ✘ Peningkatan kesadaran pengusaha dan masyarakat DAS Siak untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara benar.
- ✘ Agar segenap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah di kawasan DAS Siak dapat melakukan pengelolaan limbahnya dengan sungguh – sungguh.
- ✘ Agar masyarakat DAS Siak dapat melaksanakan fungsi pengawasan di lapangan

- ✚ Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan Ditingkat Desa.

Sasaran :

- ✘ Pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak pencegahan terjadinya pencemaran perairan di Sungai Siak.
- ✘ Dapat lebih bertanggung jawab menjaga wilayahnya masing – masing, bukan saja terhadap ancaman pencemaran perairan Sungai Siak, namun juga terhadap proses degradasi lingkungan lainnya.
- ✘ Sebagai perpanjangan tangan Bapedalda untuk mensosialisasikan kebijakan - kebijakan pada tingkat bawah, termasuk kebijakan penanggulangan pencemaran Sungai Siak dan pengaruhnya terhadap DAS Siak.

✚ Pendidikan dan Pelatihan Personil Penanggulangan Pencemaran Sungai.

Sasaran :

- ✘ Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tata cara penanggulangan pencemaran sungai.
- ✘ Memiliki pengetahuan manajemen penanggulangan pencemaran sungai, termasuk keterlibatan masyarakat sekitar dan koordinasi terhadap pihak terkait jika ditemui adanya kasus pencemaran.

✚ Pengadaan fasilitas sarana penanggulangan pencemaran air.

Sasaran :

- ✘ Mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas lapangan dalam rangka penanggulangan masalah pencemaran.
- ✘ Mempermudah aksesibilitas terhadap lokasi – lokasi tempat terjadinya pencemaran air sungai

✚ Pemberian insentif khusus ataupun award kepada PPNS yang berhasil menyeret pelaku pencemaran air (lingkungan) ke pengadilan.

Sasaran :

- ✘ Meningkatkan motivasi PPNS dan PPLHD dalam bekerja untuk mengungkap kasus kejahatan lingkungan dan menangkap para pelaku kejahatan tersebut
- ✘ Memberikan shock terapi kepada pelaku kejahatan lingkungan agar menyadari kesalahan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPEDALDA KABUPATEN SIAK. 2004. Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004.
- BAPEDALDA KABUPATEN SIAK. 2005. Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005
- BAPEDALDA KABUPATEN BENGKALIS. 2003. Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2003.
- BAPEDALDA PROPINSI RIAU. 2004. Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Riau 2004
- BAPEDALDA PROPINSI RIAU. 2005. Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Riau 2005
- BAPPEDA KABUPATEN SIAK. 2001. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak.
- BAPEDALDA KABUPATEN SIAK. 2001. Studi Analisis Profil Industri dan Abrasi Tebing Sungai Pada DAS Siak Kabupaten Siak
- BAPPEDA KABUPATEN SIAK. 2005. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Siak 2002 – 2006.
- BAPPEDA KABUPATEN SIAK. 2002. Rencana Strategis Daerah Kabupaten Siak 2002 – 2006.
- BAPPEDA KABUPATEN SIAK 2005. Pendapatan Regional Kabupaten Siak 2001 - 2004.
- BADAN SOSIAL PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SIAK. 2006. Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Sosial Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2005
- BPS KABUPATEN SIAK, 2006. Siak Dalam Angka 2005.
- DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK. 2006. Profil Kesehatan Kabupaten Siak 2005
- DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN SIAK. 2005. Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Siak 2005.
- DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SIAK. 2006. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2006.
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. 2005. Pedoman Penyusunan Laporan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2005.

- KRISTANTO PHILIP. 2002. Ekologi Industri. Kerjasama Universitas Kristen PETRA Surabaya dan Penerbit ANDI Yogyakarta.
- SUGIHARTO. 1987. Dasar-Dasar Pengolahan Air Limbah. Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.
- SRIKANDI FARDIAZ. 1992. Polusi Air & Udara. Kerjasama Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor.